



RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
(RKPD)
KABUPATEN LEBAK 2014



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK 2013



PERATURAN BUPATI LEBAK

NOMOR TAHUN 2013

TENTANG:

**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN
LEBAK TAHUN ANGGARAN 2014**

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Pasal 129 (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2014
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perubahan kedua atau Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Peraturan Daerah ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undan-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2005 Nomor 9 Seri D) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lebak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008 Nomor 19) ;
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebak Tahun 2009-2014. (Lembar Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2009 Nomor 8) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebak Tahun 2009 – 2014 (Lembar Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2011 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI LEBAK TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN LEBAK TAHUN 2014.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebak.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Daerah.
5. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut Rencana Pembangunan Tahunan Daerah.

BAB II SISTEMATIKA RKPD

Pasal 2

- (1) Sistematika RKPD Tahun Anggaran 2014 terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB VI PENUTUP

- (2) Isi dan uraian RKPD Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di
Rangkasbitung
pada tanggal

BUPATI LEBAK,

MULYADI JAYABAYA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR ISI MATRIK PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Hubungan Antar Dokumen	3
1.4 Sistematika Dokumen RKPD	6
1.5 Maksud dan Tujuan	8
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	9
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah	9
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD	35
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah	42
2.4 Isu Strategis	47
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	49
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	49
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	54
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	61
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan	62
4.2 Tema dan Prioritas Pembangunan Tahun 2012	66
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	71
BAB VI PENUTUP	189

DAFTAR ISI Matrik Rencana Program dan Kegiatan

No.	Nama SKPD	Halaman
1	Dinas Pendidikan	94 - 120
2	Dinas Kesehatan	121 - 128
3	RSUD Adjidarmo	129 - 130
4	Disdukcapil	131 - 132
5	Kantor Diklat	133
6	Disnakersos	134 - 135
7	Disporabudpar	136 - 138
8	Distamben	139 - 141
9	KPAB	142
10	BPBD	143
11	Dinas Binamarga	144 - 146
12	Dinas Kebersihan	147 - 151
13	Dishub	152 - 153
14	Kantor PLH	154 - 155
15	Dinas Ciptakarya	156 - 159
16	Dinas SDA	160 - 161
17	BP4K	162 - 163
18	Dinas Peternakan	164 - 166
19	DKP	167 - 168
20	Dinas Hutbun	169 - 174
21	Dinas Koperasi	175 - 176
22	KPPT	177
23	Dinas Perindag	178 - 179
24	Dinas Pertanian	180 - 184
25	Bappeda	185 - 186
26	Sekretariat Daerah	187 - 190
27	BP2KBMPD	191 - 197
28	BKD	198 - 199
29	DPPKD	200
30	Sekretariat Dewan	201 - 202
31	Inspektorat	203 - 204
32	Kantor Kesbanglinmas	205
33	Kantor Satpol PP	206
34	Kantor Arsip	207

No.	Nama SKPD	Halaman
35	Kecamatan Rangkasbitung	208
36	Kecamatan Cibadak	208
37	Kecamatan Warunggunung	209
38	Kecamatan Maja	210
39	Kecamatan Cipanas	210
40	Kecamatan Muncang	211
41	Kecamatan Leuwidamar	211
42	Kecamatan Bojongmanik	212
43	Kecamatan Cijaku	212
44	Kecamatan Malingping	213
45	Kecamatan Panggarangan	213
46	Kecamatan Bayah	214
47	Kecamatan Cibeber	214
48	Kecamatan Gunung Kencana	215
49	Kecamatan Sajira	215
50	Kecamatan Cikulur	216
51	Kecamatan Cileles	216
52	Kecamatan Cimarga	217
53	Kecamatan Banjarsari	218
54	Kecamatan Curugbitung	218
55	Kecamatan Sobang	219
56	Kecamatan Wanasalam	219
57	Kecamatan Ciligrang	220
58	Kecamatan Cirinten	220
59	Kecamatan Kalanganyar	221
60	Kecamatan Cigemblong	221
61	Kecamatan Lebakgedong	222
62	Kecamatan Cihara	222

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Daerah, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Tahun 2014 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD 2009-2014.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk kurun waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk perencanaan pembangunan tahunan.

Pemerintah Kabupaten Lebak telah menyusun RPJPD 2005-2025 yang ditetapkan dengan Perda Nomor 19 Tahun 2008, dan RPJMD 2009-2014 yang ditetapkan dengan Perda Nomor 8 Tahun 2009 yang telah direvisi dan ditetapkan dengan Perda Nomor 7 Tahun 2011. Selanjutnya RPJMD tersebut dijabarkan dalam dokumen perencanaan tahunan berupa RKPD.

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, RKPD Kabupaten sekurang-kurangnya memuat tentang kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun sumber-sumber lain. Penetapan program prioritas berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkesinambungan serta berkelanjutan, RKPD harus mempunyai keterkaitan erat dengan RPJMD, RPJPD dan juga memperhatikan RPJMN dan RKP.

Dalam rangka fasilitasi kepada setiap SKPD, dokumen RKPD Kabupaten Lebak digunakan sebagai acuan penyusunan Renja SKPD. Beberapa upaya untuk mensinergikan program dan kegiatan di tahun 2014 diantaranya melalui inventarisasi data, permasalahan, dan potensi yang ada. Selain itu juga dilakukan diskusi dalam berbagai forum antara lain

Forum SKPD Kabupaten dan Musrenbang RKPD Kabupaten Lebak Tahun 2014 yang melibatkan unsur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Instansi Vertikal di Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Pakar Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Asosiasi Profesi.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 dimaksudkan sebagai bagian dari upaya menyeluruh untuk mewujudkan pencapaian visi misi Kabupaten Lebak sekaligus sebagai pedoman penyusunan RAPBD Kabupaten Lebak Tahun 2014 sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan RKPD Kabupaten Lebak tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010 – 2014;
11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2013 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014;
12. Peraturan Gubernur Banten Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2014;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2009-2014.
19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2009-2014.

1.3 Hubungan antar Dokumen

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 ini merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Lebak tahun 2009-2014 yang telah memasuki tahun transisi sebagai suatu kesatuan langkah akselerasi pencapaian Visi Kabupaten Lebak Tahun 2014. Dokumen RPJMD dalam penyusunannya berpedoman pada RPJPD.

Dalam penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Lebak Tahun 2014 digunakan sejumlah dokumen perencanaan yang ada di tingkat nasional maupun daerah (Provinsi Banten dan Kabupaten Lebak), yaitu sebagai berikut:

1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional sudah ditetapkan dengan Peraturan Presiden No.5/2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, pada tanggal 15 Januari 2010. Ada 3 (tiga) dokumen sebagai lampiran dari Perpres No.5/2010, yaitu: (i) Buku I dengan judul: "Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan", (ii) Buku II dengan judul: "Memperkuat Sinergi Antar bidang Pembangunan", dan (iii) Buku III dengan judul: "Memperkuat Sinergi Antara Pusat dan Daerah dan Antar Daerah".

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tersebut menjadi acuan penyusunan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Lebak, khususnya dalam menjabarkan program-program sektoral dan program kewilayahan / regional. Program yang bersifat sektoral, antara lain dapat dilihat pada Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan. Inpres ini memuat program-program yang dinaungi ke dalam Program Pro-Rakyat, Program Keadilan untuk Semua (*justice for all*); dan Program Pencapaian Tujuan Milenium (*Millenium Development Goals* - MDGs).

2) RPJMD Provinsi Banten

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lebak tahun 2014.

3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Lebak

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2009-2014 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2009-2014 yang telah direvisi dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2009-2014; memuat visi, misi dan program prioritas Kepala Daerah terpilih; dan rancangan rencana teknokratik, untuk periode perencanaan 5 tahunan. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 ini merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lebak 2004-2014.

4) RENJA – SKPD

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif. Rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2014 sebagai bahan untuk penyusunan Rancangan RKPD Kabupaten Lebak Tahun 2014. Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Rancangan Renja SKPD, adalah sebagai berikut:

- a. Mengacu pada rancangan awal RKPD Tahun 2014, yang digunakan sebagai acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif dalam Renja SKPD Tahun 2014, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD Tahun 2014.
- b. Mengacu pada Renstra SKPD Tahun 2009- 2014, sebagai acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja SKPD, selaras dengan Renstra SKPD.
- c. Mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, sebagai acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra SKPD berdasarkan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.
- d. Untuk memecahkan masalah yang dihadapi, sebagai acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja SKPD, serta dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.
- e. Memasukkan usulan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan yang terkait dengan SKPD, sebagai acuan perumusan kegiatan dalam rancangan Renja SKPD, mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPD.

Selain itu RKPD Kabupaten Lebak juga mengacu, memperhatikan, diserasikan dengan RKP Nasional dan RKPD Provinsi Banten dalam rangka sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pusat melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang).

Sinkronisasi yang dimaksud terutama dalam hal penetapan prioritas pembangunan daerah yang relevan dengan provinsi maupun pusat. Hal ini merupakan perwujudan keterpaduan dan kesatuan perencanaan pembangunan secara nasional, dengan tetap memperhatikan kondisi, potensi serta dinamika perkembangan daerah, nasional dan global. Hubungan antar dokumen perencanaan pembangunan bersifat saling mengisi dan melengkapi untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yang mencakup semua bidang kehidupan secara terpadu dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam konteks pembangunan yang berdimensi kewilayahan, perencanaan pembangunan daerah haruslah disinergikan dengan dokumen perencanaan tata ruang wilayah (RTRW) baik dalam skala lokal, regional maupun nasional. Perencanaan

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Memuat hasil Evaluasi dari Gambaran Umum Kondisi Daerah meliputi : Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Pelayanan Umum dan Daya Saing Daerah, Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD serta Permasalahan Pembangunan Daerah

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini berisi tentang Arah Kebijakan Ekonomi Daerah meliputi Kondisi Ekonomi Daerah, Tantangan dan Proses Perekonomian Daerah. Arah Kebijakan Keuangan Daerah meliputi Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan serta Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pada Bab ini mengemukakan secara eksplisit perumusan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Berdasarkan Hasil Analisis terhadap Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja yang Direncanakan dalam RPJMD, Identifikasi Isu Strategis dan Masalah Mendesak di Tingkat Daerah dan Nasional, Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Beserta Kerangka Pendanaannya.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Bab ini mengemukakan rincian Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah yang Disusun Berdasarkan Evaluasi Pembangunan Tahunan, Kedudukan Tahun Rencana (RKPD) dan Capaian Kinerja yang Direncanakan dalam RPJMD yang disajikan dengan tabel.

BAB VI PENUTUP

Bab ini menyajikan rangkuman kesimpulan isi dari RKPD dan pointer harapan – harapan yang berkenaan dengan disusunnya buku RKPD tahun 2014 ini.

1.5 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lebak Tahun 2014 disusun dengan maksud untuk :

- a. Menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2014.
- b. Sebagai pedoman Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun 2014.

2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lebak adalah untuk menciptakan sinergisitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Kabupaten Lebak secara geografis terletak antara 6°18'-7°00' Lintang Selatan dan 105°25'-106°18' Bujur Timur yang beriklim tropis dengan suhu rata-rata berkisar antara 25⁰-27,9⁰ C dengan kelembaban udara antara 74%-86%. Kabupaten Lebak memiliki luas wilayah 304.472 Ha (3.044,72 Km²) dengan batas-batas administratif sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Serang dan Tangerang
- Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
- Sebelah Barat : Kabupaten Pandeglang
- Sebelah Timur : Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kabupaten Lebak

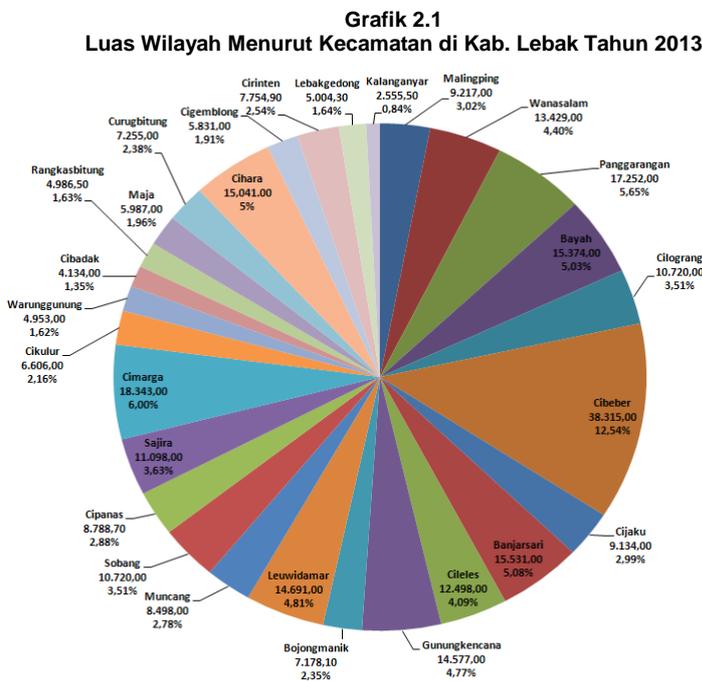


Sumber : Bappeda Kabupaten Lebak dan Bakosurtanal, 2007.

Berdasarkan topografinya, Kabupaten Lebak terbagi dalam 3 (tiga) karakteristik yaitu

wilayah selatan dengan ketinggian 0-200 meter dpl (di atas permukaan laut) terutama berada di sepanjang pantai selatan; wilayah tengah dan utara dengan ketinggian antara 201-500 meter; serta wilayah timur yang memiliki ketinggian antara 501-1000 meter dengan puncaknya berupa Gunung Sanggabuana dan Gunung Halimun.

Secara administratif Kabupaten Lebak terbagi dalam 28 kecamatan, terdiri dari 340 desa dan 5 kelurahan dengan rincian luas wilayah kecamatan sebagai berikut :

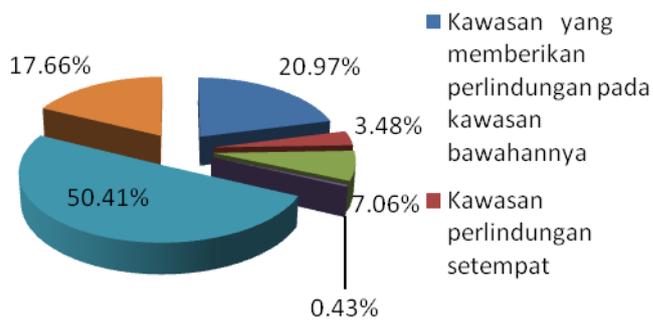


Kabupaten Lebak memiliki dua Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu DAS Ciujung yang meliputi Sungai Ciujung, Sungai Cilaki, Sungai Ciberang, dan Sungai Cisimeut; serta DAS Ciliman - Cimadur yang meliputi Sungai Ciliman dengan anak sungainya, Sungai Cimadur, Sungai Cibareno, Sungai Cisiih, Sungai Cihara, Sungai Cipager, dan Sungai Cibaliung.

Sumber data: Bappeda Kabupaten Lebak dan Bakosurtanal, 2007

Dalam upaya pengembangan wilayah, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lebak telah mengatur pola pemanfaatan ruang, yang meliputi kawasan budidaya dan kawasan lindung. Kawasan budidaya di Kabupaten Lebak mencakup luasan 207.250 Ha yang terdiri dari kawasan budidaya pertanian seluas 153.485 Ha dan kawasan budidaya non pertanian seluas 53.765 Ha (termasuk di dalamnya kawasan permukiman, industri, pertambangan, dan pariwisata). Sedangkan kawasan lindung ditetapkan seluas 97.222 Ha atau sekitar 31,93% dari total luas wilayah, terdiri dari kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya seluas 63.845 Ha, kawasan perlindungan setempat dengan luasan 10.595 Ha, kawasan suaka alam dan cagar budaya seluas 21.482 Ha, serta kawasan rawan bencana gerakan tanah dengan luas 1.300 Ha. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik 2.2 berikut ini:

Grafik 2.2
Prosentase Rencana Pola Pemanfaatan Ruang



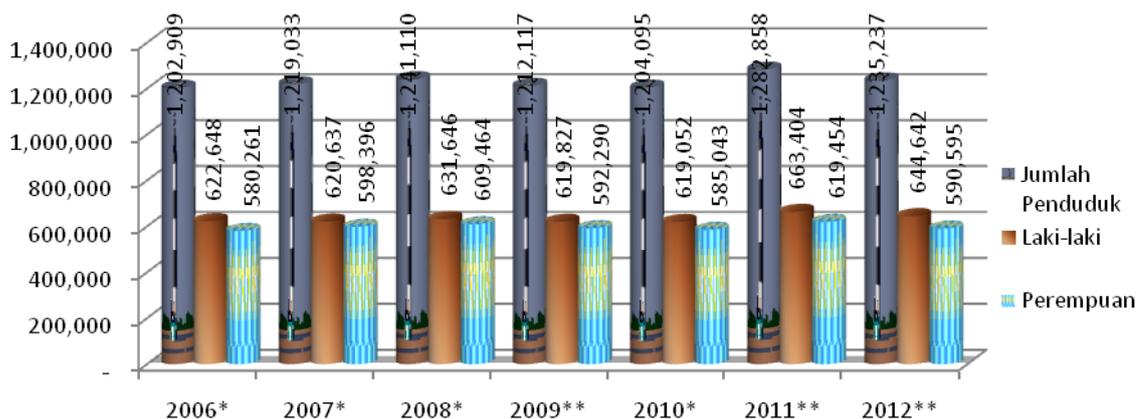
Sumber : Bappeda Kabupaten Lebak 2007.

Grafik 2.2 juga menyiratkan bahwa sektor pertanian masih menjadi *prime mover* (penggerak utama) bagi pengembangan wilayah, dibuktikan melalui pengalokasian penggunaan lahan yang mencapai 50% dari total luas kabupaten. Hal ini cukup beralasan, mengingat potensi pertanian yang ada di Kabupaten Lebak tersebar hampir di setiap kecamatan. Sebagai contoh, untuk pertanian tanaman padi sawah dapat dikembangkan dengan baik di Kecamatan Rangkasbitung, Kalanganyar, Cimarga, Cibadak, Warunggunung, Maja, Sajira, Cipanas, Lebakgedong, Sobang, Muncang, Malingping, Bayah, Panggarangan, dan Cibeber. Sedangkan sebagian wilayah Kecamatan Rangkasbitung, Cimarga, Banjarsari, Cileles, Gunungkencana, Cibadak, Warunggunung, Maja, Sajira, Bayah, Panggarangan, dan Cibeber mempunyai potensi bagi pengembangan peternakan.

Sektor non pertanian yang cukup menonjol di Kabupaten Lebak adalah sektor industri, pertambangan, dan pariwisata. Kawasan industri diarahkan pengembangannya di Kecamatan Rangkasbitung dan Maja yang memiliki potensi untuk tumbuh berkembangnya aglomerasi industri. Adapun kawasan pertambangan masih mengandalkan pada potensi penambangan emas di Kecamatan Cibeber, serta pertambangan batu bara dan bahan galian golongan A maupun golongan B di Kecamatan Bojongmanik, Banjarsari, Panggarangan, dan Bayah. Sementara potensi pariwisata yang diandalkan adalah pariwisata alam pantai, terutama di Kecamatan Malingping, Panggarangan, dan Bayah. Potensi wisata alam lainnya adalah Arung Jeram sungai Ciujung di Lebak Gedong dan pemandian air panas di Cipanas. Selain wisata alam, Kabupaten Lebak memiliki potensi pariwisata budaya, yang dapat ditemui pada masyarakat adat Cisungsang dan Citorek, serta masyarakat Baduy. Potensi wisata budaya lain yang cukup menjanjikan adalah beberapa peninggalan bersejarah seperti situs Kosala dan Cibedug.

Bila merujuk pada alokasi penggunaan lahan di atas, maka Kabupaten Lebak telah memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mensyaratkan bagi suatu wilayah untuk memiliki persentase kawasan lindung setidaknya 30% sehingga diharapkan daya dukung lingkungan akan terjaga.

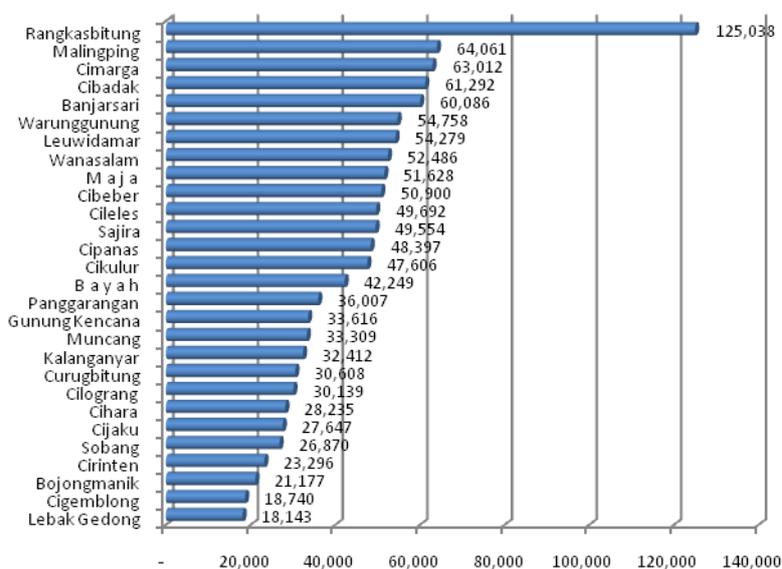
Grafik 2.3
Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Lebak Tahun 2006-2012



Sumber : * BPS Kab. Lebak Tahun 2012
** Disdukcapil Kab. Lebak Tahun 2012

Dari sisi demografi, jumlah penduduk Kabupaten Lebak berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010 mencapai 1.204.095 jiwa dengan *sex ratio* sebesar 105,81%, sedangkan pada tahun 2011 jumlah penduduk Kabupaten Lebak berjumlah 1.282.858 jiwa dengan *sex ratio* sebesar 107,09%. Pada tahun 2012 jumlah penduduk menjadi 1.235.237 jiwa dengan *sex ratio* sebesar 109,15%. Dari data tersebut jumlah penduduk mengalami kenaikan rata-rata dalam tiga tahun terakhir sebesar 15.571 jiwa. Mencermati perkembangan jumlah penduduk dalam sebelas tahun terakhir, dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 1,34%, jumlah penduduk pada tahun 2013 diperkirakan berjumlah 1.251.789 jiwa dan akan mencapai 1.268.563 jiwa pada tahun 2014.

Grafik 2.4
Distribusi Jumlah Penduduk Kabupaten Lebak Dirinci Menurut Kecamatan Tahun 2012



Sumber : Bappeda Kabupaten Lebak Tahun 2012

Grafik 2.4 di atas menunjukkan distribusi jumlah penduduk per kecamatan tahun 2012, distribusi penduduk Kabupaten Lebak masih belum merata. Kecamatan Rangkasbitung masih menjadi tujuan utama penduduk untuk tinggal dan berusaha (10,12%), berikutnya Kecamatan Malingping (5,19%), Kecamatan Cimarga (5,10%), Kecamatan Cibadak (4,96%) dari total penduduk kabupaten. Gambaran ini menunjukkan adanya daya tarik yang lebih kuat di pusat-pusat wilayah pertumbuhan, khususnya di bagian utara dan selatan kabupaten.

Sedangkan jika dilihat dari kepadatan penduduk, Kecamatan Rangkasbitung memiliki kepadatan penduduk jauh lebih besar dibanding kecamatan lain, secara terperinci dapat dilihat pada table 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Kepadatan Penduduk Kabupaten Lebak
Dirinci Menurut Kecamatan (jiwa/Km²) Tahun 2009-2012

No	Kecamatan	2010 *)	2011 **)	2012 **)	2013 ***)
1	Malingping	667	682	695	704
2	Wanasalam	382	389	391	396
3	Panggarangan	294	215	209	212
4	Cihara	196	220	188	190
5	Bayah	265	278	275	278
6	Cilograng	296	318	281	285
7	Cibeber	142	145	133	135
8	Cijaku	294	313	303	307
9	Cigemblong	335	375	321	326
10	Banjarsari	395	418	414	419
11	Cileles	374	427	398	403
12	Gunungkencana	224	266	231	234
13	Bojongmanik	295	311	295	299
14	Cirinten	319	359	300	304
15	Leuwidamar	343	364	369	374
16	Muncang	372	396	392	397
17	Sobang	265	287	251	254
18	Cipanas	516	572	551	558
19	Lebakgedong	430	410	363	367
20	Sajira	418	457	447	452
21	Cimarga	332	349	344	348
22	Cikulur	706	761	721	730
23	Warunggunung	1.056	1.103	1,106	1,120
24	Cibadak	1.404	1.455	1,483	1,502
25	Rangkasbitung	2.339	2.488	2,508	2,541
26	Kalanganyar	1.251	1.287	1,268	1,285
27	Maja	844	902	862	874
28	Curugbitung	414	444	422	428
JUMLAH		395	421	406	411

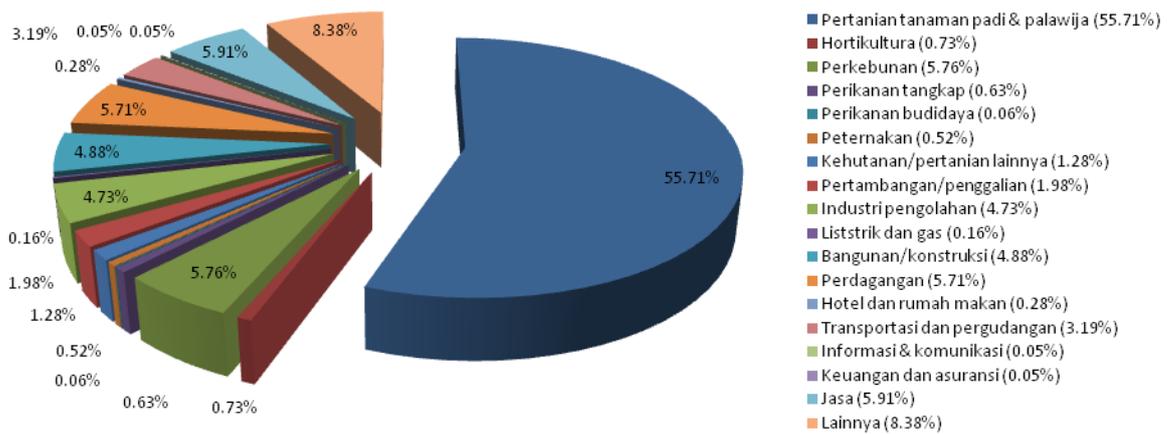
Sumber : *) BPS Kab. Lebak, Hasil Sensus Penduduk 2010

**) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2012

***) Jumlah perkiraan penduduk

Kabupaten Lebak merupakan wilayah dengan dominasi aktivitas pertanian, bukan hanya karena banyak terdapat lahan pertanian (50% dari total luas wilayah) namun juga didukung oleh komposisi penduduk yang mayoritas bekerja di sektor pertanian. Terbukti bahwa hingga tahun 2010, penduduk yang bekerja di sektor ini mencapai 53,68%. Sementara sektor perdagangan, hotel, dan restoran dijadikan tumpuan harapan hidup oleh 76.376 penduduk (16,08% dari total tenaga kerja) sebagaimana terlihat pada grafik 2.5 berikut ini :

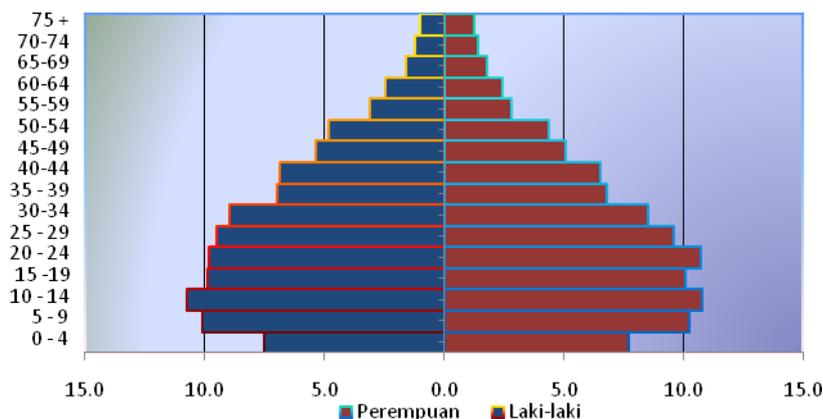
Grafik 2.5
Penduduk Usia 10 Tahun Ke atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2012 (Maret 2012)



Sumber: Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial.(PPS) Maret 2012

Data jumlah penduduk 2012 jika dibuat piramida penduduk sebagaimana terlihat pada grafik 2.6, maka akan terlihat struktur usia penduduk Kabupaten Lebak didominasi oleh penduduk usia produktif yakni usia 15 – 64 tahun sebanyak 831.529 jiwa atau 67,32%, usia non produktif yakni usia 0 – 14 tahun dan usia diatas 65 tahun masing-masing sebesar 352.370 jiwa (28,53%) dan 51.338 (4,16%).

Grafik 2.6
Piramida Penduduk Kabupaten Lebak Tahun 2012



Sumber : Bappeda Kabupaten Lebak Tahun 2012

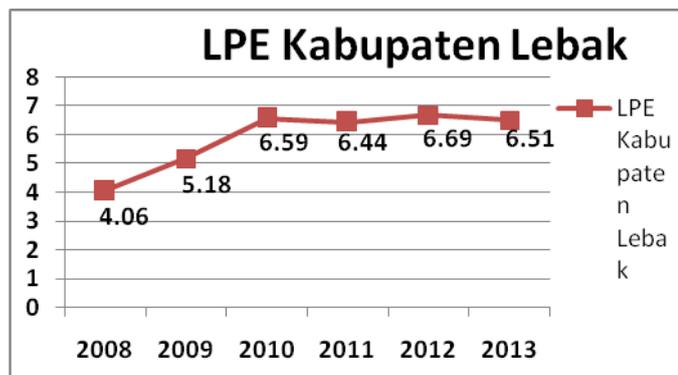
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Indikator tingkat kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dapat diukur diantaranya melalui capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi, Produk Domestik Regional Brutto (PDRB), PDRB per kapita, Laju Inflasi, dan Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan.

Grafik 2.7 di samping, menunjukkan Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Lebak selama 2008-2012. LPE Kabupaten Lebak dari tahun 2008 - 2011 rata-rata di atas 4%. Pada tahun 2012 mencapai pertumbuhan sebesar 6,69% dan target di tahun 2013 akan mencapai 6,51%.

Grafik 2.7
Perkembangan LPE Kabupaten Lebak
Tahun 2008 – 2012 dan Target tahun 2013

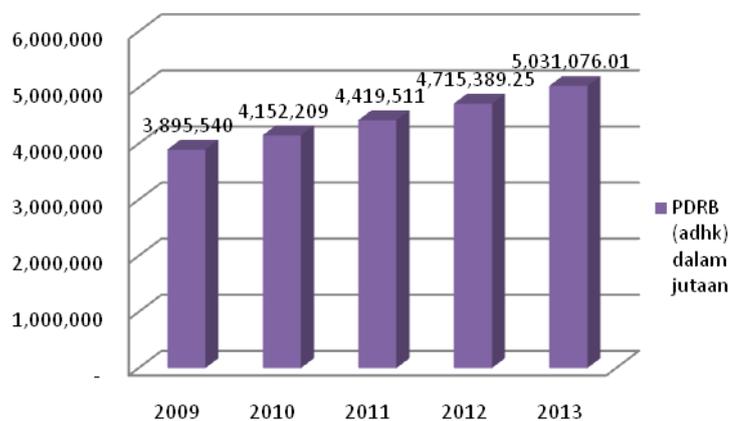


Sumber: BPS Kab. Lebak Tahun 2012

Guna mewujudkan harapan tersebut, keberhasilan percepatan pembangunan yang digulirkan pemerintah daerah harus senantiasa ditingkatkan, terutama untuk sektor-sektor yang memberikan kontribusi dominan terhadap PDRB Kabupaten Lebak.

Melihat kecenderungan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lebak dalam tiga tahun terakhir, diperkirakan PDRB Kabupaten Lebak pada tahun 2013 akan mencapai 5,031 Triliun Rupiah lebih. Perekonomian Kabupaten Lebak juga diperkirakan tidak lagi bergantung pada sektor primer karena sektor perdagangan, hotel dan

Grafik 2.8
Perkembangan PDRB Kabupaten Lebak
Atas Dasar Harga Konstan 2000
Tahun 2009-2012 dan target 2013

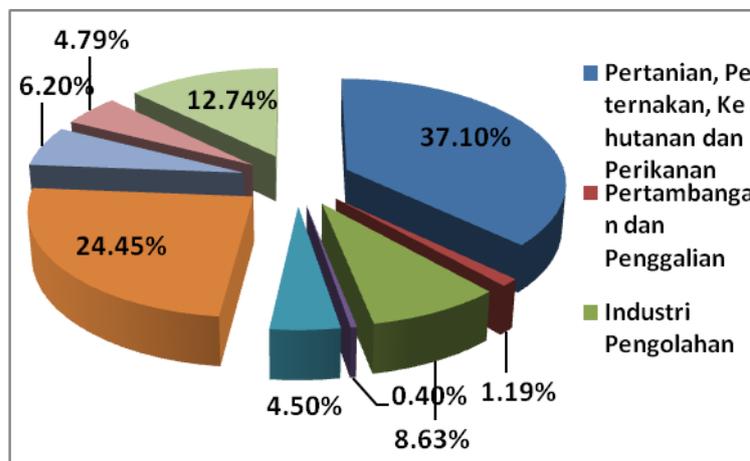


Sumber : BPS Kab. Lebak Tahun 2012

restoran, serta sektor jasa akan tumbuh pesat. Iklim usaha yang kian kondusif dan ditunjang oleh kondisi ekonomi makro yang terus membaik akan menjadi katalisator bagi tumbuh dan berkembangnya sektor riil di masyarakat sehingga mampu berkontribusi secara nyata terhadap nilai total PDRB kabupaten.

Sebagai daerah agraris, perekonomian Kabupaten Lebak masih didominasi oleh sektor pertanian. Data tahun 2011 menunjukkan kontribusi sektor pertanian terhadap nilai total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai 37,10% disusul oleh sektor perdagangan, hotel, dan restoran dengan kontribusi sebesar 24,45%. Sementara sektor pertambangan dan penggalan, serta sektor listrik, gas, dan air bersih hanya menyumbang 0,40% terhadap total PDRB Kabupaten Lebak.

Grafik 2.9
Distribusi PDRB Kabupaten Lebak Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2011*



Sumber : BPS Kab. Lebak Tahun 2011 (* angka sementara)

Kondisi ini cukup beralasan mengingat ketersediaan lahan pertanian dan dukungan tenaga kerja yang berlimpah membuat nilai tambah produk-produk pertanian (terutama tanaman bahan makanan) berkontribusi besar terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Lebak, karena secara akumulatif jumlah produk-produk pertanian yang dihasilkan relatif besar meskipun secara umum nilai tambah per-unit untuk produk-produk pertanian cenderung lebih kecil dibanding nilai tambah produk di sektor lain, seperti perdagangan, pertambangan, industri, maupun jasa.

Tabel 2.2
PDRB Kabupaten Lebak Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2009-2012

(juta rupiah)

No.	Lapangan Usaha	2009	2010	2011	2012*
1	Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	1,464,061.43	1,568,877.39	1,639,817.51	1,701,217.86
2	Pertambangan dan Penggalan	47,607.30	50,201.27	52,557.37	56,990.77
3	Industri Pengolahan	360,130.70	367,914.86	381,613.60	413,804.08
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	15,720.93	16,478.29	17,627.31	19,114.24
5	Bangunan dan Kontruksi	169,478.99	183,090.99	198,714.13	215,476.38
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	899,393.51	982,061.55	1,080,406.75	1,171,542.96
7	Pengangkutan dan Komunikasi	240,237.64	255,957.30	274,177.39	297,305.24
8	Keuangan, Persewaan dan jasa Perusahaan	186,391.85	197,627.99	211,740.14	229,601.18
9	Jasa-jasa	512,518.55	529,999.66	562,857.47	610,336.53
Jumlah		3,895,540.90	4,152,209.30	4,419,511.67	4,715,389.25

Sumber : BPS Kab. Lebak 2012

* : Angka sementara

Fokus Kesejahteraan Sosial

Pembangunan daerah bidang kesejahteraan sosial terkait dengan upaya meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Kabupaten Lebak yang tercermin pada angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, angka kelangsungan hidup bayi, angka usia harapan hidup, persentase penduduk yang memiliki lahan, dan rasio penduduk yang bekerja.

Angka Melek Huruf (AMH), yang menggambarkan proporsi penduduk usia 15 Tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis (latin atau huruf lainnya), juga mengalami peningkatan, meskipun sangat kecil, yaitu dari 94,10% pada tahun 2009 menjadi 95,85% pada tahun 2010, tahun 2011 tidak mengalami peningkatan, sedangkan tahun 2012 mencapai 97,76%. (Tabel 2.3).

Sementara untuk nilai Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang menggambarkan lamanya penduduk usia 15 Tahun ke atas yang bersekolah (dalam tahun), mencapai 6,3 tahun pada tahun 2012. Jika dikonversikan pada tingkat kelulusan, maka rata-rata tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Lebak adalah tidak tamat SLTP atau baru mencapai kelas 1 SLTP. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan pencapaian RLS maksimal 15 Tahun, masih memerlukan rentang waktu yang cukup lama dan biaya yang besar.

Tabel 2.3
Perkembangan Angka Melek Huruf
dan Rata-Rata lama Sekolah Kabupaten Lebak
Tahun 2008-2012

NO	URAIAN	2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas	514.097	777.532	791.240	911.201	882,867
2	Angka melek huruf/AMH (%)	94,10	94,14	95,85	95,85	97,76
3	Rata-rata Lama Sekolah/RLS (tahun)	6,2	6,2	6,3	6,3	6,3

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak 2011

Indeks Harapan Hidup mempresentasikan derajat kesehatan masyarakat suatu wilayah pada periode waktu tertentu, yang diukur melalui Usia Harapan Hidup (UHH) waktu lahir. Pada tahun 2009, UHH Kabupaten Lebak mencapai angka 63,20 tahun, tahun 2010 menjadi 63,58 tahun, pada tahun 2011 menjadi 63,60 tahun, sedangkan di tahun 2012 sebesar 63,35 tahun, pada tahun 2013 ditargetkan sebesar 63,78 tahun. Berdasarkan angka tersebut dapat dihitung Indeks Harapan Hidup Kabupaten Lebak pada tahun 2009 sebesar

0.63, tahun 2010 sebesar 0.64 dan pada tahun 2011 sebesar 0.63

Indeks Daya Beli Masyarakat yang merupakan komponen utama IPM, mengalami peningkatan sebesar 0,45 poin, yaitu dari 61,82 pada tahun 2009 menjadi 62,27 pada tahun 2010. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran riil perkapita masyarakat Lebak mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Berdasarkan data BPS 2010 pengeluaran riil tahun 2009 sebesar Rp. 627.490, dan tahun 2010 sebesar Rp. 629.440,-. Mengalami kenaikan sebesar 0,31 %. Peningkatan ini mengindikasikan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

a. Fokus Layanan Urusan Wajib

1). Pendidikan

Upaya untuk mencapai sasaran urusan pendidikan, selain dilaksanakan melalui program pendidikan formal dilakukan juga melalui program pendidikan non formal, antara lain penyelenggaraan program paket A, paket B dan program paket C. Upaya lainnya adalah peningkatan minat baca masyarakat dilakukan melalui penyelenggaraan taman bacaan masyarakat, penyelenggaraan keaksaraan fungsional dan penyelenggaraan kelompok belajar masyarakat.

Perkembangan pembangunan bidang pendidikan dapat dilihat dari beberapa indikator, diantaranya perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) dari dari semua jenjang pendidikan. APK adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu.

APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Cara menghitung APK dengan membagi jumlah penduduk yang sedang bersekolah (atau jumlah siswa), tanpa memperhitungkan umur, pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tersebut.

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah perbandingan penduduk usia antara 7 hingga 18 tahun yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Seperti APK, APM juga merupakan indikator daya

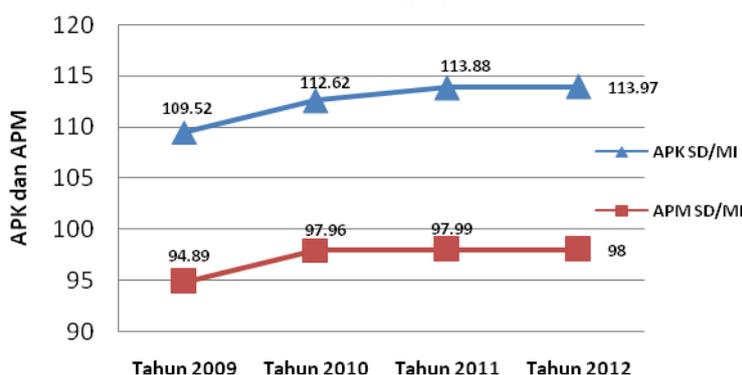
serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Tetapi, jika dibandingkan APK, APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.

APM di suatu jenjang pendidikan didapat dengan membagi jumlah siswa atau penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang sekolah tersebut.

Grafik 2.11-2.13 berikut ini adalah data perkembangan APK/APM berdasarkan jenjang Pendidikan dari tahun 2009 sampai dengan 2012 :

Dari tahun 2009 hingga tahun 2012 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI terus mengalami peningkatan, rata-rata meningkat sebesar 1.48%. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI juga terus mengalami peningkatan dengan rata-rata sebesar 1.04%.

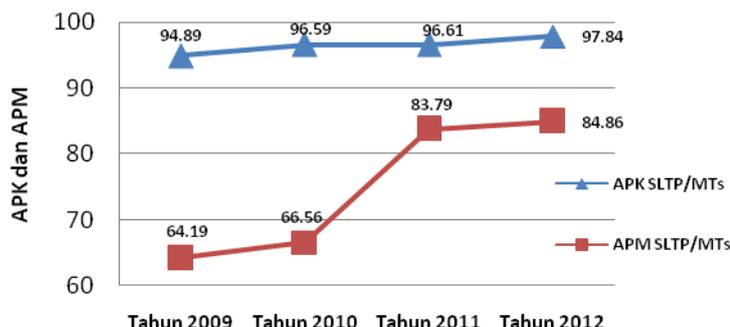
Grafik 2.11
Perkembangan APK dan APM SD/MI Kabupaten Lebak Tahun 2009-2012



Sumber data: Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak 2013

Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk jenjang SMP/MTs dari tahun 2009 hingga tahun 2012 terus meningkat dengan peningkatan rata-rata sebesar 0.98%. Peningkatan tertinggi terjadi antara tahun 2009-2010, sebesar 1,7%. Sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs dari tahun 2009 hingga tahun 2012, mengalami peningkatan rata-rata sebesar 6.89%.

Grafik 2.12
Perkembangan APK dan APM SLTP/MTs Kabupaten Lebak Tahun 2009 - 2012

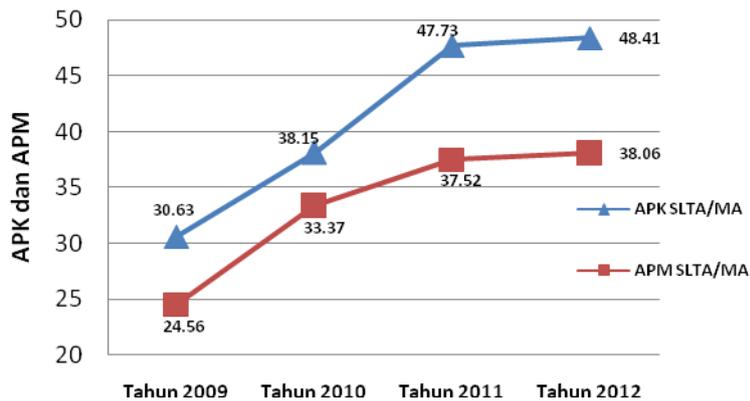


Sumber data: Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak 2013

Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk jenjang SMA/MA dari tahun 2009 hingga tahun 2012 terus meningkat dengan peningkatan rata-rata sebesar 5.93%. Peningkatan tertinggi

terjadi antara tahun 2010-2011, sebesar 9.58%. Sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA mengalami peningkatan rata-rata sebesar 4.50%. Peningkatan tertinggi terjadi antara tahun 2009-2010, sebesar 8.81%.

Grafik 2.13
Perkembangan APK dan APM SMA/MA Kabupaten Lebak Tahun 2009 - 2012

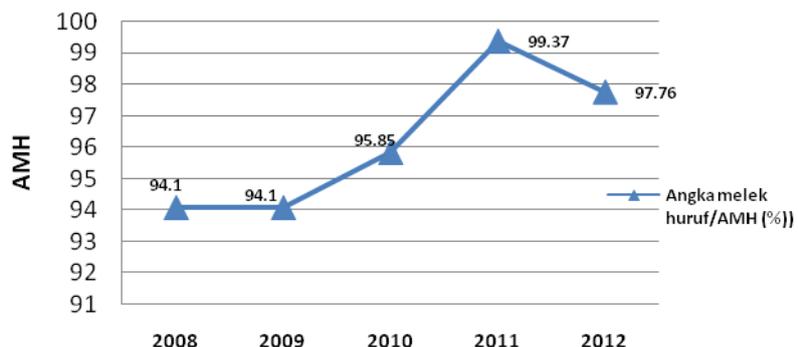


Sumber data: Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak 2013

Angka Melek Huruf (AMH) di Kabupaten Lebak dari tahun 2009 hingga tahun 2012 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 1,22%, sebagaimana terlihat pada grafik 2.14:

Capaian AMH tahun 2012 sebesar 97,76% menunjukkan bahwa hanya 2,24% penduduk Kabupaten Lebak yang belum bisa baca tulis huruf latin atau lainnya. Termasuk di dalamnya adalah masyarakat adat Baduy.

Grafik 2.14
Perkembangan Angka Melek Huruf (AMH) Kabupaten Lebak Tahun 2008 - 2012



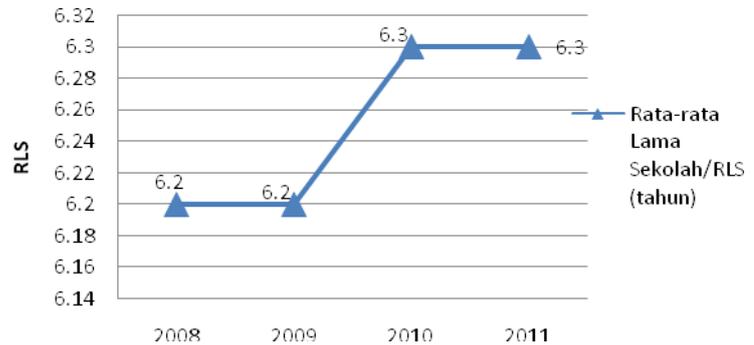
Sumber data: Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak 2012

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk Kabupaten Lebak secara berangsur-angsur terus meningkat setiap tahun. Kenaikan RLS pada tahun 2011 sebesar 0,4 tahun, angka ini empat kali lipat lebih besar dibandingkan peningkatan pada tahun 2010 yang hanya 0,1 tahun. Walaupun demikian angka RLS Kabupaten Lebak masih berada di bawah RLS Provinsi Banten tahun 2010 sebesar 8,32 tahun.

Untuk mendorong peningkatan RLS Kabupaten Lebak, pemerintah perlu melakukan intervensi melalui berbagai pendekatan. Diantaranya pendekatan secara fisik dalam bentuk meningkatkan daya tampung satuan pendidikan. Pendekatan secara sosio kultural dengan

melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama maupun aparat pemerintahan di berbagai tingkatan untuk mendorong masyarakat agar menyekolahkan anaknya. Di samping itu juga perlu dilakukan pendekatan secara ekonomi berupa bantuan biaya pendidikan bagi anggota masyarakat yang tidak mampu.

Grafik 2.15
Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
Kabupaten Lebak Tahun 2008 – 2011



Sumber data: Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak 2012

Tingkat kelulusan siswa jenjang SD Kabupaten Lebak tahun 2011 sebesar 99,42%. Untuk jenjang SMP mencapai 99,91%, angka ini lebih tinggi dari tingkat kelulusan jenjang SMP Provinsi Banten sebesar 99,89%. Untuk jenjang SMA mencapai 99,65% dan SMK 99,79% sedangkan Provinsi Banten sebesar 99,62%.

2). Kesehatan

Derajat kesehatan masyarakat suatu wilayah pada periode waktu tertentu dapat diukur melalui Usia Harapan Hidup waktu lahir (UHH), Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).

Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi di Kabupaten Lebak dari tahun 2009 hingga tahun 2012 terus mengalami penurunan. Dari tahun 2009 ke tahun 2010 AKI menurun sebesar 20.3%, dari tahun 2010 ke tahun 2011 menurun sebesar 0.37% dan dari tahun 2011 ke tahun 2012 menurun sebesar 2.41%, sehingga penurunan rata-rata sebesar 7.69%.

Sedangkan AKB dari tahun 2009 ke tahun 2010 menurun sebesar 2.0, dari tahun 2010 ke tahun 2011 menurun sebesar 2.1.

Tabel 2.4
Jumlah Kondisi Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Lebak
Tahun 2009-2012

NO	Kejadian	Tahun			
		2009	2010	2011	2012
1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	34,67	32.67	30.57	28.16
2	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup	217,60	197.33	196.96	172.09
3	Angka Harapan Hidup (AHH)	63,20	63.58	63.6	63,73*

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kab. Lebak, 2013, (*) angka sementara.

Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Lebak dari tahun 2009 hingga tahun 2012 terus mengalami peningkatan. Dari tahun 2009 hingga tahun 2011 meningkat sebesar 0.4 tahun. Dari tahun 2010 hingga tahun 2011 meningkat sebesar 0.02 tahun dan dari tahun 2011 hingga tahun 2012 meningkat sebesar 0,13 tahun (angka sementara).

3). Lingkungan Hidup

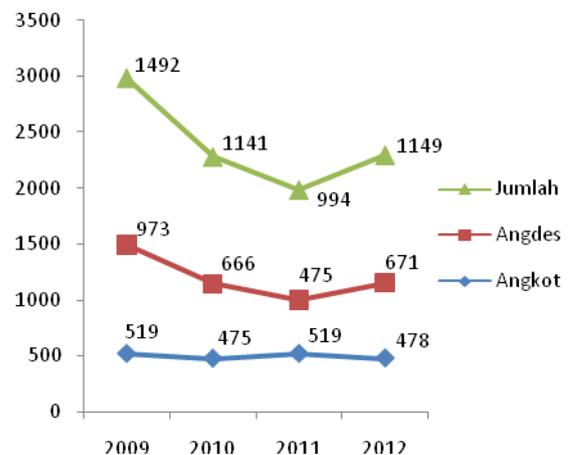
Prinsip pembangunan berkelanjutan mengandung tiga pilar, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Ketiga pilar tersebut senantiasa perlu ada keseimbangan antara satu dengan yang lainnya, namun dalam kenyataannya salah satu pilar yang sering kurang diperhatikan adalah masalah lingkungan hidup. Hal ini terbukti bahwa telah terjadi penurunan kualitas, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup baik secara lokal maupun global diantaranya terjadinya banjir, longsor, kekeringan, pemanasan global dan fenomena alam lainnya yang dirasakan akhir-akhir ini sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.

Untuk meningkatkan konservasi sumber daya alam dan mengendalikan kerusakan lingkungan hidup perlunya pengembangan pemanfaatan data dan informasi melalui program Menuju Indonesia Hijau (MIH) setiap tahunnya sebagai instrument untuk pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

4). Perhubungan

Pembangunan sektor perhubungan Kabupaten Lebak tahun 2012 difokuskan pada pelayanan masyarakat di bidang fasilitas perhubungan berupa pembangunan dan pemeliharaan terminal angkutan umum dan pelayanan ijin trayek angkutan umum. Jumlah ijin trayek angkutan umum dari tahun 2009 hingga tahun 2012 mengalami penurunan. Ijin trayek Angkutan perkotaan rata-rata mengalami penurunan 1.97%, angkutan perdesaan 7.75% sehingga rata-rata jumlah penurunan seluruh ijin trayek angkutan umum sebanyak 5.85%

Grafik 2.16
Perkembangan Jumlah Ijin Trayek Angkutan Umum
Tahun 2009-2012



Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Lebak 2012

Jumlah terminal di Kabupaten Lebak dari tahun 2009 hingga tahun 2012 sebanyak 6 terminal, terdiri dari 1 terminal tipe B berada di Kecamatan Cibadak dan 5 terminal tipe C berada di Kecamatan Rangkasbitung, Kalanganyar, Malingping, Bayah dan Wanasalam.

5). Perumahan

Selama kurun waktu 2008 - 2012, penanganan perumahan difokuskan pada upaya untuk membantu penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, peningkatan kualitas lingkungan perumahan oleh masyarakat, serta pengembangan kawasan permukiman baru yang lebih tertata.

Selama kurun waktu tersebut telah dilakukan fasilitasi pembangunan rumah swadaya dan pembangunan sarana, prasarana dan utilitas bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebanyak 4719 unit rumah.

Namun demikian, percepatan pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah perlu segera dilakukan dengan pelibatan masyarakat serta dunia usaha dalam pengembangan perumahan di Kabupaten Lebak perlu terus ditingkatkan. Di samping itu, implementasi pengembangan kasiba/lisiba di daerah masih cukup rendah sehingga upaya-upaya untuk mendorong percepatan pengembangan kasiba/lisiba sangat diperlukan.

6). Penataan Ruang

Penyelenggaraan penataan ruang yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang dilaksanakan bersama-sama antara Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Seperti yang diamanatkan dalam undang-undang No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang bahwa proporsi Ruang Terbuka Hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 % dari luas wilayah kota yang meliputi 20 % ruang terbuka hijau publik dan 10 % ruang terbuka hijau privat, di wilayah Ibu Kota Kabupaten Lebak pada tahun 2009 untuk proporsi ruang terbuka hijau publik sebesar 43,62 % dan untuk ruang terbuka hijau privat sebesar 34,17 %.

Dari kondisi ini dapat disimpulkan bahwa ruang terbuka hijau di Wilayah perkotaan Ibu Kota Kabupaten Lebak masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait walaupun sebaran dan penataanya perlu dijaga dan ditingkatkan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Lebak dan Rencana Umum Tata Ruang Ibu Kota Kabupaten Lebak.

Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan fungsi lingkungan, pada tahun 2011 telah menetapkan Peraturan Daerah tentang Ruang Terbuka Hijau Wilayah Perkotaan Ibu Kota Kabupaten Lebak yang selain berfungsi sebagai paru-paru kota RTH juga berfungsi sebagai ekologis, arsitektural dan sosial.

7). Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Membangun masyarakat dan desa salah satunya melalui pemberdayaan masyarakat dan desa. Pemberdayaan masyarakat dan desa dilaksanakan melalui pengembangan kemampuan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat dan pengorganisasian masyarakat. Program dan kegiatan yang dilaksanakan diarahkan kepada upaya dan fasilitasi serta pemberdayaan masyarakat khususnya bagi keluarga Pra Sejahtera melalui peningkatan ketahanan keluarga, pemberdayaan ekonomi masyarakat perdesaan, penguatan peran serta lembaga kemasyarakatan, dan pemerintahan desa.

Kinerja Pembangunan aspek pemerintahan dan pembangunan desa, menunjukan bahwa pada tahun 2008 telah dibentuk dan ditetapkan 25 desa baru sebagai desa pemekaran, sehingga pada tahun 2009 wilayah kabupaten lebak terbagi atas 28 kecamatan dan 340 desa dan 5 kelurahan. Dalam rangka menunjang kinerja dan pelayanan kepada masyarakat maka pada tahun 2009 telah dilaksanakan penguatan kapasitas aparatur pemerintahan desa melalui diklat yang diikuti seluruh kepala desa.

Gerakan PKK yang merupakan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dalam memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui keluarga. Jumlah kelompok binaan PKK di Kabupaten Lebak sebanyak 28 setiap tahunnya dengan jumlah anggota PKK sebanyak 630 orang pada tahun 2011.

Pelayanan pemberdayaan masyarakat dan desa juga dapat ditinjau dari jumlah organisasi non pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berjumlah 51 LSM dan Organisasi Masyarakat sebanyak 87 pada tahun 2011. Tingginya animo masyarakat untuk membentuk organisasi kemasyarakatan menunjukan tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

8). Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Pelayanan terhadap penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat dilaksanakan pemerintah bersama masyarakat melalui penyediaan polisi pamong praja, linmas dan pos siskamling. Jumlah anggota satuan linmas pada tahun 2010 sebanyak 3.937 org, sedangkan pada tahun 2011 adalah 4.609 org atau meningkat sebanyak 672 org.

Penyelenggaraan pembangunan Bidang Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat selama periode 2007-2009 difokuskan pada terwujudnya kesadaran masyarakat untuk menjaga keamanan masyarakat lingkungan masing-masing dan terwujudnya perlindungan masyarakat dari bencana. Pelanggaran peraturan daerah oleh masyarakat terus mengalami fluktuasi, yaitu dari 41 kasus pengaduan pelanggaran pada tahun 2007 menjadi 78 kasus pada tahun 2008, dan 42 kasus pada tahun 2009. Kondisi ini dapat dimaknai bahwa kesadaran hukum masyarakat terhadap peraturan perda masih kurang, hal ini disebabkan belum efektifnya sosialisasi peraturan daerah, sejak proses legislasi, sosialisasi hingga penerapannya.

Capaian kinerja Bidang Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat selama periode 2007-2009 adalah sebagai berikut :

1. Perkembangan jumlah anggota perlindungan masyarakat (Linmas);
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat mentaati peraturan daerah;
3. Terkendalinya dan terdeteksinya secara dini gangguan ketertiban dan ketentraman masyarakat;
4. Terdapatnya informasi/data obyektif mengenai prediksi gangguan ketertiban dan ketentraman masyarakat pada akhir 2008, serta langkah-langkah penanggulangannya.

Selama tahun 2011, penyakit masyarakat (Pekat) yang paling menonjol adalah wanita rawan sosial ekonomi yang mencapai 39.825 kasus, diikuti eks napi sebanyak 1.021 kasus, anak jalanan sebanyak 96 kasus dan eks narkoba sebanyak 592 kasus. Penyalahgunaan narkoba, terus mengalami kenaikan dari 122 kasus eks narkoba pada tahun 2007 menjadi 592 kasus pada tahun 2011. Hal ini merupakan ancaman laten yang memerlukan penanganan berkesinambungan serta terintegrasikan antara aparat ketentraman daerah, yang bekerja sama dengan perangkat satuan polisi pamong praja, aparat perlindungan masyarakat (LINMAS) serta lingkungan keluarga masing-masing.

Tindak pidana kriminal yang paling dominan pada kurun waktu 2008-2011 adalah pencurian dengan pemberatan, diikuti oleh pencurian kendaraan bermotor serta penipuan. Tindak pidana kriminal jika dibandingkan dengan tahun 2010, pada tahun 2011 mengalami penurunan. Untuk kasus pencurian dengan pemberatan dari 70 kasus pada tahun 2010 menjadi 50 kasus pada tahun 2011, pencurian kendaraan bermotor dari 60 kasus pada tahun 2010 menjadi 47 kasus pada tahun 2011, serta penipuan dari 57 kasus pada tahun 2010 menjadi 35 kasus pada tahun 2011.

Kondisi ini tidak lepas dari kondisi perekonomian masyarakat yang mengalami fluktuasi sehingga menimbulkan peningkatan pengangguran, yang mendorong tumbuhnya tindak

pidana. Walaupun demikian secara umum penanganan tindak pidana kriminalitas di Kabupaten Lebak masih dalam konstelasi terkendali oleh aparat penegak hukum kepolisian daerah dibantu oleh masyarakat.

Dalam rangka menciptakan dan memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan peraturan, fungsi pengawasan dan mekanisme kontrol dilaksanakan oleh lembaga penegak perda terutama Satuan Polisi Pamong Praja yang disiagakan di kabupaten dan kecamatan. Aparat Satuan Polisi Pamong Praja hingga akhir tahun 2011 berjumlah 64 orang, sebagian besar bertugas di kabupaten. Jumlah tersebut dirasakan masih kurang mengingat kompleksnya tugas dan fungsi yang diemban.

9). Pemuda dan Olah Raga

Pembangunan pemuda sebagai salah satu unsur sumber daya manusia dan tulang punggung serta penerus cita-cita bangsa, terus disiapkan dan dikembangkan kualitas kehidupannya melalui peningkatan aspek pendidikan, kesejahteraan hidup dan tingkat kesehatan. Jumlah pemuda (usia 15-34 tahun) di Kabupaten Lebak pada tahun 2010 sebanyak 418.577 jiwa atau 34.76% dari jumlah penduduk sebanyak 1.204.095 jiwa.

Untuk memwadahi aktivitas dan kreativitas generasi muda yang lebih berkualitas dan mandiri, terdapat berbagai wahana baik yang dikembangkan oleh pemerintah, maupun atas inisiasi masyarakat seperti melalui berbagai organisasi kepemudaan. Sementara itu untuk mendukung aktivitas olahraga masyarakat, Pemerintah Daerah telah menyediakan berbagai sarana olahraga, diantaranya kawasan *Sport Center*, kawasan alun-alun Rangkasbitung dan GOR Karta Natanegara. Pemerintah Kabupaten Lebak juga terus melakukan pembinaan terhadap organisasi/klub olahraga sebanyak 32 cabang induk olahraga dan 600 orang atlet.

10). Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Lembaga Keuangan

Di Kabupaten Lebak terdapat 786 unit koperasi dan yang aktif sebanyak 618 unit pada tahun 2010 dan 645 pada tahun 2011 atau meningkat sebanyak 27 koperasi. Kegiatan industri yang dikelola oleh Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yaitu CV, Firma, PT/NV, PO Berijin dan PO tidak berijin pada tahun 2010 sebanyak 14.813 unit dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 97.703 jiwa. Pada tahun 2011 menjadi 14.999 perusahaan atau meningkat sebanyak 186. Sementara sektor industri menengah kenaikannya hanya satu, yaitu dari 20 pada tahun 2010 menjadi 21 perusahaan pada tahun 2011.

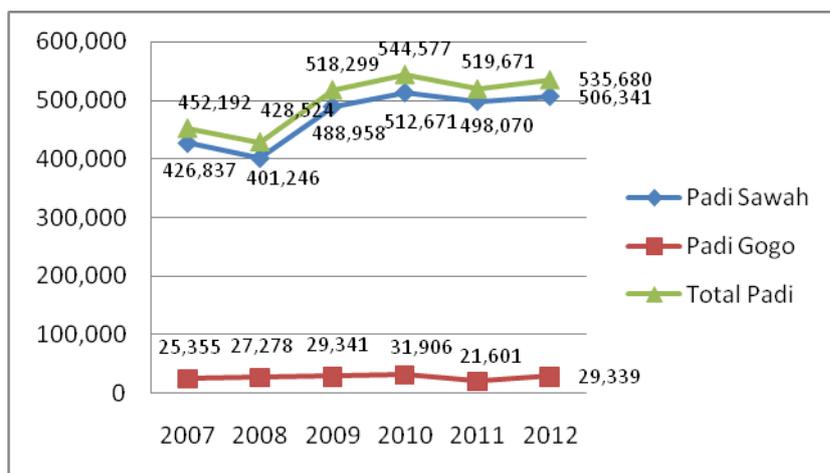
b. Fokus Layanan Urusan Pilihan

1). Pertanian

Produksi padi, sebagai salah satu komoditas unggulan tanaman pangan, mengalami peningkatan dari 519.671 ton pada tahun 2011 menjadi 535.680 ton pada tahun 2012 atau meningkat sebesar 3,08 %.

Produksi padi tersebut sebagian besar diperoleh dari lahan sawah dan sisanya berasal dari lahan kering (padi gogo) yang masing-masing mencapai 506.341 ton dan 29.339 ton pada tahun 2012. Capaian tersebut berasal dari lahan sawah seluas 47.646Ha.

Grafik 2.17
Perkembangan Produksi Padi di Kabupaten Lebak Tahun 2007-2012



Sumber: Dinas Pertanian Kab. Lebak tahun 2012

Lahan sawah tersebut mencakup irigasi teknis sebesar 13% atau, beririgasi setengah teknis sebesar 6%, irigasi sederhana sebesar 9%, irigasi desa/non-PU 22%, dan tadah hujan 49%.

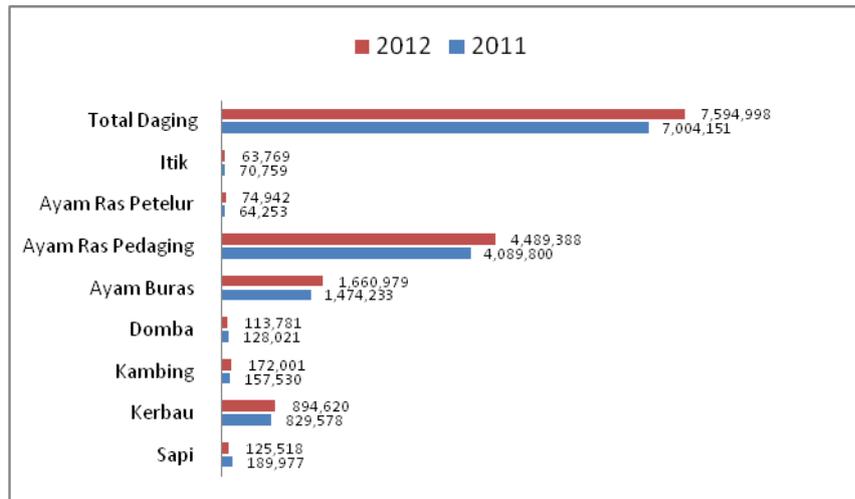
Komoditas unggulan tanaman pangan lainnya adalah jagung, Kacang kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar. Dari seluruh seluruh komoditas unggulan tersebut, ubi kayu memiliki produksi terbesar yaitu 12.634 ton, disusul oleh ubi jalar dan kedelaimasing-masing sebesar 3.878 ton dan 1.668 ton. Sedangkan untuk buah-buahan produksi terbesar secara berturut-turut oleh komoditas pisang, manggis, durian dan rambutan.

2). Peternakan

Komoditas unggulan di sektor peternakan adalah sapi potong, kerbau, domba, kambing, ayam buras, ayam ras pedaging, ayam ras petelur dan itik. Dari komoditas tersebut produksi daging pada tahun 2011 mencapai 7.594.998 Kg. Kontribusi terbesar berasal dari ayam ras pedaging dan ayam buras, masing-masing sebesar 4.489.388 Kg dan 1.660.975 kg.

Kontribusi dari komoditas lainnya di tahun 2012, kerbau sebesar 894.620 Kg, sapi sebesar 125.518 Kg, kambing sebesar 172.001 Kg, domba sebesar 113.781 Kg, itik sebesar 63.769 Kg, dan ayam ras petelur sebesar 74.942 Kg. Secara umum pada tahun 2012 semua jenis ternak mengalami peningkatan produksi, kecuali Sapi potong, domba dan itik.

Grafik 2.17
Perkembangan Produksi Daging di Kabupaten Lebak Tahun 2011-2012



Sumber: Dinas Peternakan Kab. Lebak tahun 2012

3). Kehutanan

Produksi kayu Kabupaten Lebak menunjukkan tingkat produksi yang dinamis. Diantara jenis kayu yang ada, produksi tertinggi pada kayu sengon. Tingkat produksi yang tinggi tersebut disebabkan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan lahan yang tersedia. selain kayu dalam bidang kehutanan juga menghasilkan Madu Lebah dan Jamur.

4). Perkebunan

Dari sekitar 15 jenis komoditas perkebunan yang diusahakan, enam komoditas diantaranya menjadi unggulan Kabupaten Lebak yaitu, Kelapa Dalam, Karet, Kakao, Aren Cengkeh, Kopi Robusta. Data tahun 2012 menunjukkan bahwa produksi tertinggi dari ke 6 jenis komoditas tersebut adalah Kelapa Dalam yakni sebanyak 10.668,50 Ton, berikutnya adalah Karet sebanyak 6.225,66 Ton. Volume produksi komoditas lainnya yakni Kakao sebanyak 2.297,15 Ton, Aren sebanyak 1.254,19 Ton, Cengkeh sebanyak 582 Ton dan Kopi Robusta sebanyak 500,12 Ton. Secara umum produksi hasil perkebunan meningkat dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2011 produksi perkebunan mencapai 21.707,40 Ton meningkat menjadi 22.080,06 Ton pada tahun 2012. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.5 berikut ini:

Tabel 2.5
Data Luas Areal, Produksi dan Produktivitas Hasil Perkebunan
Kabupaten Lebak Tahun 2012

No	Komoditi	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton/Ha)	Produktivitas (%)	Harga (Rp.)	Wujud Produksi
1	Karet	14,769.32	6,255.66	0.46	22,500	Karet Kering
2	Kelapa Dalam	23,136.26	10,668.50	0.90	5,500	Kopra
3	Kelapa Hibrida	231.10	38.18	0.25	4,500	Kopra
4	Kelapa Sawit	3,922.00	90.00	0.01	350	CPO
5	Kopi Robusta	1,973.95	500.12	0.31	14,000	Biji Kering
6	Kakao	3,572.95	2,297.15	1.45	21,000	Biji Kering
7	T e h	45.40	5.06	0.21	1,100	Teh Kering
8	Cengkeh	6,201.59	582.00	0.11	70,000	Bunga Kering
9	Lada	453.95	30.35	0.11	43,000	Lada Kering
10	Jambu Mete	3.00	1.00	0.48	15,000	Gelondong Kering
11	Kapok	188.85	40.45	0.29	22,000	Serat Berbiji
12	Panili	59.40	3.50	0.08	50,000	Buah Kering
13	Aren	2,300.20	1,254.19	1.16	7,000	Nira
14	Jarak Pagar	454.70	260.12	0.81	3,000	Biji
15	Pandan	404.90	83.78	0.34	3,000	Pandan
JUMLAH		57,717.57	21,707.40	6.97		

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebak Tahun 2012

5). Perikanan

Di sektor perikanan, pada tahun 2012, produksi ikan hasil tangkapan dan budidaya mencapai 8.148,36 Ton, meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 7.876,15ton. Untuk perikanan budidaya didominasi oleh budidaya kolam ikan yang mencapai 2.885,20 Ton, sedangkan perikanan tangkap berasal dari tangkapan ikan laut yang mencapai 4.616,03 Ton. Tabel 2.6 berikut ini menunjukkan produksi kelautan dan perikanan tahun 2009 - 2012.

Tabel 2.6
Produksi Kelautan dan Perikanan Tahun 2009 – 2012

NO	JENIS USAHA	2009	2010	2011	2012
I	BUDIDAYA IKAN				
1	KOLAM	2,808.79	2819.41	2,859.17	2,885.20
2	SAWAH	49.91	47.27	46.11	26.02
3	KERAMBA	18.11	38.51	38.79	55.00
4	KOLAM AIR DERAS	72.09	51.97	51.55	39.80
5	JARING APUNG	452.64	498.31	505.55	503.00
6	TAMBAK	3.13	10.68	11.45	17.70
	JUMLAH	3,404.67	3,466.15	3,512.62	3,526.72
II	PENANGKAPAN IKAN				
1	LAUT	2,882.73	3,395.66	4,348.66	4,616.03
2	PERAIRAN UMUM	107.32	12.05	14.87	5.61
	JUMLAH II	2,990.05	3,407.71	4,363.53	4,621.64
	JUMLAH TOTAL	6,394.72	6,873.86	7,876.15	8,148.36

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2012

6). Perdagangan dan Perindustrian

Di sektor perdagangan dan perindustrian, perkembangan sarana perdagangan terutama pasar menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2011, jumlah pasar sebanyak 39 unit.

Di Kabupaten Lebak, industri umumnya berskala kecil. Pada tahun 2009, terdapat 14.749 unit industri yang mencakup 19 unit industri menengah dan 14.730 unit industri kecil. Pada tahun 2010, terdapat 14.833 unit industri yang mencakup 19 unit industri menengah dan 14.813 unit industri kecil. Pada tahun 2011, mengalami peningkatan menjadi 21 unit industri menengah dan 14.999 unit industri kecil

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

a. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik (*attractiveness*) bagi pelaku ekonomi yang telah berada dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan *multiflier effect* bagi peningkatan daya saing daerah. Kemampuan ekonomi daerah memicu daya saing daerah dalam beberapa tolok ukur, sebagai berikut:

1). Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Angka konsumsi RT per kapita)

Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi RT per kapita, yaitu rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau, dan sirih. Bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah, dan sebagainya. Nilai konsumsi pengeluaran makanan 183.837 dan Non-makanan 101.840 per kapita.

2). Produktivitas total daerah

Produktivitas total daerah dihitung untuk mengetahui tingkat produktivitas tiap sektor per angkatan kerja yang menunjukkan seberapa produktif tiap angkatan kerja dalam mendorong

ekonomi daerah per sektor. Produktivitas Total Daerah dapat diketahui dengan menghitung produktivitas daerah per sektor (9 sektor) yang merupakan jumlah PDRB dari setiap sektor dibagi dengan jumlah angkatan kerja dalam sektor yang bersangkutan. PDRB dihitung berdasarkan 9 (sembilan) sektor.

Sektor dengan produktivitas tertinggi di Kabupaten Lebak pada tahun 2009 adalah sektor Keuangan, Sewa dan Jasa Perusahaan sebesar Rp.126,66 Juta. Sektor ini terus mengalami peningkatan pada tahun 2010 menjadi sebesar Rp. 132,45 Juta. Sektor berikutnya dengan produktivitas tertinggi pada tahun 2010 adalah sektor Listrik, Gas dan Air Bersih sebesar Rp. 32,14 juta dan sektor Industri Pengolahan sebesar Rp.26,4 juta.

b. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Infrastruktur wilayah terdiri dari beberapa aspek yaitu infrastruktur transportasi, sumber daya air dan irigasi, listrik dan energi, telekomunikasi, serta sarana dan prasarana permukiman. Kebutuhan akan infrastruktur wilayah tidak terlepas dari fungsi dan peranannya terhadap pengembangan wilayah, yaitu sebagai pengarah dan pembentuk struktur tata ruang, pemenuhan kebutuhan wilayah, pemacu pertumbuhan wilayah, serta pengikat wilayah.

1). Transportasi

Aspek Transportasi terdiri dari transportasi darat, udara dan laut. Pada aspek transportasi darat, salah satu indikator tingkat keberhasilan penanganan infrastruktur jalan adalah meningkatnya kondisi jalan baik.

Tabel 2.7
Data Kondisi Jalan di Kabupaten Lebak Tahun 2012

No	Kondisi	Panjang	Keterangan
1.	Total Jalan Kab/Kota	837.96 Km	Merupakan panjang jalan status kabupaten/kota berdasarkan SK Bupati/Walikota dilampirkan peta dan SK dimaksud
2.	Jumlah dan Panjang Jembatan Jalan Kab/Kota	A 169.00 Unit	Merupakan jumlah dan panjang jembatan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota
		B 2,349.20 Meter	
3.	Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	652.06 Km	Merupakan total panjang jalan dalam kondisi baik. Kriteria baik sesuai dengan juknis DAK yaitu nilai kerusakan jalan $\leq 11\%$ (dilampirkan peta)
4.	Panjang Jalan dalam Kondisi Rusak Ringan	62.93 Km	Kriteria sedang sesuai dengan juknis DAK yaitu nilai kerusakan jalan $11 - < 16\%$
5.	Panjang Jalan dalam Kondisi Rusak Sedang	38.72 Km	Kriteria rusak sesuai dengan juknis DAK yaitu nilai kerusakan jalan $16 - < 23\%$
6.	Panjang Jalan dalam Kondisi Rusak Berat	84.25 Km	Kriteria rusak berat sesuai dengan juknis DAK yaitu nilai kerusakan jalan $\geq 23\%$
7.	Panjang Jalan Poros Desa	5,647.20 Km	Merupakan total panjang jalan poros desa berdasarkan SK Bupati/Walikota (dilampirkan peta dan data pendukung administrasinya/SK/Ketetapan lainnya)

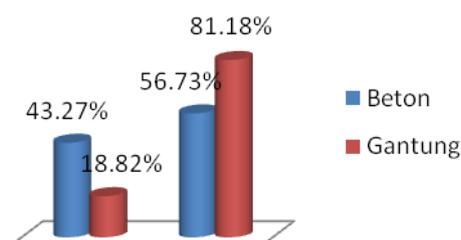
Sumber : Bappeda Kab. Lebak tahun 2012

Pada tahun 2012, kondisi jalan baik kabupaten sepanjang 652,06 km atau sebesar 77,82 %. Kondisi ini menunjukkan kenaikan kondisi jalan baik sebesar 25,94 % dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 51,88 %.

Dari seluruh jaringan jalan kabupaten sepanjang 837,96 km, sebesar 77,82 % dalam kondisi baik, 7,5 % kondisi rusak ringan, 4,62 % rusak sedang dan 10,05 % dalam kondisi rusak berat. Hal ini disebabkan karena sudah habisnya umur rencana jalan pada sebagian besar ruas jalan Kabupaten, tingginya frekuensi bencana alam serta beban lalu lintas yang sering melebihi standar Muatan Sumbu Terberat (MST).

Grafik 2.17 menunjukkan jumlah jembatan di Kabupaten Lebak, pada tahun 2012 sebanyak 991 unit terdiri dari jembatan beton sebanyak 550 unit dan jembatan gantung sebanyak 441 unit. Dari jumlah tersebut 56.73% jembatan beton dalam kondisi rusak dan 81.18% jembatan gantung dalam kondisi rusak.

Grafik 2.17
Kondisi Sarana Jembatan di Kabupaten Lebak Tahun 2012



	Baik	Rusak	Jumlah
Beton	238	312	550
Gantung	83	358	441

Sumber data: Bappeda Kabupaten Lebak 2012

2). Sumber Daya Air

Pada aspek infrastruktur sumber daya air dan irigasi, kondisi infrastruktur yang mendukung upaya konservasi, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air dan sistem informasi sumber daya air dirasakan masih belum memadai. Potensi sumber daya air di Kabupaten Lebak yang besar belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang kegiatan pertanian, industri, dan kebutuhan masyarakat lokal. Jaringan irigasi potensial di Kabupaten Lebak sampai dengan tahun 2012 seluas 67,198 ha yang terdiri dari: 16 unit irigasi teknis, 45 unit irigasi semi teknis, 290 irigasi sederhana dan 163 irigasi perdesaan.

3). Pertambangan dan Energi

Kabupaten Lebak merupakan wilayah yang memiliki kandungan dan jenis bahan tambang yang sangat besar, potensi ini akan meningkatkan pendapatan asli daerah dan memberikan lapangan pekerjaan penduduk sekitar bila di eksploitasi secara baik. Jenis bahan galian yang ada di wilayah Kabupaten Lebak meliputi golongan A, golongan B, dan golongan C.

Bahan galian golongan A berupa Batubara dengan jumlah cadangan sebesar 14.039.249 ton, berada di wilayah Kecamatan Bojongmanik, Bayah, Panggarangan, Cihara, Sajira, Cipanas, dan Cilograng.

Untuk bahan galian golongan B terdiri dari Emas-Perak dengan jumlah cadangan sebesar 569,041 ton, berada di wilayah Kecamatan Bayah, Cibeber, Cipanas, Sobang, Muncang, Gunungkencana, Cilograng, Panggarangan, dan Cijaku. Selain Emas-Perak ada juga Galena dengan jumlah cadangan yang belum diketahui, berada di wilayah Kecamatan Bayah, Cibeber, Panggarangan, Bojongmanik, Lebakgedong, dan Cigemblong.

Untuk bahan galian golongan C terdiri dari 18 jenis bahan galian, diantaranya yang memiliki jumlah cadangan terbesar adalah Batu Gamping (Batu Kapur), Batu Belah, Lempung, Bentonit, Pasir Kuarsa, dan Zeolit.

Di bidang energi, pemenuhan bahan bakar untuk masyarakat Kabupaten Lebak dilayani melalui 12 unit Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan 2 Unit Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas. Pelayanan energi listrik dilaksanakan oleh PT PLN (Persero) APJ banten Selatan. Rasio elektrifikasi di Kabupaten Lebak pada tahun 2010 baru mencapai 70,65 %, masih terdapat 1 desa yang belum teraliri listrik yaitu Desa Kanekes di Kecamatan Leuwidamar.

Peningkatan rasio elektrifikasi perdesaan masih terus diupayakan baik melalui dana APBD Kabupaten maupun bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi, sedangkan peningkatan rasio elektrifikasi rumah tangga terus diupayakan baik melalui pembangunan jaringan listrik yang bersumber dari PLN, maupun penyediaan sumber-sumber energi alternatif seperti Pembangkit Listrik Tenaga (PLT) mikro hidro, surya, dan angin.

4). Pariwisata

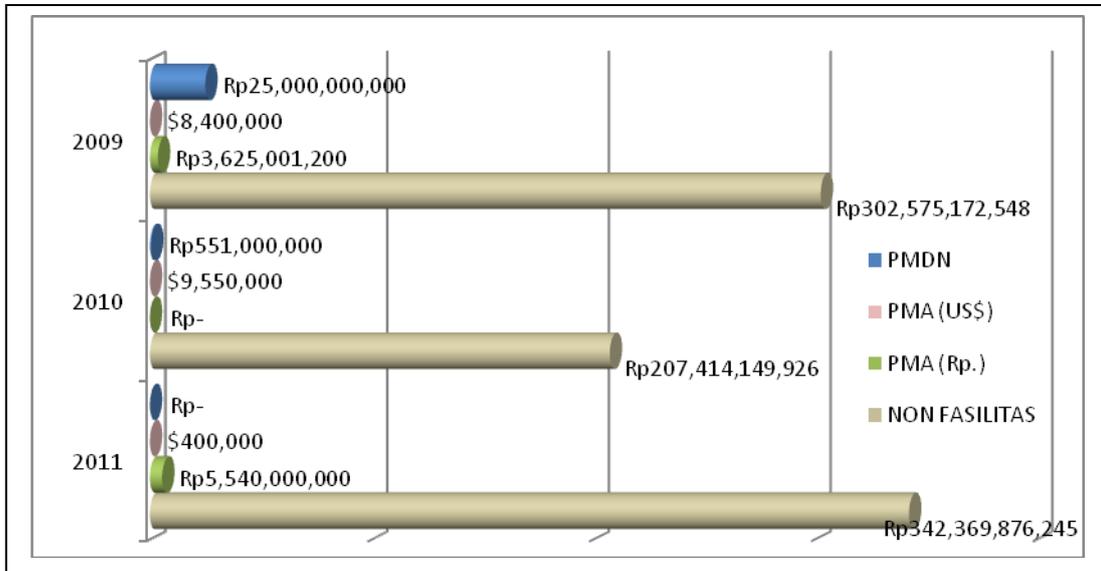
Perkembangan pariwisata di Kabupaten Lebak belum mengembirakan, hal ini ditandai dengan masih minimnya sarana dan prasarana di tempat tujuan wisata , hal ini mengakibatkan tingkat kunjungan juga sangat kurang. Dimasa yang akan datang perlu dibangun sarana dan prasarana baik ditempat wisata maupun infrastruktur yang menuju ke tempat wisata.

c. Fokus Iklim Berinvestasi

Pada tahun 2008, Kabupaten Lebak telah memiliki Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) sebagai upaya meningkatkan layanan publik. Kantor tersebut berfungsi untuk mengendalikan pemberian ijin yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Lebak melalui layanan satu atap. Diantara ijin yang proses administrasinya diserahkan pada KPPT berasal dari Dinas Kesehatan, Dinas Cipta Karya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan,

Disporabudpar, Dishutbun, Distamben DPPKD, dan Bappeda. Pada tahun 2011 surat izin yang terbitkan oleh KPPT Lebak meningkat sebanyak 4.570 surat, atau tahun 2010 sebanyak 11.404 dan tahun 2011 sebanyak 15.974.

Grafik 2.18
Realisasi Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri
Kabupaten Lebak Tahun 2009-2011



Sumber: KPPT Kabupaten Lebak tahun 2012

Laju pertumbuhan investasi yang ditanamkan di Kabupaten Lebak melalui Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), pada periode tahun 2009–2011, cenderung fluktuatif. Kondisi ini memberikan sinyalemen bahwa iklim investasi di Kab. Lebak cukup memberikan peluang bagi para penanam modal untuk menanamkan investasinya di Kabupaten Lebak .

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dari tahun 2009 ke tahun 2010 mengalami penurunan dari 25 milyar menjadi hanya 550 juta dan di tahun 2011 tidak ada PMDN.

Penanaman Modal Asing (PMDA) dari tahun 2009 ke tahun 2010 meningkat dari US\$ 8.4 juta + 3.6 milyar rupiah lebih menjadi US\$ 9.55 juta dan di tahun 2011 menurun menjadi US\$ 0.4 juta + 5.54 milyar rupiah.

Untuk Non Fasilitas dari tahun 2009 ke tahun 2010 mengalami penurunan dari Rp. 302 milyar lebih menjadi Rp. 207 milyar lebih dan di tahun 2011 meningkat menjadi Rp. 342 milyar lebih.

Peranan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan koperasi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi masih perlu ditumbuhkembangkan. Hal tersebut disebabkan kurangnya efektifitas fungsi dan peranan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pembangunan serta rentannya UMKM terhadap perubahan harga bahan bakar. Masih tingginya kredit konsumsi dibandingkan dengan kredit investasi juga menghambat kontribusi

UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi sehingga kurang menopang aktivitas sektor riil. Selain itu, dibutuhkan pengembangan UMKM dan koperasi yang mampu mengembangkan agroindustri dan bisnis kelautan guna menunjang daya beli dan ketahanan pangan.

d. Fokus Sumber Daya Manusia

Di Kabupaten Lebak struktur umur penduduk usia produktif (15-64 tahun) 67,411% jumlah ini lebih tinggi dibandingkan jumlah penduduk di bawah usia 15 tahun dan penduduk usia di atas 64 tahun, yaitu masing-masing sebesar 28,97% dan 3.62%.

Dengan demikian, angka ketergantungan yang menggambarkan jumlah penduduk usia non produktif yang harus ditanggung oleh jumlah penduduk usia produktif, sebesar 418,079 orang atau 32,59%.

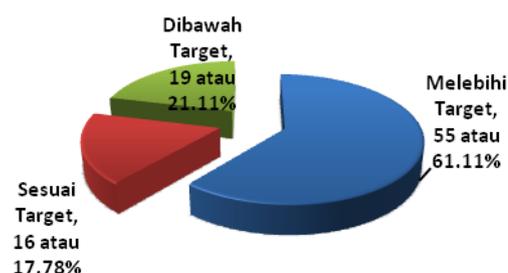
Pada saat ini, peluang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui bidang pendidikan sangat terbuka. Hal ini ditopang oleh dukungan pemerintah baik pusat maupun daerah melalui APBN-APBD yang akan berupaya menyediakan anggaran untuk pendidikan sebesar 20 persen. Dalam kaitan ini, pemerintah menyadari bahwa pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia serta mempunyai andil besar terhadap kemajuan sosial ekonomi satu bangsa. SDM yang berkualitas merupakan salah satu faktor penting bagi kemajuan bangsa. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat semakin tinggi kualitas SDM di wilayah tersebut. Peluang untuk mendapatkan lapangan pekerjaan atau menciptakan peluang usaha lebih besar bagi mereka yang berpendidikan tinggi dibandingkan dengan mereka yang berpendidikan rendah.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Hasil evaluasi program dan kegiatan APBD tahun 2012 yang dinyatakan dalam 90 indikator kinerja, 29 sasaran, 7 tujuan dan 5 misi RPJMD Kabupaten Lebak diperoleh:

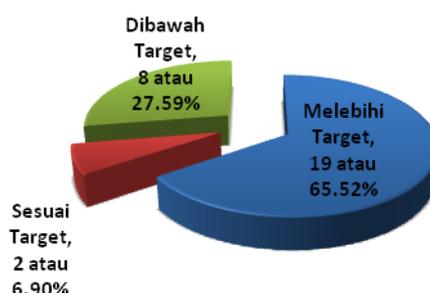
1) terdapat sebanyak 55 indikator kinerja atau 61.11% dengan capaian di atas 100% (melebihi target), 16 indikator kinerja atau 17.78% dengan capaian 100% (sesuai target) dan 18 indikator kinerja atau 20% dengan capaian di bawah 100% (di bawah target);

Garfik 2.19
Capaian 90 Indikator Kinerja



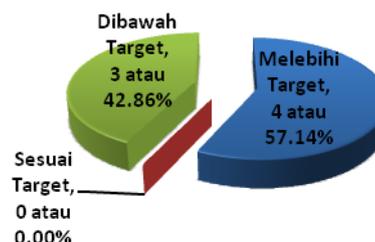
2) dari 29 sasaran, sebanyak 19 sasaran atau 62.22% dengan capaian di atas 100% (melebihi target), 2 sasaran atau 6.90% dengan capaian 100% (sesuai target) dan 8 sasaran atau 27.59% dengan capaian di bawah 100% (di bawah target);

Garfik 2.20
Capaian 29 Sasaran



3) dari 7 tujuan, sebanyak 4 tujuan atau 57.14% dengan capaian di atas 100% (melebihi target), 0 tujuan atau 0.00% dengan capaian 100% (sesuai target) dan 3 tujuan atau 42.86% dengan capaian di bawah 100% (di bawah target);

Garfik 2.21
Capaian 7 Tujuan



4) dari 5 misi, sebanyak 4 misi atau 80.00% dengan capaian di atas 100% (melebihi target), 0 misi atau 0.00% dengan capaian 100% (sesuai target) dan 1 misi atau 20.00% dengan capaian di bawah 100% (di bawah target);

Garfik 2.22
Capaian 5 Misi



Berdasarkan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan APBD Tahun 2012 terhadap capaian 5 (lima) misi RPJMD diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 2.8

MISI I : MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN LEBAK YANG BERTAKWA, PRODUKTIF DAN BERDAYA SAING

TUJUAN I : MENDORONG TINGKAT PENDIDIKAN, DERAJAT KESEHATAN, DAN KOMPETENSI KERJA MASYARAKAT KABUPATEN LEBAK

No	CAPAIAN KINERJA/ SASARAN	TARGET TAHUN 2012	CAPAIAN TAHUN 2012	TINGKAT CAPAIAN
1	Wajar 9 Tahun dan Pencanangan Wajar 12 Tahun bagi anak usia sekolah	- Angka Partisipasi Kasar (APK): ➢ APK SD 113,97% ➢ APK SLTP 96,29% ➢ APK SLTA 50,21% - Angka Partisipasi Murni (APK) : ➢ APM SD 96,29% ➢ APM SLTP 66,99% ➢ APM SLTA 41,36% - Rata-rata Kelulusan 93,33% - APK Melek Huruf 95,53% - Rata-rata Lama Sekolah 6,87%	- Angka Partisipasi Kasar (APK): ➢ APK SD 113,97% ➢ APK SLTP 97,84% ➢ APK SLTA 52,32% - Angka Partisipasi Murni (APK) : ➢ APM SD 98,00% ➢ APM SLTP 84,86% ➢ APM SLTA 44,09% - Rata-rata Kelulusan 98,47% - APK Melek Huruf 97,76% - Rata-rata Lama Sekolah 6,3%	100% 101.60% 104.20% 101.78% 126.68% 106.60% 105.50% 102.33% 91.70%
2	Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan terutama bagi Ibu dan Anak	- AKI 167,11 jiwa/100.000 KH - AKB 36,69 jiwa/1.000 KH - UHH (63,73 Tahun) - Prevalensi Balita Gizi Buruk 1,05% - Keterlambatan Pelayanan Pasien Gawat Darurat (30%) - Ketidaklengkapan Lembar Pengisian Rekam Medik (KLPRM) (40%)	- AKI 172,09 jiwa/100.000 KH - AKB 28,16 jiwa/1.000 KH - UHH (63,35 Tahun) - Prevalensi Balita Gizi Buruk 0,65% - Keterlambatan Pelayanan Pasien Gawat Darurat (0,50%) - Ketidaklengkapan Lembar Pengisian Rekam Medik (KLPRM) (31,78%)	97.11% 130.29% 99.40% 161.54% 6000% 125.87%
3	Pertumbuhan dan Persebaran Penduduk	- Cakupan Peserta KB Aktif (69,93%) - Jumlah PIK-KRR (5 Kelompok) - Cakupan Pemberdayaan Kualitas Keluarga : BKB (348 Kelompok) BKR (176 Kelompok) BKL (237 Kelompok)	- Cakupan Peserta KB Aktif (71,17%) - Jumlah PIK-KRR (10 Kelompok) - Cakupan Pemberdayaan Kualitas Keluarga : BKB(445 Kelompok) BKR(190 Kelompok) BKL(284 Kelompok)	101.77% 200.00% 127.87% 107.95% 119.83%
4	Pelayanan Sosial terutama pelayanan administrasi kependudukan, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial)	- Terpenuhinya Dokumen kependudukan(76%) - Ketersediaan Database kependudukan (99%) - Penanganan PMKS (1 paket) - Pemberdayaan PSKS (1 paket)	- Terpenuhinya Dokumen kependudukan (78%) - Ketersediaan Database kependudukan (99,80%) - Penanganan PMKS (1 paket) - Pemberdayaan PSKS (1 paket)	102.63% 100.80% 100.00% 100.00%
5	Kesetaraan Gender dan Peran Pemuda dan Olahraga	- IPG/GDI (58,56) - Pembinaan Prestasi atlet (0 atlet) - Pembinaan Organisasi Olahraga (2 Pengcab) - Peningkatan Peran Pemuda dalam Pembangunan (28 pemuda)	- IPG/GDI (60,92%) * - Pembinaan Prestasi atlet (0 atlet) - Pembinaan Organisasi Olahraga (0 Pengcab) - Peningkatan Peran Pemuda dalam Pembangunan (20 Pemuda)	104.03% 0% 0.00% 71.43%
6	Peningkatan Kualitas dan Perlindungan terhadap Tenaga Kerja	- Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Kerja (94%) - Peningkatan Kapasitas tenaga kerja (60 orang)	- Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Kerja (90%) - Peningkatan Kapasitas tenaga kerja (100 orang)	95.74% 166.67%

Misi ke satu mengandung 28 indikator kinerja yang terbagi dalam dua tujuan, yaitu tujuan 1 terdapat 24 mengandung kinerja dan tujuan 2 mengandung 4 indikator kinerja dan terdapat 28 indikator kinerja. Tabel 2.8 diatas menunjukkan capaian kinerja pada misi ke satu, tujuan 1. Dari 24 indikator kinerja, masih terdapat 7 indikator kinerja dengan capaian di bawah 100%, bahkan dua diantaranya 0%, yaitu Pembinaan Prestasi Atlet dan Pembinaan Prestasi Olahraga.

Tabel 2.9

TUJUAN 2 : MENJADIKAN MASYARAKAT KABUPATEN LEBAK YANG AGAMIS DAN BERBUDAYA

No	CAPAIAN KINERJA/ SASARAN	TARGET TAHUN 2012	CAPAIAN TAHUN 2012	TINGKAT CAPAIAN
7	Aktivitas kehidupan beragama dan solidaritas sosial	- Sarana dan prasarana peribadatan serta pendidikan keagamaan (595 unit) - Forum Komunikasi Umat Beragama 46%	- Sarana dan prasarana peribadatan serta pendidikan keagamaan (375 unit) - Forum Komunikasi Umat Beragama 50%	63.03% 108.70%
8	Impelementasi Nilai-nilai Budaya dan Kearifan Lokal	- Pengembangan kesenian daerah (7 event) - Pengembangan Budaya Daerah (12 %)	- Pengembangan kesenian daerah (9 event) - Pengembangan Budaya Daerah (9 %)	128.57% 75 .00%

Tabel diatas menunjukkan capaian kinerja pada misi ke satu, tujuan 2. Dari 4 indikator kinerja, masih terdapat 2 indikator kinerja dengan capaian di bawah 100%, yaitu Sarana dan Prasarana Peribadatan serta Pendidikan Keagamaan dengan capaian 63.03% dan Pengembangan Budaya Daerah dengan capaian 75%.

Tabel 2.10

MISI II : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN EKONOMI KERAKYATAN BERBASIS POTENSI LOKAL

TUJUAN 3 : MENINGKATKAN DAYA BELI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT MELALUI PENGEMBANGAN AKTIVITAS EKONOMI BERBASIS POTENSI LOKAL

No	CAPAIAN KINERJA/ SASARAN	TARGET TAHUN 2012	CAPAIAN TAHUN 2012	TINGKAT CAPAIAN
9	Aktivitas ekonomi daerah berbasis potensi lokal	- Rehabilitasi/Pembangunan Pasar (2 unit) - Jumlah Industri Kecil (15.146 unit) - Jumlah Industri Menengah (22 unit) - Produksi Perkebunan (1 %) - Produksi Hasil Hutan Non Kayu (5%) - Jumlah Koperasi Aktif (635 unit) - Meningkatnya Daerah Tujuan Obyek Wisata (1 lokal) - Pemberdayaan Ekonomi Ponpes Salafi (5 Ponpes)	- Rehabilitasi/Pembangunan Pasar (5 unit) - Jumlah Industri Kecil (15.146 unit) - Jumlah Industri Menengah (22 unit) - Produksi Perkebunan (1,7%) - Produksi Hasil Hutan Non Kayu (5,1%) - Jumlah Koperasi Aktif (657 unit) - Meningkatnya Daerah Tujuan Obyek Wisata (1 lokal) - Pemberdayaan Ekonomi Ponpes Salafi (10 Ponpes)	250.00% 100.00% 100.00% 170.00% 102. 00% 103.46% 100% 200%

10	Kesempatan dan Penyediaan Lapangan kerja	- Penempatan dan Monitoring transmigrasi (110 orang) - Penempatan dan Perlindungan TKI (983 orang) - Wirausaha Baru (2 unit)	- Penempatan dan Monitoring transmigrasi (153 orang) - Penempatan dan Perlindungan TKI (1.136 orang) - Wirausaha Baru (2 unit)	139.09% 115.56% 100.00%
11	Investasi mendorong penciptaan lapangan kerja	- Jumlah Investor berskala Nasional (PMDN/PMA) (231 investor) - Jumlah Nilai Investasi berskala Nasional Rp. 210.000.000.000,-	- Jumlah Investor berskala Nasional (PMDN/PMA) (902 investor) - Jumlah Nilai Investasi berskala Nasional Rp. 3.378.204.101.095,-	429.52% 1608.66%
12	Kebutuhan pangan masyarakat	- Produksi Palawija (47,967 ton) - Produksi Padi (520,874 ton) - Produksi Hortikultura (165,275 ton) - Produksi Ikan Tangkap (4.085,42 Ton) - Produksi Ikan Budidaya (3.416,73 Ton) - Produksi daging (7.139.444 Kg)	- Produksi Palawija (19,810 ton) - Produksi Padi (535,680 ton) - Produksi Hortikultura (874,369 ton) - Produksi Ikan Tangkap (4.621,64 Ton) - Produksi Ikan Budidaya (3.526,72 Ton) - Produksi daging (7.594.998 Kg)	41.30% 102.84% 529.04% 113.13% 103.22% 106.38%

Tabel 2.10 diatas menunjukkan capaian kinerja pada misi ke dua, tujuan 3. Dari 19 indikator kinerja, masih terdapat 1 indikator kinerja dengan capaian di bawah 100%, yaitu Produksi Palawija dengan capaian 41.30%.

Tabel 2.11

MISI III : MENINGKATKAN KETERSEDIAAN DAN KUALITAS INFRASTRUKTUR WILAYAH

TUJUAN 4 : MENYEDIAKAN INFRASTRUKTUR WILAYAH YANG MAMPU Mendukung AKTIVITAS EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA

No	CAPAIAN KINERJA/ SASARAN	TARGET TAHUN 2012	CAPAIAN TAHUN 2012	TINGKAT CAPAIAN
13	Infrastruktur perdesaan dalam rangka percepatan pembangunan desa tertinggal	- Tertanganinya Infrastruktur Desa Tertinggal (10 desa) - Tertanganinya Jalan Poros Desa (100 KM)	- Tertanganinya Infrastruktur Desa Tertinggal (45 desa) - Tertanganinya Jalan Poros Desa (189,130 KM)	450% 189.13%
14	Infrastruktur transportasi yang handal dan terintegrasi mendukung pergerakan orang, barang dan jasa	- Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik (519,19 KM) - Tersedianya Sarana Terminal (0 unit)	- Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik (652,06 KM) - Tersedianya Sarana Terminal (0 unit)	125.42% 0%
15	Infrastruktur Sumber Daya Air dan irigasi serta pengendalian Daya Rusak Air	- Terpeliharanya Jaringan Irigasi (125 unit) - Pemberdayaan P3A (20 unit) - Tersedianya Jaringan Irigasi (2.050 Ha) - Rehabilitasi Jaringan Irigasi (30 unit) - Tersedianya Areal Konservasi Sumber Air (5 unit)	- Terpeliharanya Jaringan Irigasi (130 unit) - Pemberdayaan P3A (80 unit) - Tersedianya Jaringan Irigasi (3.046 Ha) - Rehabilitasi Jaringan Irigasi (49 unit) - Tersedianya Areal Konservasi Sumber Air (6 unit)	104.00% 400% 100.13% 148.59% 120%
16	Cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan	- Terbangunnya Jaringan Listrik (20 kampung) - Pembangunan PJU (20 titik) - Pemeliharaan PJU (1.680 titik)	- Terbangunnya Jaringan Listrik (76 kampung) - Pembangunan PJU (24 titik) - Pemeliharaan PJU (1.126 titik)	380% 120% 67.02%
17	Akses Masyarakat terhadap Sarana dan Prasarana Dasar Pemukiman	- Meningkatnya Cakupan Air Bersih (1,25%)	- Meningkatnya Cakupan Air Bersih (2,07%)	165.60%

Tabel 2.11 diatas menunjukkan capaian kinerja pada misi ke tiga, tujuan 4. Dari 13 indikator kinerja, masih terdapat 2 indikator kinerja dengan capaian di bawah 100%, yaitu Tersedianya Sarana Terminal dengan capaian 0.00% dan Pemeliharaan PJU dengan capaian 67.02%.

Tabel 2.12

MISI IV : MENINGKATKAN DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN UNTUK PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN

TUJUAN 5 : MEWUJUDKAN KESEIMBANGAN LINGKUNGAN DAN KEBERLANJUTAN PEMBANGUNAN (KESEIMBANGAN EKOLOGI-SOSIAL-EKONOMI)

No.	CAPAIAN KINERJA/ SASARAN	TARGET TAHUN 2012	CAPAIAN TAHUN 2012	TINGKAT CAPAIAN
18	Berkurangnya tingkat pencemaran, kerusakan lingkungan dan resiko bencana	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya Fungsi Daerah Resapan Air di sekitar mata air (10 unit) - Meningkatnya Fungsi Daerah Resapan air di sekitar bendungan (2 unit) - Meningkatnya Fungsi Daerah Resapan air di sempadan sungai (2 KM) - Meningkatnya Penghijauan kota dan turus jalan (Turus jalan/sungai 3 KM, Hampan Hijau (0,5 Ha) - Meningkatnya Pemahaman Penanggulangan Bencana dan Tertanganinya Korban Bencana (12%) - Penataan dan Pemeliharaan Taman Kota (21 titik) 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya Fungsi Daerah Resapan air di sekitar mata air (10 unit) - Meningkatnya Fungsi Daerah Resapan air di sekitar bendungan (3 unit) - Meningkatnya Fungsi Resapan air di sempadan sungai (6 KM) - Meningkatnya Penghijauan kota dan turus jalan (Turus jalan/sungai 8 KM, Hampan Hijau (0 Ha) - Meningkatnya Pemahaman Penanganan Penanggulangan Bencana dan Tertanganinya Korban Bencana (14%) - Penataan dan Pemeliharaan Taman Kota (22 titik) 	<p>100%</p> <p>150%</p> <p>300%</p> <p>266.67% 0%</p> <p>116.67%</p> <p>104.76%</p>
19	Meningkatnya fungsi kawasan penyangga, konservasi dan lindung	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya Konservasi dan Pelestarian SDA, Pantai dan Laut Lestari melalui Penghijauan (8.335 batang) - Pertambangan Tanpa Ijin (17 ijin) 	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya Konservasi dan Pelestarian SDA, Pantai dan Laut Lestari melalui Penghijauan (380.000 batang) - Pertambangan Tanpa Ijin (20 ijin) 	<p>4559.09%</p> <p>117.65%</p>
20	Penataan Ruang yang berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Rencana Tata Ruang (2 dokumen) 	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Rencana Tata Ruang (2 dokumen) 	<p>100%</p>

Tabel 2.12 diatas menunjukkan capaian kinerja pada misi ke empat, tujuan 5. Dari 9 indikator kinerja, terdapat 7 indikator kinerja dengan capaian di atas 100% (melebihi target), sisanya 2 indikator kinerja, capaiannya 100% (sesuai target).

Tabel 2.13

MISI V : MENINGKATKAN EFEKTIFITAS PEMERINTAH DAERAH DAN KUALITAS DEMOKRASI MELALUI REFORMASI BIROKRASI

TUJUAN 6 : MELANJUTKAN REFORMASI BIROKRASI AGAR SEMAKIN PROFESIONAL DAN AKUNTABEL

No.	CAPAIAN KINERJA/ SASARAN	TARGET TAHUN 2012	CAPAIAN TAHUN 2012	TINGKAT CAPAIAN
21	Meningkatnya kinerja aparat ur yang berbasis kompetensi	- Pegawai mengikuti diklat : teknis 400 org, struktural 75 org, dan prajabatan 450 org - Formasi pegawai tiap tahun (417 orang)	- Pegawai mengikuti diklat : teknis 679 org, struktural 0 org, dan prajabatan 444 org - Formasi pegawai tiap tahun (0 orang)	(169,75%, 0%, 98,67%) 0%
22	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah, pengelolaan keuangan akuntabel berbasis Teknologi Informasi	- Tercapainya PAD Rp. 94,3 Milyar - Tertatanya Kelembagaan Perangkat Daerah (1 SKPD) - Tertatanya Kearsipan Daerah (1 Dozir) - Tertatanya Aset Daerah (55%) - Tersedianya Dokumen Perencanaan Daerah (0 RPJMD, 1 RKPD)	- Tercapainya PAD Rp. 127,29 Milyar - Tertatanya Kelembagaan Perangkat Daerah (0 SKPD) - Kearsipan Daerah (1 Dozir) - Tertatanya Aset Daerah (94%) - Tersedianya Dokumen Perencanaan Daerah (0 RPJMD, 1 RKPD)	134.99% 0.00% 100.00% 170.91% 100.00%
23	Pelayanan Publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh Lapisan Masyarakat	- Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan (70%) - Menurunnya Temuan Hasil Pemeriksaan (1,6%) - Terlayannya Pengaduan publik (85%) - Terbangunnya Sistem Informasi Dan Teknologi Yang Handal (1 aplikasi) - Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perkantoran (2 unit)	- Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan (70%) - Menurunnya Temuan Hasil Pemeriksaan (1,6%) - Terlayannya Pengaduan publik (83%) - Terbangunnya Sistem Informasi Dan Teknologi Yang Handal (1 aplikasi) - Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perkantoran (5 unit)	100.00% 100.00% 98.64% 100.00% 250.00%
24	Meningkatnya Kinerja pemerintahan, pembangunan dan pengembangan wilayah perdesaan	- Penataan Wilayah Desa/Kelurahan (355 Desa) - Pembangunan Kantor Desa (10 Desa)	- Penataan Wilayah Desa/Kelurahan (0 Desa) - Pembangunan Kantor Desa (15 Desa)	0% 150%
25	Pembangunan dan pembinaan hukum	- Jumlah Produk Hukum : -Peraturan Daerah 9 buah -Peraturan Bupati 9 buah	- Jumlah Produk Hukum : -Peraturan Daerah 9 buah -Peraturan Bupati 15 buah	100% 166.67%
26	Peran pemerintah dan masyarakat dalam memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	- Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat (84,5%) - Tertanganinya Kasus Penyakit Masyarakat (79,5%)	- Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat (84,5%) - Tertanganinya Kasus Penyakit Masyarakat (79,5%)	100% 100%
27	Meningkatnya Kerjasama Daerah dalam Pembangunan	- Jumlah Kerjasama (1 kerjasama)	- Jumlah Kerjasama (0 kerjasama)	0%

Tabel 2.13 diatas menunjukkan capaian kinerja pada misi ke lima, tujuan 6. Dari 18 indikator kinerja, terdapat 6 indikator kinerja dengan capaian di bawah 100% (di bawah target), 7 indikator kinerja sesuai target (100%) dan 5 indikator kinerja, capaiannya di atas 100% (melebihi target).

Tabel 2.14

TUJUAN 7 : MEWUJUDKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI DAN TERPELIHARANYA SEMANGAT KEBANGSAAN

No	CAPAIAN KINERJA/ SASARAN	TARGET TAHUN 2012	CAPAIAN TAHUN 2012	TINGKAT CAPAIAN
28	Meningkatnya Peran dan fungsi Partai Politik	- Terlaksananya Bantuan Bagi Partai Politik yang duduk di DPRD (14 parpol) - Terlaksananya Pembinaan bagi Ormas dan LSM (30 organisasi)	- Terlaksananya Bantuan Partai Politik yang duduk di DPRD (14 parpol) - Terlaksananya Pembinaan bagi Ormas dan LSM (50 organisasi)	100% 166.67%
29	Menguatnya Peran Masyarakat Madani dalam kehidupan Politik	- Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu (0%)	- Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu (0%)	0%

Tabel 2.14 diatas menunjukkan capaian kinerja pada misi ke lima, tujuan 7. Dari 3 indikator kinerja, terdapat 1 indikator kinerja dengan capaian di bawah 100% (di bawah target), 1 indikator kinerja sesuai target (100%) dan 1 indikator kinerja, capaiannya di atas 100% (melebihi target).

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan sedang dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan kelemahan yang tidak diatasi. Untuk mengefektifkan sistem perencanaan pembangunan daerah dan bagaimana visi/misi daerah dibuat dengan sebaik-baiknya, dibutuhkan pengetahuan yang mendalam tentang kekuatan dan kelemahan sehubungan dengan peluang dan tantangan yang dihadapi.

2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebak Tahun 2009-2014 memuat 29 sasaran pembangunan yang terbagi ke dalam 5 misi pembangunan daerah. Permasalahan yang timbul berkaitan dengan tidak tercapainya target dari beberapa sasaran pembangunan.

a. Permasalahan pada Misi Pertama

Permasalahan pada bidang pendidikan adalah target Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) belum tercapai sebesar 0,57% dari target. Hal ini disebabkan oleh Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B dan SMA/SMK/MA/ Paket C masih

relatif rendah, kesadaran dan aksesibilitas masyarakat terhadap pendidikan masih kurang baik, angka putus sekolah untuk semua jenjang masih tinggi, kualitas dan tata kelola pendidikan belum optimal untuk semua jenjang pendidikan;

Permasalahan pada bidang kesehatan adalah: (1) target Angka Kematian Ibu (AKI) belum tercapai sebesar 4,98 jiwa/100.000 KH dari target, (2) Usia Harapan Hidup (UHH) belum tercapai sebesar 0,38 tahun dari target. Beberapa penyebab tidak tercapainya target tersebut adalah penyebaran tenaga kesehatan belum merata, sosialisasi Puskesmas PONEB belum optimal, rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu per satuan penduduk masih sangat tinggi, jumlah dokter dan tenaga medis masih sangat terbatas serta masih tingginya sebaran penyakit menular.

Permasalahan pada bidang kepemudaan dan olahraga adalah: (1) Pembinaan Organisasi Olahraga dengan capaian 0% dari target 2 Pengcab, (2) Peningkatan Peran Pemuda dalam Pembangunan dengan capaian 71,43% dari target 28 pemuda tercapai 20 pemuda. Hal ini disebabkan belum teralokasikannya anggaran untuk kegiatan yang berkaitan dengan target tersebut.

Permasalahan pada bidang ketenagakerjaan adalah: Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Kerja belum tercapai sebesar 4% dari target.

Permasalahan pada bidang keagamaan dan kebudayaan adalah: (1) sarana dan prasarana peribadatan serta pendidikan keagamaan dari target 595 unit terealisasi 375 unit, sehingga tingkat capaiannya 63,03%, (2) pengembangan budaya daerah belum tercapai 3% di bawah target Kondisi ini dikarenakan keterbatasan anggaran untuk kegiatan tersebut.

b. Permasalahan pada Misi Kedua

Misi kedua pada sasaran kebutuhan pangan masyarakat, terdapat satu indikator yang belum mencapai target, yakni produksi palawija, dari target 47,967 ton tercapai 19,810 ton, tingkat capaian 41,30%.

c. Permasalahan pada Misi Ketiga

Pada misi ketiga terdapat satu indikator kinerja yang belum mencapai target, yakni pemeliharaan PJJ, dari target 1.680 titik tercapai 1.126 titik, tingkat capaian 67,02%.

d. Permasalahan pada Misi Keempat

Pada misi keempat secara umum capaian kinerja telah mencapai target, beberapa target kinerja telah melampaui target, namun terdapat satu sub indikator kinerja yang capaiannya masih 0%, yakni hamparan hijau dengan target 0,5 Ha, capaian 0 Ha.

e. Permasalahan pada Misi Kelima

Pada misi kelima terdapat tujuh indikator kinerja yang belum mencapai target : (1) pegawai mengikuti diklat teknis, struktural dan prajabatan. Dari target sejumlah 925 orang, telah tercapai sejumlah 1.123 orang, namun untuk formasi structural capainnya masih nol; (2) formasi pegawai tiap tahun, dari target 417 orang, capaiannya masih nol; (3) tertatanya kelembagaan perangkat daerah, target 1 SKPD, capaian belum ada; (4) terlayannya pengaduan publik, dari target 85%, tercapai 83%; (5) penataan wilayah desa/ kelurahan, target 355 desa, belum ada capaian; (6) jumlah kerjasama daerah dalam pembangunan, dari target 1 kerjasama, capaian belum ada; (7) tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu, target 0%, capaian 0% karena tidak ada pemilu di tahun 2012.

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Sesuai dengan amanat pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, bahwa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah dapat menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang terkait dengan pelayanan dasar (*basic service*) bagi masyarakat antara lain seperti pendidikan dasar, kesehatan, lingkungan hidup, perhubungan, kependudukan, dan sebagainya. Sedangkan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintah yang terkait dengan pengembangan potensi unggulan (*core competence*) yang menjadi kekhasan daerah.

Urusan pemerintahan di luar urusan wajib dan urusan pilihan yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah, sepanjang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah tetap harus diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Urusan pemerintahan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang dijadikan dasar dalam penyusunan susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah.

Seiring dengan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten sesuai dengan PP Nomor 38 Tahun 2007 tersebut, dalam penerapannya terdapat permasalahan-

permasalahan yang berpotensi menimbulkan ketidaktercapaian sasaran pembangunan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Permasalahan-permasalahan tersebut, antara lain:

A. Urusan Perencanaan Pembangunan :

1. Prinsip partisipatif merupakan landasan bagi perumusan perencanaan dan pelaksanaannya, sehingga sesuai dengan kondisi dan keinginan/aspirasi masyarakat. Dalam implementasinya, sebagian besar perencanaan dibuat di tingkat kabupaten sudah melibatkan masyarakat melalui Musrenbang, namun demikian antusiasme dan tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan Musrenbang masih perlu ditingkatkan.
2. Kapasitas perencanaan belum maksimal di semua tingkatan terutama yang terkait dengan identifikasi dan prioritas masalah, akar penyebab masalah, penentuan tujuan, penyusunan dan pengembangan rencana program, pelaksanaan program, dan evaluasi program. Identifikasi masalah belum dilakukan secara komprehensif dengan menggunakan berbagai teknik dan indikator yang tepat. Sehingga keberhasilan program pembangunan belum dapat dicapai secara keseluruhan.
3. Koordinasi antar *stakeholders* (pemangku kepentingan) dalam pelaksanaan pembangunan masih menemui kendala, hal ini disebabkan belum optimalnya intensitas komunikasi antar stakeholders. Sinergitas pelaksanaan program pembangunan antara pembangunan nasional, pembangunan provinsi dan pembangunan Kabupaten/Kota juga belum optimal, sehingga memungkinkan terjadi tumpang tindih (*overlapping*) kegiatan.
4. Dalam Pasal 19 ayat 2, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintahan daerah dan DPRD, kemudian pada pasal 40 ditegaskan bahwa DPRD berkedudukan sebagai unsur Pemerintah Daerah yang bersama-sama dengan Kepala Daerah membentuk dan membahas APBD. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa hubungan antara Pemerintah Daerah dan DPRD merupakan mitra sejajar yang sama-sama melakukan tugas sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. Hubungan tercermin dalam pembuatan kebijakan daerah yang berupa Peraturan Daerah. Dengan demikian antara kedua lembaga tersebut harus membangun hubungan yang saling mendukung. Sinergitas antara eksekutif dan legislatif telah terbangun, namun demikian intensitas komunikasi dan koordinasinya relatif masih perlu dioptimalkan sehingga berimplikasi pada munculnya berbagai dinamika. Dan ini harus terus diupayakan agar komunikasi dan koordinasi dapat berjalan efektif.

B. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

1. Demokrasi telah mendorong masyarakat untuk lebih berani mengemukakan aspirasinya. Salah satunya adalah keinginan untuk membentuk daerah otonom kabupaten baru. Aspirasi pembentukan daerah otonom kabupaten baru di Kabupaten Lebak berkembang sejalan dengan tuntutan untuk ikut serta dalam pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, pembentukan daerah otonomi tersebut cenderung bersifat euforia dan mewedahi kepentingan elit tertentu tanpa memperhatikan dukungan ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan.
2. Permasalahan dalam pembangunan bidang aparatur, antara lain kelembagaan pemerintah masih belum sepenuhnya berdasarkan prinsip organisasi yang efisien dan rasional, sehingga struktur organisasi kurang proporsional, sistem manajemen kepegawaian belum mampu mendorong peningkatan profesionalitas maupun kompetensi. Sistem dan prosedur kerja di lingkungan aparatur negara belum efisien, efektif, dan berperilaku hemat. Praktik penyimpangan yang mengarah pada penyalahgunaan wewenang (korupsi) masih belum teratasi secara optimal, serta pelayanan terhadap publik masih belum sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat. Terbaikannya nilai-nilai etika dan budaya kerja dalam birokrasi juga melemahkan disiplin kerja, etos kerja, dan produktivitas kerja para pegawai.
3. Dikaitkan dengan peningkatan daya guna kekayaan dan aset Pemerintah Daerah masih ditemukan permasalahan pendataan aset yang belum terselesaikan dan adanya aset-aset yang belum tersertifikasi karena berada pada penguasaan perorangan atau masyarakat. Selain itu, sumber pendapatan daerah relatif terbatas karena adanya peraturan baru yang cenderung mengurangi sumber pendapatan dan tidak diperkenalkannya Pemerintah Daerah menggali sumber pendapatan lain di luar ketentuan yang berlaku.
4. Permasalahan yang dihadapi dalam bidang pemerintahan dan pembangunan desa antara lain masih rendahnya keterlibatan masyarakat perdesaan dalam kegiatan ekonomi produktif, yang disebabkan rendahnya kemampuan mengakses kesempatan berusaha, kurangnya kesempatan ekonomi dan kesempatan berusaha. Rendahnya kemampuan mengakses kesempatan berusaha disebabkan oleh terbatasnya kepemilikan produktif, lemahnya sumberdaya modal usaha, terbatasnya pasar dan informasi pasar yang kurang sempurna/asimetris, serta rendahnya tingkat kewirausahaan sosial.

C. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri:

1. Berbagai perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah pusat pada implementasinya mengalami berbagai kendala karena belum didukung oleh sistem hukum yang mapan, aparat hukum yang bersih serta prasarana dan sarana yang memadai. Akibatnya, penegakkan hukum menjadi lemah dan perlindungan hukum dan hak asasi manusia (HAM) belum dapat diwujudkan secara maksimal.
Peraturan perundang-undangan yang baru, selain banyak yang saling bertentangan juga tidak segera ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaannya. Hal tersebut mengakibatkan Daerah mengalami kesulitan dalam menindaklanjuti dengan peraturan daerah dan implementasinya. Peraturan Daerah masih banyak yang belum disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang baru, sehingga menghambat penyelenggaraan pemerintahan di Daerah yang pada akhirnya dapat berpengaruh terhadap pelayanan kepada masyarakat. Permasalahan lain adalah belum adanya *grand design* tentang pembuatan program legislasi daerah, belum optimalnya kapasitas dan kompetensi aparat hukum baik secara kualitas maupun kuantitas dan lemahnya kesadaran dan budaya hukum di kalangan masyarakat.
2. Upaya meningkatkan ketertiban dan ketentraman masyarakat menghadapi tantangan yang cukup berat terutama terkait dengan ancaman stabilitas dan tuntutan perubahan serta dinamika perkembangan masyarakat yang begitu cepat seiring dengan perubahan sosial politik yang membawa implikasi pada segala bidang kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Meningkatnya potensi konflik kepentingan dan pengaruh negatif arus globalisasi yang penuh keterbukaan, juga cenderung mengurangi wawasan kebangsaan dan kesadaran bela negara di kalangan masyarakat.
3. Tingkat kriminalitas dan pelanggaran hukum lainnya masih relatif tinggi, mengingat Kabupaten Lebak sebagai daerah penyangga ibu kota negara dan berada pada jalur lintas Jawa– Sumatera. Namun secara keseluruhan sikap masyarakat untuk mendukung terciptanya tertib sosial melalui upaya mewujudkan ketentraman dan ketertiban cukup baik. Gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat masih berpotensi untuk muncul, seperti berkembangnya modus-modus kejahatan baru dengan memanfaatkan teknologi canggih.

2.4 Isu Strategis

Berdasarkan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun 2012 dan perkiraan tahun 2013 serta hasil perumusan masalah dan tantangan pada tahun 2014 yang merupakan masa berakhirnya RPJMD, maka ditetapkan isu strategis untuk RKPD 2014 sebagai berikut:

1. Peningkatan Ketersediaan dan Konektivitas Infrastruktur Wilayah;
2. Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana;
3. Konsistensi Pelaksanaan penataan ruang;
4. Peningkatan status ketahanan pangan masyarakat;
5. Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan lapangan kerja;
6. Pengembangan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat;
7. Peningkatan promosi dan kerjasama investasi;
8. Pemerataan layanan pendidikan yang bermutu dan berdaya saing;
9. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat dan pengendalian pertumbuhan penduduk;
10. Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah;
11. Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden.

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi makro daerah akan memberikan gambaran mengenai kemajuan ekonomi yang telah dicapai pada tahun 2012, perkiraan tahun 2013 serta prospek perekonomian daerah pada tahun 2014 berdasarkan berbagai langkah kebijakan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Berdasarkan analisis terhadap indikator makro ekonomi Kabupaten Lebak serta memperhatikan kondisi ekonomi global, nasional dan regional, maka prioritas pembangunan perekonomian Kabupaten Lebak diarahkan pada beberapa sektor yang memberikan kontribusi dominan terhadap PDRB, yaitu sektor pertanian, Perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor jasa. Selain itu pembangunan perekonomian juga diarahkan kepada sektor KUKM yang memiliki prospek baik serta tahan terhadap guncangan ekonomi. Sedangkan sektor lainnya berperan sebagai pendukung.

Secara umum kebijakan ekonomi daerah tahun 2014, akan tetap diarahkan untuk:

1. Mengembangkan dan memantapkan pertumbuhan ekonomi terutama pada sektor-sektor yang memiliki peran dominan dalam ekonomi daerah;
2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan ekonomi daerah dengan berbasis pada potensi lokal yang dimiliki;
3. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana ekonomi daerah untuk mengurangi ketimpangan wilayah dan sekaligus mendorong potensi ekonomi perdesaan;
4. Meningkatkan peran para pihak dalam menunjang pertumbuhan perekonomian daerah dengan tetap memanfaatkan sumber daya lokal;

Arah kebijakan ekonomi tersebut dilaksanakan seiring dengan upaya pemerintah daerah dalam pelaksanaan percepatan pembangunan di semua sektor. Upaya tersebut mendorong pembangunan ekonomi dilaksanakan selaras dengan pembangunan sumber daya manusia dan infrastruktur. Keselarasan yang proporsional ini akan membantu perwujudan Kabupaten Lebak sebagai daerah yang kondusif bagi berinvestasi.

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2012 dan Perkiraan Tahun 2013

Tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lebak tahun 2012 sebesar 6,69% lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2011 yang tumbuh sebesar 6,44%. Pertumbuhan ekonomi ini diiringi dengan penurunan inflasi dari 5,01% di tahun 2010 menjadi 3,90% di tahun 2011. Di sisi lain tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Lebak tahun 2011 sebesar 13,35% lebih tinggi daripada tingkat pengangguran terbuka nasional sebesar 6,56%.

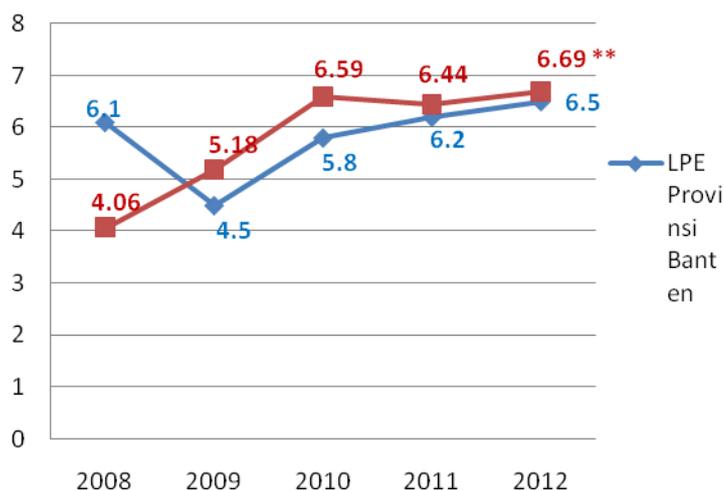
Kondisi ekonomi daerah tahun 2012 dan perkiraan tahun 2013 dapat dilihat dari beberapa indikator makro di bawah ini:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) merupakan indikator kemajuan perekonomian daerah. Pada tahun 2012, LPE Kabupaten Lebak sebesar 6,69% berada di atas LPE Provinsi sebesar 6,5%. Tingginya LPE Kabupaten Lebak dipengaruhi oleh pertumbuhan yang signifikan pada sektor Industri Pengolahan, sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran serta sektor Pengangkutan dan Komunikasi.

Apabila dibandingkan dengan tahun 2011, LPE Kabupaten Lebak tetap mengalami peningkatan sebesar 0.25 poin (3,88%). Pada tahun 2011, sektor Pertambangan dan Penggalian merupakan sektor yang paling dominan memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lebak, disusul oleh sektor Pengangkutan dan Komunikasi berikutnya Perdagangan, Hotel dan Restoran serta sektor Jasa-jasa.

Grafik 3.1
Perkembangan LPE Kabupaten Lebak dan LPE Banten
Tahun 2008 – 2012



Sumber: BPS Kab. Lebak tahun 2013

** : Angka sementara

Seiring dengan pemulihan ekonomi dunia serta upaya Pemerintah Daerah yang terus melakukan perbaikan infrastruktur, diharapkan dapat berdampak pada peningkatan investasi di Kabupaten Lebak. Sehingga pada tahun 2013 LPE diperkirakan akan

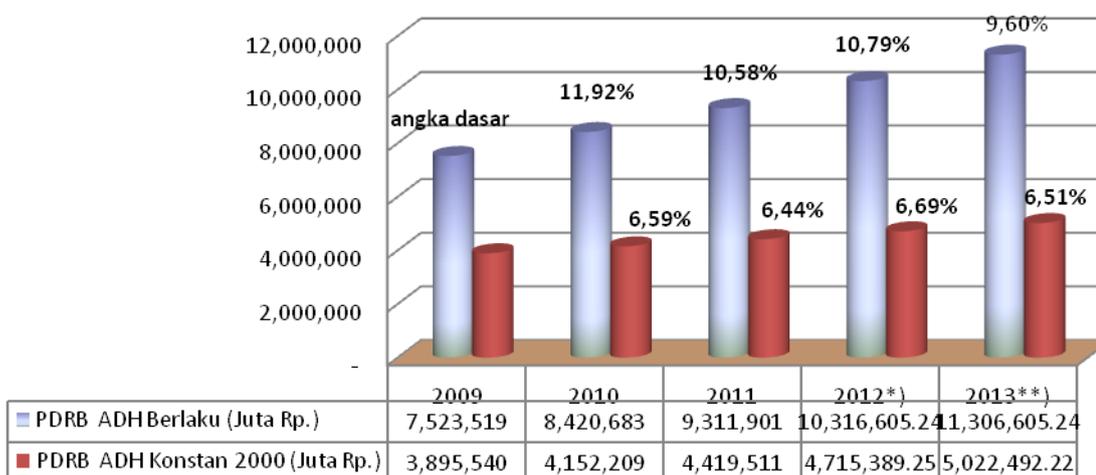
mengalami kenaikan menjadi 6,75%. Perkembangan LPE Kabupaten Lebak dan LPE Banten dari tahun 2008 hingga tahun 2011 serta perkiraan tahun 2012 tercantum dalam grafik 3.1 di atas.

2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Laju pertumbuhan ekonomi daerah didorong oleh perkembangan PDRB yang juga terus meningkat. Sehingga peningkatan PDRB berdampak terhadap meningkatnya daya beli masyarakat, terbukanya kesempatan kerja, berkurangnya jumlah penduduk miskin, membaiknya ketahanan pangan masyarakat dan meningkatnya pendapatan per kapita.

Pada tahun 2011 PDRB Kabupaten Lebak Atas Dasar Harga Berlaku mencapai Rp. 8.460.023,06 juta, meningkat sebesar 8,83% dari tahun sebelumnya. Kontribusi terbesar masih didominasi oleh sektor pertanian sebesar 33,67%, perdagangan, hotel dan restoran sebesar 26,44%.

Grafik 3.2
Perkembangan Nilai PDRB Kabupaten Lebak Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rp.)
dan Atas Dasar Harga Konstan 2000 (Juta Rp.)
Tahun 2009 – 2012 dan Target tahun 2013



Sumber: BPS Kab. Lebak tahun 2013

*) : Angka sementara

**): Angka sangat sementara

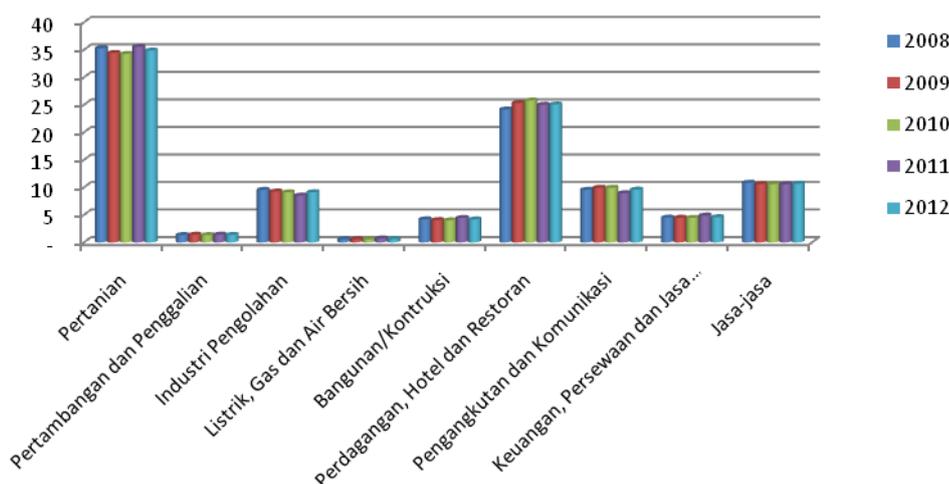
Pada tahun 2012 diperkirakan PDRB Kabupaten Lebak Atas Dasar Harga Berlaku akan mencapai Rp. 9.109.031,01 juta atau meningkat sebesar 7,67% dari tahun sebelumnya dengan kontribusi paling dominan masih pada sektor pertanian, perdagangan, hotel dan restoran.

Gambaran perkembangan nilai PDRB Kabupaten Lebak dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 serta perkiraan tahun 2012 tampak pada grafik 3.2 di atas.

3. Kinerja Sektor Perekonomian Daerah

Kinerja perekonomian Kabupaten Lebak tahun 2011 tergambarkan dari Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan, mengalami pertumbuhan menjadi 4.209.766 (juta) dari tahun 2010 yang sebesar 4.019.538 (juta). Sementara jika dilihat dari lapangan usaha, seluruh sektor ekonomi mengalami pertumbuhan yang positif. Sektor pertanian memberikan kontribusi tertinggi yakni sebesar 37,51%, berikutnya sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 23,83% dan tertinggi ketiga adalah sektor jasa-jasa, sebesar 12,92%. Sedangkan paling kecil adalah sektor LGA (listrik, gas, dan air bersih) sebesar 0,40%. Sektor Industri Pengolahan sebesar 9,16%, Pengangkutan dan Komunikasi sebesar 6,26%, Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan sebesar 4,34%, Bangunan dan Konstruksi sebesar 4,23%, Pertambangan dan Pengalihan sebesar 1,34%.

Grafik 3.3
Kontribusi Sektor PDRB Harga Berlaku (%) dalam Struktur Perekonomian Kabupaten Lebak
(Capaian 2008-2010, Target 2011 & Prediksi 2012)

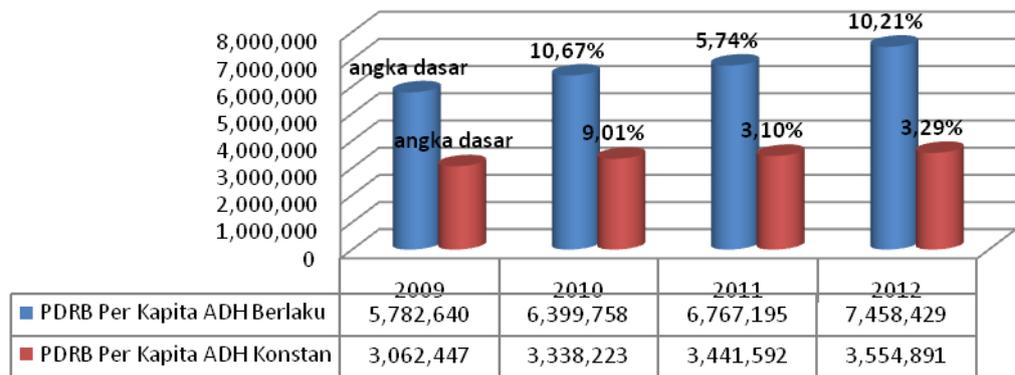


Sumber: BPS Kab. Lebak tahun 2012

4. Pendapatan per-kapita (PDRB per kapita)

Pendapatan per kapita masyarakat Kabupaten sejak tahun 2009 – 2011 meningkat sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi. Perkembangan nilai PDRB Per Kapita tahun 2009-2011 dan perkiraan tahun 2012 tercantum dalam grafik berikut ini :

Grafik 3 . 4
Perkembangan Nilai PDRB Per Kapita (Rp. Juta)
Tahun 2008 - 2010 dan Target 2011 dan Prediksi 2012



Sumber: BPS Kab. Lebak tahun 2012

PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku masyarakat Kabupaten Lebak, dari tahun 2010 ke tahun 2011 meningkat sebesar 5,74% dan ditargetkan pada tahun 2012 akan meningkat sebesar 10,21%.

Kenaikan PDRB per kapita tahun 2011 diiringi oleh kenaikan tingkat inflasi sebesar 2,99% dari tahun 2010 sebesar 2,56% menjadi 5,55% di tahun 2011. Tingkat kenaikan inflasi tahun 2011 masih lebih rendah daripada tingkat kenaikan PDRB per kapita sehingga dapat diartikan bahwa terjadi peningkatan kemakmuran masyarakat di Kabupaten Lebak.

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2013

Berbagai tantangan yang akan dihadapi Kabupaten Lebak di tahun 2013 tentunya tidak terlepas dari perekonomian nasional yang masih akan dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu pengelolaan arus modal (*capital inflow*) dan nilai tukar (*exchange rate*) sehingga harga-harga komoditas terus merangkak naik. Selain itu adanya pasar bebas akan menyebabkan semakin beratnya industri kecil di Kabupaten Lebak dalam melakukan persaingan di dunia usaha. Persaingan ini tidak hanya dalam hal produk tapi juga menyangkut SDM. Tingkat pengangguran dan kemiskinan yang masih cukup tinggi juga akan terus mewarnai tantangan perekonomian Kabupaten Lebak di tahun 2013.

Gambaran ekonomi Kabupaten Lebak tahun 2013 tidak akan terlepas dari pengaruh perkembangan perekonomian nasional. Perekonomian nasional dalam hal ini juga dipengaruhi oleh lingkungan global. Setelah mengalami resesi global sejak pertengahan tahun 2008, tanda-tanda pemulihan ekonomi dunia telah mulai terlihat sejak akhir 2009

hingga akhir 2011. Kondisi tersebut secara langsung ataupun tidak langsung akan turut mempengaruhi perekonomian Kabupaten Lebak. Sehingga diharapkan pada tahun 2013 perekonomian Kabupaten Lebak diperkirakan akan lebih baik dengan pertumbuhan sebesar 4,28%.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab serta taat pada peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Jaminan terhadap pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan kaidah tersebut dapat dicapai lewat perumusan arah kebijakan yang tepat dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian daerah, kapasitas fiskal daerah, serta tujuan pembangunan daerah. Arah kebijakan keuangan yang dimaksud harus terintegrasi sehingga arah kebijakan di bidang pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah akan selaras serta menjadi satu kesatuan fungsi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Arah kebijakan keuangan daerah dibangun lewat asumsi dasar perekonomian daerah serta mempertimbangkan kemampuan daerah sehingga nantinya akan menghasilkan kerangka pendanaan yang tepat untuk pembangunan daerah. Adapun asumsi dasar perekonomian daerah Kabupaten Lebak adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Asumsi Dasar Perekonomian Daerah Kabupaten Lebak

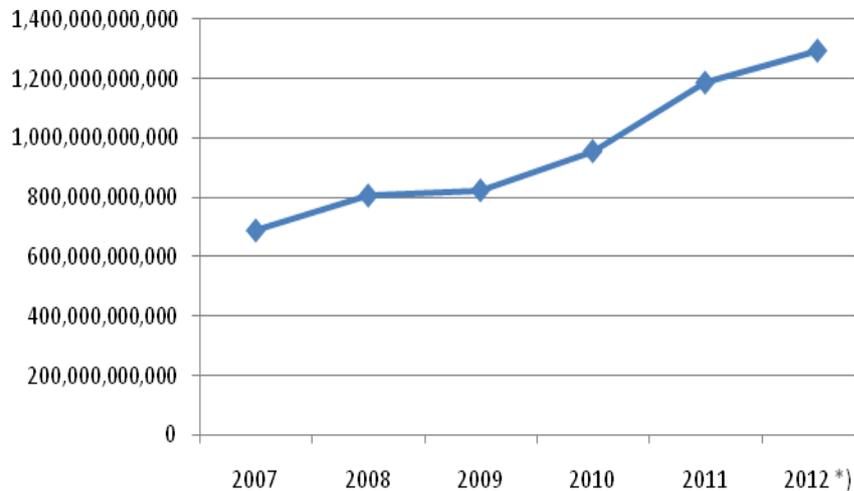
Variabel	APBD 2011	APBD 2012	APBD 2013	RAPBD 2014
Pertumbuhan Ekonomi	4,22	4,28	4,31	4,40
Inflasi	5,55	3,93	4,5	4,15
Nilai Tukar (Rupiah/1 Dollar AS)	9.250 – 9.850	9.000 – 9.600	8.800 – 9.800	9.500 – 10.500

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Untuk keperluan perumusan kebijakan keuangan daerah di bidang pendapatan daerah, maka trend pendapatan daerah dalam tujuh tahun terakhir dapat dijadikan rujukan bagi penentuan kemampuan daerah dalam hal pendanaan pembangunan daerah. Sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini, pendapatan Kabupaten Lebak cenderung

meningkat dari tahun ke tahun meskipun tingkat ketergantungan akan pendanaan dari Pemerintah Pusat masih besar.

Grafik 3.5
Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak
Tahun 2007-2012



Sumber : DPPKD Kabupaten Lebak tahun 2013
) angka sementara (unaudited)

Bila memperhatikan kecenderungan realisasi pendapatan daerah sejak tahun 2007 hingga tahun 2012 terlihat bahwa total pendapatan daerah selalu mengalami peningkatan, meskipun percepatannya sedikit menurun pada periode tahun 2008-2009 akibat krisis moneter global. Seiring dengan membaiknya perekonomian global maupun regional, pada tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Lebak telah menetapkan target pendapatan sebesar 1,395 Triliun Rupiah lebih, mengingat pada tahun sebelumnya realisasi pendapatan daerah telah menembus angka 1,292 Triliun Rupiah lebih.

Dengan dukungan pemutakhiran database objek pajak daerah dan retribusi daerah, serta perbaikan manajerial dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, diperkirakan pada tahun 2014 pendapatan daerah Kabupaten Lebak akan mencapai 1,531 Triliun rupiah lebih atau meningkat 9,76% dari penetapan target pendapatan daerah di tahun 2013. Selengkapnya mengenai perkembangan realisasi pendapatan daerah tahun 2011-2012 dan target pendapatan daerah di tahun 2013 dan 2014 dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1
Realisasi dan Proyeksi/ Target Pendapatan Kabupaten Lebak Tahun 2011-2014

URAIAN	Jumlah			
	Tahun 2011* (Rp)	Tahun 2012** (Rp)	Target Tahun 2013 (Rp)	Proyeksi Tahun 2014
PENDAPATAN	1.185.075.823.124	1.292.324.813.641	1.395.160.161.723	1,531,390,804,039
Pendapatan Asli Daerah	93.063.712.429	127.547.585.087	123.840.370.600	158,947,102,562
Pajak Daerah	14.041.078.255	22.667.691.016	18.201.700.000	32,908,775,968
Retribusi Daerah	66.815.310.818	91.988.559.978	94.089.170.600	113,095,367,600
Hasil Pengelolaan Daerah yang dipisahkan	3.123.406.815	3.157.065.437	4.354.000.000	4,551,958,994
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	9.083.916.541	9.734.268.656	7.195.500.000	8,391,000,000
Dana Perimbangan	859.990.344.602	939.862.523.205	1.079.686.196.123	1,126,876,464,753
Dana Bagi hasil Pajak/bagi hasil bukan pajak	51.430.163.882	69.278.880.205	56.760.119.123	58,863,363,903
Dana Alokasi Umum	737.431.880.720	804.122.393.000	901.740.477.000	946,827,500,850
Dana Alokasi Khusus	71.128.300.000	66.461.250.000	121.185.600.000	121,185,600,000
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	232.021.950.093	224.914.705.349	191.633.595.000	245,567,236,724
Hibah	0	782.100.000	750.000.000	790,000,000
Dana Darurat	0	0	0	0
Dana Bagi hasil IPajak dari Prov. Dan Pemda Lainnya	33.656.391.093	42.221.229.118	43.640.688.000	44,826,690,000
Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus	164.615.559.000	133.704.907.000	133.704.907.000	186,412,546,724
Bantuan Keuangan dari Prov/ kab/ kota/ lainnya	33.750.000.000	47.725.000.000	13.538.000.000	13,538,000,000
Lain-lain Penerimaan	0	481.469.231	0	0

Sumber :

* Laporan Realisasi APBD (audited)

** Laporan Realisasi APBD (unaudited)

Mengacu pada proyeksi pendapatan daerah untuk tahun 2014, maka arah kebijakan keuangan daerah di bidang pendapatan daerah di arahkan pada :

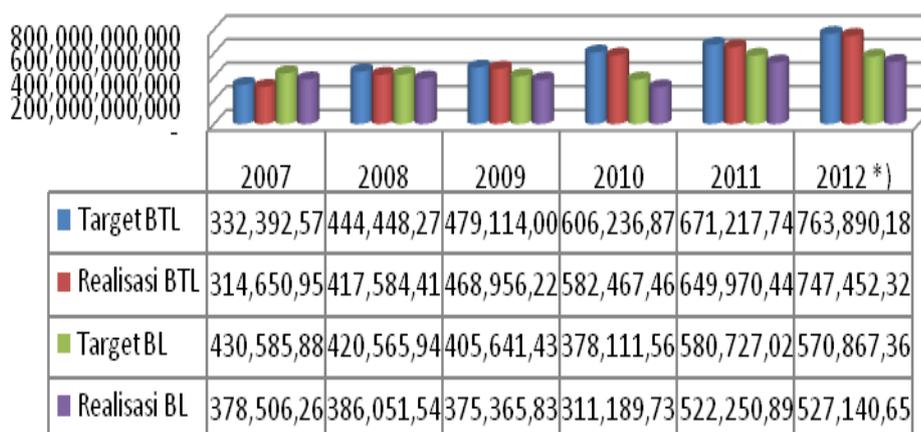
1. Peningkatan peran kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah dengan dukungan database yang mutakhir;
2. Peningkatan pendapatan daerah melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah;
3. Peningkatan koordinasi di bidang pendapatan daerah dengan SKPD pengelola pendapatan daerah, dan Pemerintah Pusat;
4. Peningkatan kinerja Tim Optimalisasi Pendapatan Daerah, khususnya dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah;
5. Pelaksanaan alih kelola pemungutan PBB perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) oleh Pemerintah Kabupaten Lebak;
6. Peningkatan kemampuan manajerial Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam upaya peningkatan kontribusi terhadap pendapatan daerah;

7. Peningkatan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah;
8. Peningkatan pengelolaan asset dan keuangan daerah.

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi serta transparansi penggunaan anggaran, belanja daerah tahun 2014 dirumuskan dengan pendekatan kinerja (*performance based budgeting*) yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Grafik 3.6
Perkembangan Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007-2012



Sumber : DPPKD Kabupaten Lebak tahun 2013
*) angka sementara (unaudited)

Merujuk pada kinerja belanja daerah dalam enam tahun terakhir yang selalu mampu terserap di atas 90% (sebagaimana terlihat pada gambar di atas), maka kebijakan belanja daerah tahun 2014 tetap diarahkan untuk mendukung pencapaian target MDG's dengan fokus pada bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi yang didukung oleh ketersediaan infrastruktur. Namun mengingat pendanaan yang relatif terbatas, maka akan ditempuh upaya pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif melalui:

1. Peningkatan program-program yang berorientasi pada masyarakat dan berupaya melaksanakan realisasi belanja daerah tepat waktu dengan mendorong proses penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara tepat waktu pula.

2. Penerapan pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan pembangunan berkelanjutan yang disertai sistem pelaporan yang transparan dan akuntabel.
3. Pengalokasian anggaran urusan pendidikan sebesar 20% dari total belanja daerah tahun 2014 dalam rangka pencapaian target indeks pendidikan.
4. Peningkatan alokasi anggaran untuk urusan kesehatan guna meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan dalam rangka peningkatan indeks kesehatan.
5. Mengalokasikan kebutuhan belanja *fixed cost*, *regular cost*, dan *variable cost* secara terukur dan terarah, yaitu:
 - a. Pemenuhan kenaikan gaji dan tunjangan pegawai (PNS) sebesar 5% (kebijakan pusat) dengan *acress* 0,5%;
 - b. Pemenuhan kebutuhan dasar dalam menjamin keberlangsungan operasional kantor (biaya listrik, telepon, air bersih, internet, BBM, dan servis mobil);
 - c. Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD, yang meliputi kegiatan koordinasi, fasilitasi, konsultasi, sosialisasi, perencanaan, serta pengendalian dan evaluasi.
 - d. Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program-program pembangunan yang menjadi prioritas dan unggulan SKPD, program/ kegiatan yang telah menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Lebak (*committed budget*).
6. Peningkatan alokasi anggaran bidang ekonomi yang makin diorientasikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
7. Penggunaan anggaran yang terukur dan berbasis pada prioritas pembangunan daerah guna mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Lebak, serta target/sasaran strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebak Tahun 2009-2014.
8. Peningkatan efektifitas belanja bantuan keuangan dan bagi hasil kepada pemerintah desa.
9. Peningkatan efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas belanja hibah dan bantuan sosial sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan.
10. Pengalokasian anggaran yang cermat dan tepat, serta peningkatan efektifitas, transparansi dan akuntabilitas Belanja Tidak Terduga terkait dengan penanganan bencana yang sering terjadi di Kabupaten Lebak.

Tabel 3.2
Realisasidan Proyeksi/ Target Belanja Daerah Tahun 2011-2014

URAIAN	Jumlah			
	Tahun 2011* (Rp)	Tahun 2012** (Rp)	Target Tahun 2013	Proyeksi Tahun 2014
BELANJA TIDAK LANGSUNG	649.960.447.181	747.452.328.419	846.925.144.009	904,718,551,267
Belanja Pegawai	592.784.547.067	691.987.919.878	741.229.397.225	784,986,452,000
Belanja Bunga	1.351.504.705	77.777.779	0	0
Belanja Subsidi	0	0	0	0
Belanja Hibah	23.329.237.950	26.302.135.950	75.135.813.000	84,733,624,162
Belanja Bantuan Sosial	13.655.669.800	7.008.228.095	7.366.800.000	9,338,550,000
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	12.661.107.777	16.300.255.221	20.047.006.515	20,047,006,515
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/ Kab/ Kota dan Pemerintah Desa	1.061.058.000	1.061.057.496	1.061.057.774	1,061,057,774
Belanja Tidak Terduga	5.117.321.882	4.714.954.000	2.085.069.495	4,551,860,816
BELANJA LANGSUNG	522.251.990.977	527.140.659.858	614.712.504.734	690,923,524,467
Belanja Pegawai	30.344.667.500	38.207.999.932	44.538.611.100	48,709,287,259
Belanja Barang Dan Jasa	244.263.466.481	214.323.434.136	252.661.176.679	270,288,553,373
Belanja Modal	247.643.856.996	274.609.225.790	317.512.716.955	371,925,683,835
JUMLAH BELANJA	1.172.212.438.158	1.274.592.988.277	1.461.637.648.743	1,595,642,075,734

Sumber :

* Laporan Realisasi APBD (audited)

** Laporan Realisasi APBD (unaudited)

Mengacu pada arah kebijakan belanja daerah dan kemampuan daerah dalam mendanai pembangunan daerah, serta kecenderungan belanja tujuh tahun terakhir, diperkirakan belanja daerah pada tahun 2014 akan mencapai 1,595 Triliun Rupiah lebih dengan rincian 904,718 Miliar Rupiah lebih untuk Belanja Tidak Langsung (BTL) dan 690,923 Miliar Rupiah lebih untuk Belanja Langsung. Dari angka ini terlihat bahwa pendanaan riil untuk pembangunan hanya akan berkisar di angka 634 Miliar Rupiah mengingat sekitar 56 Miliar Rupiah akan digunakan untuk Program Administrasi Perkantoran yang merupakan kegiatan rutin operasional SKPD. Oleh karena itu, penentuan prioritas pembangunan akan memegang peran penting dalam keberhasilan pembangunan daerah di tahun 2014 nanti sehingga capaian kinerjanya akan mampu memenuhi amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Dalam struktur APBD, di samping komponen pendapatan dan belanja daerah, juga mencakup pembiayaan daerah yang meliputi sumber penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Kebijakan pembiayaan timbul karena jumlah pengeluaran daerah lebih besar dari penerimaan sehingga menimbulkan defisit. Sumber penerimaan daerah berasal dari sisa

lebih perhitungan anggaran tahun lalu, transfer dari dana cadangan daerah (DCD), penerimaan pinjaman dan obligasi, serta hasil penjualan asset daerah yang dipisahkan. Sedangkan sumber pengeluaran daerah terdiri dari transfer ke dana cadangan, penyertaan modal, pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo dan sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan.

Tabel 3.3
Realisasi dan Proyeksi/ Target Pembiayaan Daerah
Tahun Anggaran 2011-2014

URAIAN	Jumlah			
	Tahun 2011* (Rp)	Tahun 2012** (Rp)	Target Tahun 2013	Proyeksi Tahun 2014
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	102.549.254.588	95.521.824.514	70.377.487.020	65,751,271,695
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	102.082.338.338	95.265.025.464	70.377.487.020	65,751,271,695
Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0	0	0	0
Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	466.916.250	62.053.050	0	0
Penerimaan Piutang Daerah	0	194.746.000	0	0
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	19.866.666.000	10.833.333.334	3.900.000.000	1,500,000,000
Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0
Penyertaan modal (Investasi) Pemerintah Daerah	4.200.000.000	1.500.000.000	3.900.000.000	1,500,000,000
Pembayaran Pokok Utang	15.666.666.000	9.333.333.334	0	0
Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan	0	0	0	0
PEMBIAYAAN NETTO	82.682.588.588	84.688.491.180	66.477.487.020	64,251,271,695

Sumber :

* Laporan Realisasi APBD (audited)

** Laporan Realisasi APBD (unaudited)

Pada tahun 2014, struktur pembiayaan daerah untuk sumber penerimaan tidak hanya berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu saja, namun diupayakan untuk mendapatkan sumber-sumber lain seperti telah disebutkan di atas. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu diperkirakan berasal dari sisa penyerapan belanja (retensi dan efisiensi belanja) sebesar 10% dari belanja daerah di tahun 2013, dengan asumsi tidak akan terjadi pelampauan target pendapatan tahun 2013. Sementara untuk pengeluaran pembiayaan direncanakan dalam bentuk penyertaan modal kepada PDAM sebesar 1,5 Miliar rupiah.

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas Pembangunan Daerah yaitu tema atau agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi benang merah/tonggak capaian antara (milestones) menuju sasaran 5 (lima) tahunan dalam RPJMD melalui rencana program pembangunan daerah tahunan. Suatu prioritas pembangunan merupakan jawaban atas sasaran pembangunan daerah dalam suatu pernyataan yang mengandung komponen program prioritas atau gabungan program prioritas.

Suatu prioritas pembangunan daerah pada dasarnya (berisi) program-program unggulan SKPD (terpilih) yang paling tinggi relasinya (leading indicators) bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah tahun rencana. Dalam menentukan prioritas pembangunan, terlebih dahulu dilakukan identifikasi permasalahan pembangunan daerah yang bersifat internal maupun eksternal. Setelah diketahui faktor penyebab atau pemicu secara internal maupun eksternal kemudian dapat disusun prioritas dan sasaran pembangunan beserta program prioritas.

Dengan demikian, suatu program pembangunan daerah merupakan program atau sekumpulan program unggulan kepala daerah yang berhubungan dengan janji politik kepala daerah pada saat pilkada dan hasil perumusan teknokratis terkait.

Tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan daerah, menyangkut keterbatasan anggaran dan identifikasi masalah. Suatu prioritas pembangunan dimasa lalu yang telah berhasil dicapai, tidak lagi diprioritaskan dimasa berikutnya, walau tetap harus dijaga kesinambungannya (performance maintenance).

Suatu prioritas pembangunan daerah juga dapat dikategorikan sebagai operasionalisasi dari tujuan strategik daerah mengingat urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunannya. Sebagai suatu strategic, pengelolaan kinerja menjadi faktor utama bagi kepemimpinan daerah.

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta indikasi prioitas kegiatannya, juga memperhatikan apa yang diusulkan oleh SKPD berdasarkan prakiraan maju pada RKPD tahun sebelumnya.

Metodologi penyusunan prioritas, dengan memperhatikan beberapa kriteria, antara lain:

- a. Korelasinya terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, seperti terhadap MDGs, Standar Pelayanan Minimal, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja.
- b. Korelasinya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam RPJMD.
- c. Korelasinya terhadap pengembangan sektor/bidang yang terkait keunggulan kompetitif daerah.
- d. Korelasinya terhadap isu strategis daerah.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan, peluang yang ada di Kabupaten Lebak, dan mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, serta terjadinya fenomena anomali iklim akhir-akhir ini. Merujuk kepada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan RPJMD 2009-2014, evaluasi pembangunan tahun 2012 dan tahun berjalan 2013, maka tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2014 mengacu kepada Visi Pemerintahan Daerah Kabupaten Lebak tahun 2009–2014:

" KABUPATEN LEBAK MENJADI DAERAH KONDUSIF UNTUK BERINVESTASI YANG BERORIENTASI PADA PEMBANGUNAN PERDESAAN "

Dalam mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, maka untuk kerangka perencanaan pembangunan daerah tahun 2014 diperlukan kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud.

Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi diuraikan dalam matriks tabel berikut:

Tabel 4.1
Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Lebak

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran
1	2	3
<p>Visi : Kabupaten Lebak Menjadi Daerah Kondusif Untuk Berinvestasi Yang Berorientasi Pada Pembangunan Perdesaan</p>		
<p>Misi Pertama : Mewujudkan sumber daya manusia Kabupaten Lebak yang bertakwa, produktif dan berdaya saing</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong tingkat pendidikan, derajat kesehatan, dan kompetensi kerja masyarakat Kabupaten Lebak 2. Menjadikan masyarakat Kabupaten Lebak yang agamis dan berbudaya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya akses, mutu dan citra pendidikan terutama untuk penuntasan wajib belajar 9 tahun dan pencaangan wajib belajar 12 tahun bagi anak usia sekolah 2. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan terutama untuk kesehatan ibu dan anak 3. Terkendalinya pertumbuhan dan persebaran penduduk 4. Meningkatnya pelayanan sosial terutama pelayanan administrasi kependudukan, penayandang masalah kesejahteraan sosial dan potensi sumber kesejahteraan sosial 5. Meningkatnya kesetaraan gender dan peran pemuda dan olah raga dalam berbagai aspek dan proses pembangunan 6. Meningkatnya kualitas dan perlindungan terhadap tenaga kerja 7. Meningkatnya aktifitas kehidupan beragama dan solidaritas sosial 8. Berkembangnya nimplementasi nilai nilai budaya dan kerifan lokal

1	2	3
Misi kedua : Meningkatnya Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal	Meningkatnya daya beli dan ketahanan pangan masyarakat melalui pengembangan aktivitas ekonomi berbasis potensi lokal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya aktivitas ekonomi daerah berbasis potensi lokal 2. Meningkatnya kesempatan dan penyediaan lapangan kerja 3. Meningkatnya investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja 4. Terpeuhinya kebutuhan pangan masyarakat
Misi ketiga : Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah	Menyediakan infrastruktur wilayah yang mampu mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya infrastruktur perdesaan melalui pendekatan kewilayahan dalam rangka percepatan pembangunan desa tertinggal 2. Tersedianya infrastruktur transportasi yang handal dan terintegrasi untuk mendukung pergerakan orang, barang, dan jasa 3. Tersedianya infrastruktur sumber daya air dan irigasi yang handal untuk mendukung upaya konservasi dan pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air 4. Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan di Kabupaten Lebak 5. Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar permukiman (mencakup persampahan, air bersih, air limbah)
Misi keempat : Meningkatkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Untuk Pembangunan yang Berkelanjutan	Mewujudkan keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan pembangunan (keseimbangan ekologi-sosial-ekonomi)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkurangnya tingkat pencemaran, kerusakan lingkungan dan resiko bencana 2. Meningkatnya fungsi kawasan penyangga, konservasi, dan lindung 3. Terlaksananya penataan ruang yang berkelanjutan

1	2	3
<p>Misi kelima : meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah dan kualitas demokrasi melalui reformasi birokrasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melanjutkan reformasi birokrasi agar semakin professional, dan akuntabel 2. Mewujudkan kehidupan demokrasi dan terpeliharanya semangat kebangsaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kinerja aparatur yang berbasis kompetensi 2. Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah serta pengelolaan keuangan yang akuntabel berbasis teknologi informasi 3. Meningkatnya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat 4. Meningkatnya kinerja pemerintahan, pembangunan dan pengembangan wilayah perdesaan 5. Meningkatnya pembangunan dan pembinaan hukum 6. Meningkatnya peran pemerintah dan masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat 7. Meningkatnya kerja sama daerah dalam pembangunan, 8. Meningkatnya peran dan fungsi partai politik 9. Menguatnya peran masyarakat madani dalam kehidupan politik

Tujuan dan sasaran Misi Pertama, **Mewujudkan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lebak yang bertakwa, Produktif dan Berdaya Saing** terkait dengan isu strategis Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Dasar.

Tujuan dan sasaran Misi Kedua, **Meningkatnya Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal** terkait dengan isu strategis Peningkatan Ketahanan Pangan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

Tujuan dan sasaran Misi Ketiga, **Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah** terkait dengan isu strategis Pengembangan Infrastruktur Daerah, Pengelolaan Lingkungan Hidup, Penanganan Desa Tertinggal dan Kebencanaan.

Tujuan dan sasaran Misi Keempat, **Meningkatkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Untuk Pembangunan Yang Berkelanjutan** terkait dengan isu strategis Pengembangan Infrastruktur Daerah, Pengelolaan Lingkungan Hidup, Penanganan Desa Tertinggal dan Kebencanaan

Tujuan dan sasaran Misi Kelima, **Meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah dan kualitas demokrasi melalui reformasi birokrasi** terkait dengan isu strategis Peningkatan Kinerja Aparatur Daerah dan Pelayanan Publik dan Pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati 2013

4.2 Tema dan Prioritas Pembangunan Tahun 2014

a. Tema RKP Tahun 2014

Pemerintah menetapkan Tema Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Rancangan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Tahun 2014 adalah :

**“MEMANTAPKAN PEREKONOMIAN NASIONAL UNTUK PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG BERKEADILAN”.**

Untuk menjalankan agenda pembangunan nasional tersebut, maka ditetapkan 11 (sebelas) prioritas pembangunan nasional serta 3 (tiga) prioritas lainnya yaitu :

1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;
2. Pendidikan;
3. Kesehatan;
4. Penanggulangan Kemiskinan;
5. Ketahanan Pangan;
6. Infrastruktur;
7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha;
8. Energi;

9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana;
10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca-Konflik;
11. Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi;
12. Bidang Politik, Hukum dan Keamanan lainnya;
13. Bidang Perekonomian lainnya;
14. Bidang Kesejahteraan Rakyat lainnya.

Berdasarkan tema RKP 2014 serta mempertimbangkan kapasitas sumber daya yang dimiliki, fokus dari kegiatan 11 Prioritas Nasional dan 3 Prioritas lainnya ditekankan kepada penanganan isu-isu strategis sebagai berikut.

PENINGKATAN DAYA SAING

1. Peningkatan Iklim Investasi dan Usaha;
2. Percepatan Pembangunan Infrastruktur;
3. Peningkatan Pembangunan Industri di Berbagai Koridor Ekonomi;
4. Penciptaan Kesempatan Kerja khususnya Tenaga Kerja Muda;

PENINGKATAN DAYA TAHAN EKONOMI

5. Peningkatan Ketahanan Pangan: Menuju Pencapaian Surplus Beras 10 juta ton;
6. Peningkatan Rasio Elektrifikasi dan Konversi Energi;

PENINGKATAN DAN PERLUASAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

7. Peningkatan Pembangunan Sumberdaya Manusia;
8. Percepatan Pengurangan Kemiskinan : Sinergi Klaster 1-4;

PEMANTAPAN STABILITAS SOSPOL

9. Persiapan Pemilu 2014;
10. Perbaikan Kinerja Birokrasi dan Pemberantasan Korupsi;
11. Percepatan Pembangunan Minimum Essential Force.

Pada dasarnya sebelas Prioritas Nasional ditambah tiga Prioritas lainnya di atas merupakan upaya untuk : **Pertama, Peningkatan Daya Saing** (melalui Prioritas 7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha, Prioritas 6 Infrastruktur, Prioritas 11 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi, serta Prioritas 13 Bidang Perekonomian lainnya). **Kedua, Peningkatan Daya Tahan Ekonomi** (melalui Prioritas 5 Ketahanan Pangan dan Prioritas 8 Energi) **Ketiga, Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat** (melalui Prioritas 2 Pendidikan, Prioritas 3 Kesehatan, Prioritas 4 Penanggulangan Kemiskinan, Prioritas 9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan

Bencana serta Prioritas 14 Bidang Kesejahteraan Rakyat lainnya) **Keempat, Pemantapan Stabilitas Sospol** (melalui Prioritas 1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, Prioritas 12 Bidang Politik, Hukum dan Keamanan lainnya dan Prioritas 10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca-Konflik).

b. Tema RKPD Provinsi Banten Tahun 2014

Dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2014, menetapkan tema pembangunan sebagai berikut :

” MEMANTAPKAN PEREKONOMIAN BANTEN UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BANTEN YANG BERKEADILAN DAN MERATA”

Selanjutnya dalam rangka perwujudan Tema tersebut, pemerintah Provinsi Banten menetapkan 7 (tujuh) Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2014 yang dirumpunkan menurut Agenda Pembangunan Daerah sesuai dengan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Rancangan RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2012–2017, adalah sebagai berikut:

1. Infrastruktur wilayah dan kawasan;
2. Ketahanan pangan, kemiskinan dan pengangguran;
3. Peningkatan investasi dan unggulan daerah;
4. Pengembangan SDM dan penguatan sinergitas antar pelaku pembangunan;
5. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan;

Kelima Prioritas Pembangunan Daerah tersebut untuk menjawab isu-isu strategis: **Pertama**, kondisi infrastruktur wilayah/kawasan baik yang berstatus nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang sebagian besar masih dalam kondisi rusak dan mengganggu konektivitas serta akses layanan dasar masyarakat. **Kedua**, meningkatnya permintaan bahan pangan, menurunnya ketersediaan lahan produksi pangan, tingginya prosentase kemiskinan dan pengangguran yang mengakibatkan rendahnya daya beli dan kemampuan mengakses layanan pendidikan dan kesehatan. **Ketiga**, peningkatan investasi disertai peningkatan ekspor unggulan daerah guna percepatan dan perluasan pertumbuhan perekonomian mutlak. **Keempat**, rendahnya kapasitas dan daya saing sumber daya manusia dalam menghadapi tuntutan kebutuhan ketersediaan tenaga kerja terlatih, indeks kesehatan yang masih perlu ditingkatkan, masih adanya indikasi kecenderungan terjadinya konflik antar pelaku pembangunan dalam dinamika membangun Banten. **Kelima**, masih belum optimalnya kinerja birokrasi dalam pelayanan publik.

c. Tema dan Prioritas Pembangunan Tahun 2014

Memperhatikan dan mencermati isu-isu strategis tingkat global dan nasional serta regional juga mengacu kepada permasalahan pembangunan di Kabupaten Lebak, maka ditetapkan tema dan prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2014, sebagai berikut :

**” MEMANTAPKAN PEREKONOMIAN DAERAH
YANG DIDUKUNG OLEH INFRASTRUKTUR WILAYAH
UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG BERKEADILAN”.**

Maksud dari tema pembangunan daerah tersebut adalah untuk mengarahkan jalannya pembangunan infrastruktur yang memiliki daya dukung dan daya gerak terhadap percepatan pertumbuhan dan perluasan ekonomi yang berbasis potensi lokal untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Agar jalannya pembangunan mengarah kepada Tema RKPD 2014, maka ditetapkan 4 (empat) prioritas pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Pengembangan infrastruktur Wilayah, Penanganan Desa Tertinggal, dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Kebencanaan;
2. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan dan Kesehatan;
3. Peningkatan Ketahanan Pangan dan Pemberdayaan ekonomi Masyarakat serta Penanggulangan Kemiskinan;
4. Peningkatan Kinerja Aparatur dan Pemantapan Kualitas Demokrasi.

Diharapkan keempat prioritas pembangunan daerah tersebut dapat menjawab isu-isu strategis pembangunan daerah tahun 2014 sebagai berikut: **Pertama**, Peningkatan Ketersediaan dan Konektivitas Infrastruktur Wilayah (melalui Prioritas 1). **Kedua**, Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana (melalui Prioritas 1). **Ketiga**, Konsistensi Pelaksanaan penataan ruang (melalui Prioritas 2). **Keempat**, Peningkatan ketahanan pangan masyarakat (melalui Prioritas 3). **Kelima**, Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan lapangan kerja (melalui Prioritas 3). **Keenam**, Pengembangan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat (melalui Prioritas 3). **Ketujuh**, Peningkatan promosi dan kerjasama investasi (melalui Prioritas 3). **Kedelapan**, Pemerataan layanan pendidikan yang bermutu dan berdaya saing (melalui Prioritas 2). **Kesembilan**, Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat dan pengendalian pertumbuhan penduduk (melalui Prioritas 2). **Kesepuluh**, Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (melalui Prioritas 4). **Kesebelas**, Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden (melalui Prioritas 4).

Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional dan provinsi, maka prioritas pembangunan daerah Kabupaten Lebak pada RKPD tahun 2014, dikorelasikan serta disinergikan dengan prioritas pembangunan pada RKP dan RKPD Provinsi Banten.

Tabel 4.3
Korelasi Prioritas Pembangunan Pusat dan Daerah

No	Prioritas Pembangunan Nasional (RPJMN 2010 – 2015)	No	Program Prioritas Tahun Rencana (RPJMD 2009-2014)	No	Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD 2014)
1	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	1	Peningkatan kualitas dan akses pelayanan pendidikan, kesehatan, permukiman dan air bersih (P2,P3,P4,P6,P11)	1	Pengembangan infrastruktur Wilayah, Penanganan Desa Tertinggal, dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Kebencanaan (RPJMN: P6, P10, P9) (RPJMD: P3, P4)
2	Pendidikan	2	Pengembangan ekonomi lokal dan optimalisasi pengelolaan sumber daya alam (P5,P7,P8,P13,P14)	2	Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan dan Kesehatan (RPJMN: P2, P3,P11) (RPJMD: P1)
3	Kesehatan				
4	Penanggulangan Kemiskinan	3	Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur daerah guna mendorong mobilitas orang, barang ataupun jasa yang dapat mendukung implementasi ekonomi kerakyatan (P6,P10)	3	Peningkatan Ketahanan Pangan dan Pemberdayaan ekonomi Masyarakat serta Penanggulangan Kemiskinan (RPJMN: P4,P5,P7,P8,P13,P14) (RPJMD: P2)
5	Ketahanan Pangan				
6	Infrastruktur				
7	Iklim Investasi dan Iklim Usaha	4	Pengelolaan dan penataan ruang yang konsisten dan berkelanjutan (P9)	4	Peningkatan Kinerja Aparatur dan Pemantapan Kualitas Demokrasi (RPJMN: P1,P12) (RPJMD: P5)
8	Energi				
9	Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana	5	Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan serta mendorong partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek pembangunan dengan menjunjung tinggi demokrasi dan supremasi hukum (P1,P12)	4	
10	Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik				
11	Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi				
12	Bidang Politik, Hukum dan Keamanan				
13	Bidang Perekonomian				
14	Bidang Kesejahteraan Rakyat				

Selanjutnya keempat prioritas pembangunan daerah tersebut dijabarkan ke dalam 155 program pembangunan dengan rincian prioritas 1 mencakup 31 program, prioritas 2 mencakup 33 program, prioritas 3 mencakup 47 program dan prioritas 4 mencakup 44 program.

Ke 155 program pembangunan tahun 2014 tersebut akan dijalankan oleh 64 Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD). Daftar program pembangunan beserta masing-masing pagu indikatif sesuai dengan SKPD penanggungjawabnya tampak pada table 4.4.

Tabel 4.4
Penjelasan Program Pembangunan Daerah

No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM / PEMBANGUNAN	PAGU INDIKATIF	Kinerja		SKPD	
				Indikator	Target		
1	Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Penanganan Desa Tertinggal, dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Kebencanaan.	1	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	76,936,330,000			Bina Marga, CK, Bappeda
		2	Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan	11,200,000,000			Bina Marga
		3	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan	113,996,050,000			Bina Marga
		4	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	250,000,000			Dishub
		5	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	644,000,000			Dishub
		6	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	250,000,000			Dishub
		7	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	2,623,741,600			Dishub
		8	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	2,620,000,000			Dishub
		9	Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya	16,156,785,400			SDA
		10	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Air Lainnya	1,650,000,000			SDA
		11	Program Pengendalian Banjir	2,846,833,100			SDA
		12	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	4,220,000,000			SDA
		13	Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan	624,959,500			SDA
		14	Program Pelayanan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	6,998,449,250			Distamben
		15	Program Penelitian & Pengendalian Geologi dan Air Tanah	800,000,000			Distamben
		16	Program Pengembangan Perumahan	200,000,000			Cipta Karya
		17	Program Infrastruktur Skala Kawasan Permukiman	2,650,000,000			Cipta Karya
		18	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	5,618,500,000			Cipta Karya
		19	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	2,195,805,000			KPAB
		20	Program Penyiapan Potensi Sumber daya, Sarana dan Prasarana Daerah	200,000,000			BPMPPT
		21	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	3,688,987,000			Dinas Kebersihan, Cipta Karya
		22	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	3,955,250,000			Dinas Kebersihan
		23	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	300,000,000			Dinas Kebersihan
		24	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1,317,377,000			Dinas Kebersihan, Dinas Hutbun
		25	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	2,015,000,000			BPLH
		26	Program Perencanaan Tata Ruang	100,000,000			Bappeda
		27	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	300,000,000			Bappeda
		28	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	824,000,000			Setda, BPBD
		29	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	698,191,000			Hutbun
		30	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	1,245,359,000			Hutbun
		31	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	41,415,000			Hutbun
JUMLAH PRIORITAS 1			267,167,032,850				

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM / PEMBANGUNAN	PAGU INDIKATIF	Kinerja		SKPD PENANGGUNG JAWAB	
				Indikator	Target		
2	Peningkatan akses dan mutu pelayanan dasar bidang pendidikan dan kesehatan	1	Program Pendidikan Anak Usia Dini	6,700,992,928			Dinas Pendidikan
		2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	74,882,313,933			Dinas Pendidikan
		3	Program Pendidikan Menengah	23,530,865,137			Dinas Pendidikan
		4	Program Pendidikan Non Formal	2,978,517,965			Dinas Pendidikan, SETDA
		5	Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	1,806,458,224			Dinas Pendidikan
		6	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	230,000,000			Dinas Pendidikan, Arsip
		7	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	3,015,210,291			Dinas Pendidikan
		8	Program peningkatan Peran Serta Kepemudaan	875,000,000			Disporabudpar
		9	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah raga	5,325,000,000			Disporabudpar
		10	Program pengelolaan Keragaman Budaya	450,000,000			disdik
		11	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	700,000,000			Disporabudpar
		12	Program pengembangan nilai budaya	240,000,000			disdik
		13	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	36,030,664,000			Dinkes, RSUD
		14	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	57,616,745,000			Dinkes, RSUD
		15	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	3,113,500,000			Dinkes
		16	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	435,000,000			Dinkes
		17	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	610,000,000			Dinkes
		18	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	750,000,000			Dinkes
		19	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	100,000,000			Dinkes
		20	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	8,749,778,000			Dinkes
		21	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	90,000,000			Dinkes
		22	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	768,000,000			Dinkes
		23	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata	200,000,000			RSUD
		24	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata	1,100,000,000			RSUD
		25	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Komunitas Gizi dan Rumah Sakit	1,531,000,000			RSUD
		26	Program Promkes Ibu, Bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	215,600,000			BPPKB
		27	Program Keluarga Berencana	2,820,766,400			BPPKB
		28	Program Peningkatan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	28,000,000			BPPKB
		29	Program Pelayanan Kontrasepsi	786,867,700			BPPKB
		30	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	100,000,000			BPPKB
		31	Program Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak	100,000,000			BPPKB
		32	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan konseling KRR	228,000,000			BPPKB
		33	Program Peningkatan penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	82,500,000			BPPKB
JUMLAH PRIORITAS 2			236,190,779,577				

No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM / PEMBANGUNAN	PAGU INDIKATIF	Kinerja		SKPD PENANGGUNG JAWAB	
				Indikator	Target		
3	Peningkatan ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat serta penanggulangan kemiskinan	1	Program Penciptaan Iklim Usaha UKM Yang Kondusif	125,000,000			Dinas Koperasi
		2	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM	125,000,000			Dinas Koperasi
		3	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM	835,000,000			Dinas Koperasi
		4	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	595,000,000			Dinas Koperasi
		5	Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan	187,000,000			Hutbun
		6	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	797,600,000			Hutbun, Peternakan, BP4K
		7	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	5,783,880,500			Hutbun, Peternakan, Setda, Pertanian
		8	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	0			Hutbun
		9	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	2,110,618,500			Hutbun
		10	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	750,000,000			Disperindag
		11	Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	300,000,000			Disperindag
		12	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	675,000,000			Disperindag
		13	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	1,505,000,000			Disperindag
		14	Program Pemeliharaan, Peningkatan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana	4,160,000,000			Disperindag
		15	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	1,085,950,000			Peternakan
		16	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	675,000,000			Peternakan
		17	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	50,000,000			Peternakan
		18	Program Peningkatan Ketahanan Pangan dan Pengembangan Agribisnis	1,026,250,000			Peternakan
		19	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian	1,304,000,000			Pertanian
		20	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	1,582,000,000			DKP
		21	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	3,445,500,000			DKP
		22	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Ikan	400,000,000			DKP
		23	Program Perencanaan Pembangunan di Bidang Kelautan dan Perikanan	95,000,000			DKP
		24	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	1,115,000,000			Bappeda
		25	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	1,020,000,000			Setda, KPPT
		27	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	3,733,795,000			BP4K
		29	Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan	187,000,000			BP4K
		31	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	802,500,000			Setda, KPPT
		32	Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	507,275,700			Distamben
		33	Program Pemberdayan Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan	1,545,000,000			Cipta Karya
		34	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	13,721,500,000			BPMPD

	35	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan	2,325,000,000			BPMPD
	36	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan	300,000,000			BPMPD
	37	Program pengembangan pemasaran pariwisata	375,000,000			Disporabudpar
	38	Program Pengembangan Destinasi pariwisata	470,000,000			Disporabudpar
	39	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	1,350,000,000			Disnakersos
	40	Program Peningkatan kualitas dan produktivitas Tenaga Kerja	1,510,000,000			Disnakersos
	41	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	700,000,000			Disnakersos
	42	Program Transmigrasi Regional	275,000,000			Disnakersos
	43	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	743,750,000			Disnakersos
	44	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	1,952,000,000			Disnakersos
	45	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	7,500,000			Disnakersos
	46	Program Pembinaan EKS Penyandang Penyakit Sosial (Eks. Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial Lainnya).	22,000,000			Disnakersos
	47	Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	170,000,000			Disnakersos
JUMLAH PRIORITAS 3			60,445,119,700			

No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM / PEMBANGUNAN	PAGU INDIKATIF	Kinerja		SKPD PENANGGUNG JAWAB	
				Indikator	Target		
4	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemantapan Kualitas Demokrasi	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	64,604,560,901			Seluruh SKPD
		2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	12,806,742,698			Seluruh SKPD
		3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	100,000,000			Sekretariat Daerah
		4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	740,000,000			RSUD, Kantor Diklat, Dinas Perhubungan, Dinas Hutbun, BKD, Sekretariat DPRD, Kantor Arsip
		5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Palaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1,665,356,600			Seluruh SKPD
		6	Program Pengembangan Data/Informasi	535,000,000			Bappeda, Disperindag
		7	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	1,173,000,000			Bappeda
		8	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	750,000,000			Bappeda
		9	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	1,150,000,000			Sekretariat Daerah
		10	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	9,045,000,000			Sekretariat Daerah, Bappeda
		11	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	100,000,000			Sekretariat Daerah
		12	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	795,000,000			Satpol PP
		13	Program Pembina dan Peningkatan Stabilitas Keamanan	1,200,000,000			Satpol PP
		14	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	1,375,000,000			Sekretariat Daerah, Kantor Kesbangpol & Linmas
		15	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	950,000,000			Kantor Kesbangpol & Linmas
		16	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	200,000,000			Kantor Kesbangpol & Linmas
		17	Program Pendidikan Politik Masyarakat	970,000,000			Kantor Kesbangpol & Linmas
		18	Program Pemeliharaan Kantrabtimas dan Pencegahan Tindak Kriminal	350,000,000			Kantor Kesbangpol & Linmas
		19	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	5,400,000,000			Sekretariat DPRD
		20	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	321,000,000			Sekretariat Daerah
		21	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	5,215,000,000			Sekretariat Daerah, DPPKD
		22	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	100,000,000			BPMPD
		23	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1,632,500,000			Inspektorat Kabupaten
		24	Program Peningkatan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	225,000,000			Inspektorat Kabupaten
		25	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	100,000,000			Inspektorat Kabupaten
		26	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	75,000,000			Inspektorat Kabupaten
		27	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	1,435,000,000			Sekretariat Daerah, Setwan
		28	Program Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset Daerah serta Inventarisasi Subjek dan Objek Pajak	1,710,000,000			DPPKD
		29	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	100,000,000			BPMPD
		30	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	1,200,000,000			BKD
		31	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	3,207,000,000			BPMPD
		32	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	60,000,000			Kantor Arsip

33	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	100,000,000		Kantor Arsip
34	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	85,000,000		Kantor Arsip
35	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	500,000,000		Sekretariat Daerah
36	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	1,285,000,000		Sekretariat Daerah
37	Program Kerjasama Informasi Pembangunan Daerah	880,000,000		Sekretariat Daerah
38	Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	120,000,000		BPMPT
39	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Daerah	3,591,648,936		28 Kecamatan, Sekretariat DPRD, Setda
40	Program Penataan Administrasi Kependudukan	2,491,679,000		Disdukcapil, Kec. Gunungkencana
41	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	145,000,000		BPKB
42	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	300,000,000		BPKB
43	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	950,000,000		BPMPD
44	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	872,000,000		BPKB
JUMLAH PRIORITAS 4		130,610,488,135		
TOTAL (PRIORITAS 1 + PRIORITAS 2 + PRIORITAS 3 + PRIORITAS 4)		694,413,420,262.14		

BABV

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2013 yang dituangkan dalam Bab V ini merupakan formulasi dari rangkaian pembahasan substansi Program dan Kegiatan yang telah dilakukan pada Bab II sampai dengan Bab IV. Adapun penjabarannya disajikan dalam bentuk uraian (i) Rencana Program dan Kegiatan prioritas; dan (ii) Matrik Rencana Program dan Kegiatan. Program dan kegiatannya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009 – 2014.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka disusun rencana kerja yang dituangkan dalam matrik rencana kerja, yang berdasarkan urusan pemerintah daerah baik urusan wajib maupun pilihan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan.

Sedangkan rencana kerja non-target RPJMD merupakan rencana kerja penunjang yang dikategorikan bukan merupakan kegiatan prioritas pembangunan. Rencana kerja non-target RPJMD diarahkan untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung operasional dan peningkatan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

Kegiatan yang termasuk dalam lingkup non-target RPJMD adalah kegiatan tetap dan mengikat (*fixed cost*) dan kegiatan rutin (*regular cost*). Cakupan kegiatan tetap dan mengikat yaitu kegiatan yang harus dialokasikan oleh SKPD karena merupakan kebutuhan dasar untuk operasional dan penunjang kinerja. Sedangkan kegiatan rutin adalah kegiatan yang merupakan tugas fungsi SKPD dan bukan kegiatan unggulan namun akan berdampak luas apabila tidak dilaksanakan.

Isu permasalahan pembangunan Kabupaten Lebak yang begitu luas hakekatnya tidak mungkin diatasi dengan hanya mengandalkan sumber pendanaan APBD Kabupaten Lebak yang jumlahnya terbatas. Disamping itu, pada kenyataannya proses pembangunan yang berjalan selama ini sudah merupakan perwujudan dari dukungan seluruh peran pemangku kepentingan di Kabupaten Lebak, baik melalui pendanaan APBN, APBD provinsi, pihak swasta, bantuan luar negeri maupun swadaya masyarakat. Oleh karena itu sangat penting

untuk merekapitulasi dan memetakan seluruh sumber pendanaan pembangunan Kabupaten Lebak yang berasal dari luar APBD kabupaten. Kemudian diarahkan sesuai dengan prioritas pembangunan yang direncanakan, agar dapat berdayaguna dan berhasilguna secara optimal.

Sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, status kegiatan pada RKPD ini masih bersifat sementara dan dapat mengalami perbaikan sejalan dengan perkembangan proses perencanaan, kondisi pembangunan dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Lebak. Selengkapnya mengenai program dan kegiatan dari masing-masing SKPD tercantum pada matrik Rencana Kerja sebagai berikut :

B A B VI P E N U T U P

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lebak Tahun 2014 sesuai dengan fungsinya merupakan dokumen perencanaan teknis tahunan yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan yang bersifat indikatif. Bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Lebak, RKPD Tahun 2014 hendaknya dijadikan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD).

Dengan adanya dokumen RKPD Kabupaten Lebak Tahun 2014, diharapkan :

1. Seluruh SKPD dan seluruh pelaku pembangunan di Kabupaten Lebak, hendaknya berupaya semaksimal mungkin melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2014, secara sinergis dan terintegrasi.
2. Dalam rangka sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi serta integrasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, yang pendanaannya bersumber dari APBD, APBN dan sumber lainnya yang sah, maka setiap SKPD harus menyusun dan membuat Renja SKPD masing-masing, sebagai dasar pelaksanaan rencana kegiatan Tahun 2014.
3. Pada proses penyusunan RAPBD Tahun 2014, RKPD Tahun 2014 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-APBD) serta Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2014 yang disepakati bersama dengan DPRD Kabupaten Lebak.
4. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan, setiap SKPD wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RKPD Tahun 2014 sesuai dengan Tupoksi masing-masing dan melakukan koreksi seperlunya, serta melaporkan hasilnya secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati melalui Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Keuangan Sekretariat Daerah dan BAPPEDA Kabupaten Lebak.
5. Berkaitan dengan pendanaan dan pengawasan pembangunan, peran serta masyarakat dan dunia usaha perlu terus dikembangkan secara maksimal.

6. Dengan keterbatasan sumber keuangan daerah, maka keberhasilan pembangunan perlu didukung oleh peningkatan efektifitas peran pemerintah daerah sebagai pembuat kebijakan dan partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan.

Indikator keberhasilan pelaksanaan RKPD akan sangat tergantung kepada komitmen dan konsistensi para pelaku pembangunan sehingga seluruh sasaran program pembangunan yang telah ditetapkan bersama dapat tercapai.

BUPATI LEBAK,

MULYADI JAYABAYA

TABEL 3.1.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014
dan Prakiraan Maju Tahun 2015
Kabupaten Lebak

SKPD : DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2014						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015	
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif			Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
			Desa	Kecamatan		APBD II	APBD I	APBN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Urusan Wajib					124,462,638,139	14,250,000,000	22,360,000,000		162,821,553,083
1 20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian									
1 20 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					9,718,554,414				10,690,409,855
1 20 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tercapainya prosentase Jasa Surat Menyurat	Rangkasbitung	Rangkasbitung	100 %	540,629,501			100 %	594,692,451
1 20 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercapainya prosentase Jasa komunikasi, Air dan Listrik	Rangkasbitung	Rangkasbitung	100 %	42,992,302			100 %	47,291,532
1 20 01 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tercapainya prosentase kebutuhan kebutuhan	Rangkasbitung	Rangkasbitung	100 %	4,692,969,188			100 %	5,162,266,106
1 20 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tercapainya prosentase pemeliharaan dan perizinan	Rangkasbitung	Rangkasbitung	100 %	61,417,574			100 %	67,559,332
1 20 01 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tercapainya prosentase penyediaan jasa peralatan	Rangkasbitung	Rangkasbitung	100 %	1,708,524,188			100 %	1,879,376,607
1 20 01 10	Penyediaan alat tulis kantor	Tercapainya prosentase rata - rata keperluan ATK	Rangkasbitung	Rangkasbitung	100 %	122,835,149			100 %	135,118,664
1 20 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tercapainya prosentase kebutuhan	Rangkasbitung	Rangkasbitung	100 %	122,835,149			100 %	135,118,664
1 20 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tercapainya prosentase kebutuhan komponen instalasi	Rangkasbitung	Rangkasbitung	100 %	14,038,303			100 %	15,442,133
1 20 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tercapainya prosentase kebutuhan bahan bacaan	Rangkasbitung	Rangkasbitung	100 %	76,040,806			100 %	83,644,887
1 20 01 17	Penyediaan makanan dan minuman	Tercapainya prosentase penyelenggaraan rapat dinas	Rangkasbitung	Rangkasbitung	100 %	2,261,272,254			100 %	2,487,399,480
1 20 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tercapainya prosentase koordinasi dan konsultasi ke	Rangkasbitung	Rangkasbitung	100 %	75,000,000			100 %	82,500,000
1 20 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					204,725,248				225,197,773
1 20 02 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tercapainya sarana gedung kantor yang memadai	Rangkasbitung	Rangkasbitung	100 %	204,725,248			100 %	225,197,773
1 20 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					75,000,000				82,500,000
1 20 06 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar	Rangkasbitung	Rangkasbitung	100 %	75,000,000			100 %	82,500,000
1 06 21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya perencanaan pembangunan daerah yang efektif dan efisien				75,000,000				30,000,000
1 06 21 43	Penyusunan Renstra SKPD	Tersusunnya Renstra Dinas Pendidikan 20014-1019	Rangkasbitung	Rangkasbitung	1 Keg	50,000,000			1 Keg	
1 06 21 44	Penyusunan Renja SKPD	Tersusunnya Rencana Kerja Dinas Pendidikan 2015	Rangkasbitung	Rangkasbitung	1 Keg	25,000,000			1 Keg	30,000,000
1 01										
1 01 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Terselenggaranya Pendidikan Anak Usia Dini				6,700,992,928	3,880,000,000	3,720,000,000		7,239,092,221
1 01 15 41	Pembangunan Gedung PAUD	Terbangunnya gedung PAUD	87 Desa		87 Unit	4,544,000,000	2,280,000,000	3,720,000,000	96 Unit	4,866,400,000
			Desa Citepuseun	Cihara	1 Unit	120,000,000				
			Ciwaru	Bayah	1 Unit	120,000,000				
			Kp. Cinangka	Bayah	1 Unit	120,000,000				
			KP. Bungkeureuk	Bayah	1 Unit	-	120,000,000			
			Desa Cimacak	Bayah	1 Unit	-	120,000,000			
			Kp. Pulomanuk	Bayah	1 Unit	-	120,000,000			
			Desa Cilograng	Cilograng	1 Unit	-		120,000,000		
			Desa Cikamunding	Cilograng	1 Unit	-	120,000,000			
			Desa Girimukti	Cilograng	1 Unit	-		120,000,000		
			Desa Mekarjaya	Cijaku	1 Unit	-		120,000,000		
			Desa Hariang	Sobang	1 Unit	-	120,000,000			
			Desa Sukaresmi	Sobang	1 Unit	-	120,000,000			
			Desa Sukajaya	Sobang	1 Unit	-		120,000,000		
			Kp. Tajur, Ds. Malangsari	Cipanas	1 Unit	-		120,000,000		
			Ds. Haurgajug	Cipanas	1 Unit	-	120,000,000			
			Kp. Cipanas, Ds. Cipanas	Cipanas	1 Unit	-	120,000,000			
			Desa Banjaringasi	Lebakgedong	1 Unit	120,000,000				
			Desa Lebaksangka	Lebakgedong	1 Unit	120,000,000				
			Desa Lebaksitu	Lebakgedong	1 Unit	-	120,000,000			
			Desa Lebakgedong	Lebakgedong	1 Unit	-		120,000,000		
			Desa Banjarsari	Lebakgedong	1 Unit	-		120,000,000		
			Desa Cilangkap	Kalanganyar	1 Unit	-		120,000,000		
			Desa Kujangjaya RW 06	Cibeber	1 Unit	120,000,000				
			Desa Sukamulya Kp.	Cibeber	1 Unit	120,000,000				
			Desa cisungsang	Cibeber	1 Unit	120,000,000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Desa Sinargalih RT 06 RW	Cibeber	1 Unit	120,000,000				
			Desa Cikotok situ Mekar	Cibeber	1 Unit	120,000,000				
			Desa Cikotok, Pasimangka	Cibeber	1 Unit	120,000,000				
			Desa Kujangsari	Cibeber	1 Unit	120,000,000				
			Desa Warnasari	Cibeber	1 Unit	120,000,000				
			Desa Warnasari 01	Cibeber	1 Unit	120,000,000				
			Desa Warung Banten	Cibeber	1 Unit	104,000,000				
			Desa Neglasari, Cicaragub	Cibeber	1 Unit	120,000,000				
			Desa neglasari, Cilangkob	Cibeber	1 Unit	120,000,000				
			Desa Gunungwangun, RW	Cibeber	1 Unit	120,000,000				
			Desa Cihambali	Cibeber	1 Unit	120,000,000				
			Desa Cikadu	Cibeber	1 Unit	120,000,000				
			Kp. Sangiang Desa	Maja	1 Unit	120,000,000				
			Kp. Ciuber Desa	Maja	1 Unit	120,000,000				
			Kp. Tanjung Girang Desa	Maja	1 Unit	120,000,000				
			Desa Curugbadak	Maja	1 Unit	120,000,000				
			Kp. Cijureuweuk Desa	Maja	1 Unit	120,000,000				
			Kp. Rajab Desa	Maja	1 Unit	120,000,000				
			Perum Armedian Desa	Maja	1 Unit	120,000,000				
			Perum BMW Desa Maja	Maja	1 Unit	120,000,000				
			Desa Padasuka	Maja	1 Unit	120,000,000				
			Pasir Tanjung	Rangkasbitung	1 Unit	120,000,000				
			Cimanganten	Rangkasbitung	1 Unit	120,000,000				
			Desa Cikulur, Desa Sumur	Cikulur	1 Unit	120,000,000				
			Desa Banjarsari	Warunggunung	1 Unit	120,000,000				
			Desa Baros	Warunggunung	1 Unit	120,000,000				
			Desa Jagabaya	Warunggunung	1 Unit	120,000,000				
			Sindangsari	Warunggunung	1 Unit	120,000,000				
			Sukaraja	Warunggunung	1 Unit	120,000,000				
			Baros	Warunggunung	1 Unit	120,000,000				
			11 desa	Panggarangan	11 Unit	-		1,320,000,000		
			10 Desa	Cileles	10 Unit	-	1,200,000,000			
			12 Desa	Muncang	12 Unit	-		1,440,000,000		
						-				
1 01 15 70	Pengadaan Alat Praktik Peraga Siswa PAUD (sarpras)	Tersedianya alat praktik praga siswa PAUD	21 PAUD		21 Paket	800,000,000	880,000,000		23 Paket	880,000,000
			PAUD Mutiara Kencana	Gunungkencana	1 Paket	-	80,000,000			
			PAUD Pelita Kencana	Gunungkencana	1 Paket	80,000,000				
			TK Karya Kencana	Gunungkencana	1 Paket	80,000,000				
			Desa Nayagati	Leuwidamar	1 Paket	-	80,000,000			
			Desa Lebak parahiang	Leuwidamar	1 Paket	-	80,000,000			
			Desa Cibungur	Leuwidamar	1 Paket	80,000,000				
			1 desa	Lebakgedong	1 Paket	80,000,000				
			Desa Aweh	Kalanganyar	1 Paket	80,000,000				
			Paud Mutiara Bangsa	Banjarsari	1 Paket	80,000,000				
			Paud Himaku	Banjarsari	1 Paket	80,000,000				
			Paud Ar-Rosyid	Banjarsari	1 Paket	80,000,000				
			Paud Al-Ikhlas	Banjarsari	1 Paket	80,000,000				
			Paud Al-Ikhlas	Banjarsari	1 Paket	80,000,000				
			Paud Paud Cisampih	Banjarsari	1 Paket	-	80,000,000			
			Paud Tunas Harapan	Banjarsari	1 Paket	-	80,000,000			
			Paud Harapan Bangsa	Banjarsari	1 Paket	-	80,000,000			
			Paud Tunasari	Banjarsari	1 Paket	-	80,000,000			
			Paud Tunas Karya	Banjarsari	1 Paket	-	80,000,000			
			Paud Kertayuda	Banjarsari	1 Paket	-	80,000,000			
			Paud Al-Anhar	Banjarsari	1 Paket	-	80,000,000			
			Paud Bintang Harapan	Banjarsari	1 Paket	-	80,000,000			
1 01 15	Pembangunan TK	Terbanggunnya Gedung Taman Kanak-Kanak	10 Desa di 2 Kecamatan		14 unit	960,000,000	720,000,000		18 unit	1,056,000,000
			4 desa	Cileles	4 Unit	480,000,000				
			Desa Paja Kec. Sajira	Sajira	2 Unit	240,000,000				
			Desa Margaluyu	Sajira	1 Unit	120,000,000				
			Kp.Hegarmahan Rt.05/02	Sajira	1 Unit	120,000,000				
			Kp.Ciomas dan Kp.Bubur	Sajira	2 Unit	-	240,000,000			
			Kp.Sawah dan Kp.Teras	Sajira	2 Unit	-	240,000,000			
			Desa Paja	Sajira	2 Unit	-	240,000,000			
						-				
1 01 15 65	Hari anak Nasional / Publikasi PAUD	Terselenggaranya Hari Aank Nasional	Rangkasbitung	Rangkasbitung	1 Keg	55,000,000			1 Keg	60,500,000
1 01 15 65	Sosialisasi PAUD	Terselenggaranya Sosialisasi PAUD	Rangkasbitung	Rangkasbitung	1 Keg	50,000,000			1 Keg	55,000,000
1 01 15 62	Workshop Peningkatan bagi Penyelenggara PAUD	Terselenggaranya Workshop Peningkatan Mutu Penyelenggara PAUD	Rangkasbitung	Rangkasbitung	1 Keg	75,000,000			1 Keg	82,500,000
1 01 15 57	Diklat Tenaga Pendidikan PAUD	Terselenggaranya Diklat Tenaga Pendidikan PAUD	Rangkasbitung	Rangkasbitung	1 Keg	100,000,000			1 Keg	110,000,000
1 01 15 69	Seleksi & Pembinaan Siswa berprestasi TK/PAUD	Terselenggaranya Seleksi dan Pembinaan Siswa Berprestasi TK/PAUD	Rangkasbitung	Rangkasbitung	1 Keg	58,500,000			1 Keg	64,350,000
1 01 15 69	Lomba Kreativitas & Kompetensi Siswa TK dan PAUD	Terselenggaranya Lomba Kreativitas & Kompetensi Siswa TK dan PAUD	Rangkasbitung	Rangkasbitung	1 Keg	58,492,928			1 Keg	64,342,221
1 01 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Terselenggaranya wajib belajar pendidikan dasar				74,882,313,933	8,870,000,000	17,140,000,000		105,503,645,326
1 01 16 03	Penambahan Ruang Kelas Baru SD	Terbanggunnya Ruang Kelas Baru SD	Tersebar di 107 SD		241 RKB	15,420,000,000	5,170,000,000	6,490,000,000	253 RKB	29,221,500,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			SDN 1 Rahong	Malingping	2 RKB	-		220,000,000		
			SDN 3 Bolang	Malingping	3 RKB	-		330,000,000		
			SDN 2 Kadujajar	Malingping	1 RKB	-		110,000,000		
			SDN 3 Kadujajar	Malingping	3 RKB	330,000,000				
			SDN 2 Kersaratu	Malingping	3 RKB	330,000,000				
			SDN 2 Pagelaran	Malingping	1 RKB	110,000,000				
			SDN 2 Cilangkahan	Malingping	2 RKB	-	220,000,000			
			SDN 1 Cipeucang	Wanasalam	2 RKB	-	220,000,000			
			SDN 1 Parungpanjang	Wanasalam	1 RKB	110,000,000				
			SDN 2 Parungpanjang	Wanasalam	4 RKB	440,000,000				
			SDN 1 Katapang	Wanasalam	2 RKB	220,000,000				
			SDN 1 Muara	Wanasalam	4 RKB	440,000,000				
			SDN 5 Mekarjaya	Panggarangan	3 RKB	300,000,000				
			SDN 1 Situregen	Panggarangan	6 RKB	660,000,000				
			SDN 3 Jatake	Panggarangan	3 RKB	330,000,000				
			SDN 2 Bayah	Bayah	1 RKB	110,000,000				
			SDN 3 Bayah Barat	Bayah	1 RKB	110,000,000				
			SDN 4 Bayah	Bayah	2 RKB	220,000,000				
			SDN 1 Bayah Timur	Bayah	1 RKB	110,000,000				
			SDN 1 Cimancak	Bayah	2 RKB	220,000,000				
			SDN 2 Cimancak	Bayah	1 RKB	110,000,000				
			SDN 4 Cimancak	Bayah	2 RKB	-		220,000,000		
			SDN 3 Cisireun	Bayah	2 RKB	-		220,000,000		
			SDN 1 Pasir Gembong	Bayah	3 RKB	-		330,000,000		
			SDN 2 Cidikit	Bayah	1 RKB	-		110,000,000		
			SDN 3 Cidikit	Bayah	1 RKB	110,000,000				
			SDN 5 Cidikit	Bayah	2 RKB	220,000,000				
			SDN 1 sawarna	Bayah	3 RKB	330,000,000				
			SDN 1 Pamubulan	Bayah	1 RKB	-	110,000,000			
			SDN 1 Pamubulan	Bayah	2 RKB	-	220,000,000			
			SDN 1 Sawarna Timur	Bayah	2 RKB	-	220,000,000			
			SDN Gunungbatu	Cilograng	3 RKB	-	330,000,000			
			SDN 1 Girimukti	Cilograng	2 RKB	-	220,000,000			
			SDN 2 Girimukti	Cilograng	4 RKB	-	440,000,000			
			SDN 1 Cilograng	Cilograng	2 RKB	-	220,000,000			
			SD Cibeureum	Cijaku	3 RKB	330,000,000				
			SD Kapunduhan	Cijaku	3 RKB	330,000,000				
			SD Sukasenang	Cijaku	3 RKB	330,000,000				
			SD Cimenga	Cijaku	3 RKB	330,000,000				
			SDN 2 Cikadongdong	Cigembong	1 RKB	-		110,000,000		
			SDN 1 Cikadongdong	Cigembong	1 RKB	-		110,000,000		
			SDN Mugijaya/ Cibuluh	Cigembong	1 RKB	-		110,000,000		
			RKB SDN 1	Gunungkencana	3 RKB	330,000,000				
			RKB SDN 2 Cimanyangray	Gunungkencana	2 RKB	220,000,000				
			RKB SDN 1 Ciakar	Gunungkencana	1 RKB	110,000,000				
			RKB SDN 3 Ciakar	Gunungkencana	1 RKB	110,000,000				
			RKB SDN 3 Cicaringin	Gunungkencana	4 RKB	-	440,000,000			
			RKB SDN 2 Ciginggang	Gunungkencana	3 RKB	-	330,000,000			
			RKB SDN 4 Kramatjaya	Gunungkencana	3 RKB	-	330,000,000			
			RKB SDN 5 Kramatjaya	Gunungkencana	3 RKB	-	330,000,000			
			RKB SDN 1	Gunungkencana	3 RKB	-		330,000,000		
			RKB SDN 2 Bulakan	Gunungkencana	2 RKB	-		220,000,000		
			RKB SDN 1 Tarjungsari	Gunungkencana	2 RKB	-		220,000,000		
			SDN 3 Parakanlima	Cirinten	3 RKB	-		330,000,000		
			SDN 4 Cirinten	Cirinten	3 RKB	-		330,000,000		
			SDN Margamulya	Cileles	2 RKB	220,000,000				
			SDN Cipadang	Cileles	2 RKB	220,000,000				
			SDN Pasindangan	Cileles	2 RKB	220,000,000				
			SDN Gumuruh	Cileles	2 RKB	220,000,000				
			SDN Cipadang	Cileles	1 RKB	110,000,000				
			SDN 2 Sangkanwangi	Leuwidamar	3 RKB	-		330,000,000		
			SDN I Banjariqasi	Lebakgedong	1 RKB	-		110,000,000		
			SDN II Banjariqasi	Lebakgedong	1 RKB	-		110,000,000		
			SDN 2 Lebakgedong	Lebakgedong	3 RKB	-	330,000,000			
			SDN 2 Lebaksitu	Lebakgedong	3 RKB	-	330,000,000			
			SDN 2 Banjarsari	Lebakgedong	3 RKB	330,000,000				
			SDN Margaluyu 1	Sajira	2 RKB	220,000,000				
			SDN Margaluyu 2	Sajira	2 RKB	220,000,000				
			SDN Margaluyu 3	Sajira	2 RKB	220,000,000				
			SDN Parungsari 1	Sajira	2 RKB	-		220,000,000		
			SDN Parungsari 2	Sajira	2 RKB	-		220,000,000		
			SDN 2 Sangiangjaya	Cimarga	3 RKB	270,000,000				
			SDN 3 Sangiangjaya	Cimarga	3 RKB	330,000,000				
			SDN 3 Tambakbaya	Cibadak	2 RKB	220,000,000				
			SDN 2 Kaduagung Barat	Cibadak	2 RKB	220,000,000				
			SDN 1 Malabar	Cibadak	2 RKB	220,000,000				
			SDN 2 Tambakbaya	Cibadak	2 RKB	-	220,000,000			
			SDN 2 Bojongleles	Cibadak	2 RKB	-	220,000,000			
			SDN 2 Candi Kp. Cisarua	Curugbitung	4 RKB	440,000,000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			SDN 1 Guradog Ds.	Curugbitung	1 RKB	110,000,000						
			1. SDN 2 Mekarwangi	Muncang	2 RKB	-		220,000,000				
			2. SDN 2 Cikarang	Muncang	2 RKB	-		220,000,000				
			3. SDN 2 Tanjungwangi	Muncang	3 RKB	-		330,000,000				
			4. SDN 1 Girijagabaya	Muncang	3 RKB	-		330,000,000				
			5. SDN 2 Jagaraksa	Muncang	2 RKB	-		220,000,000				
			6. SDN 1 Pasimangka	Muncang	3 RKB	-		330,000,000				
			7. SDN 1 Leuwicoo	Muncang	5 RKB	550,000,000						
			8. SDN 1 Ciminyak	Muncang	3 RKB	330,000,000						
			9. SDN 1 Tanjungwangi	Muncang	3 RKB	330,000,000						
			10. SDN 2 Muncang	Muncang	2 RKB	220,000,000						
			11. SDN 1 Sindangwangi	Muncang	2 RKB	220,000,000						
			SDN 1 Kubangjaya	Cibeber	1 RKB	110,000,000						
			SDN 2 Kujang Jaya	Cibeber	1 RKB	110,000,000						
			SD Wanasari 1	Cibeber	3 RKB	330,000,000						
			SD 2 Warung Banten	Cibeber	2 RKB	-		220,000,000				
			SD 2 Neglasari	Cibeber	2 RKB	-		220,000,000				
			SD 1 Citorek timur Kp	Cibeber	1 RKB	-		110,000,000				
			SDN 1 Curugbadak	Maja	3 RKB	330,000,000						
			SDN 1 Sangiang	Maja	3 RKB	330,000,000						
			SDN Komp.Sunan Giri .	Rangkasbitung	5 RKB	550,000,000						
			SDN 1 Kerta	Banjarsari	1 RKB	110,000,000						
			SDN 1 Kaduhauk	Banjarsari	1 RKB	110,000,000						
			SDN 2 Pasirtangkil	Warunggunung	2 RKB	220,000,000						
			SDN 2 Selaraja	Warunggunung	2 RKB	220,000,000						
			SDN 1 Sukarendah	Warunggunung	2 RKB	-		220,000,000				
			SDN 2 Banjarsari	Warunggunung	1 RKB	-		110,000,000				
			SDN 1 Baros	Warunggunung	1 RKB	-		110,000,000				
			SDN 2 Lebakpeundeuy	Cihara	3 RKB	330,000,000						
			SDN 3 Mekarsari	Cihara	3 RKB	330,000,000						
						-						
1	01	16	44	Rehabilitasi Sekolah SD	Tersedianya ruang kelas SD yang layak	Terdiri dari 139 SD	364 Lokal	11,800,000,000	2,050,000,000	5,800,000,000	300 Lokal	15,750,000,000
						SDN 1 Kersatu	Malingping	3 Lokal	-	150,000,000		
						SDN 1 Paqelaran	Malingping	3 Lokal	-	150,000,000		
						SDN Malingping	Malingping	3 Lokal	-	150,000,000		
						SDN 2 Sumberwaras	Malingping	3 Lokal	-	150,000,000		
						SDN 2 Sukaraja	Malingping	3 Lokal	-	150,000,000		
						SDN 2 Cipeundeuy	Malingping	3 Lokal	150,000,000			
						SDN 4 Malingping Utara	Malingping	4 Lokal	200,000,000			
						SDN 1 Senanghati	Malingping	1 Lokal	50,000,000			
						SDN 3 Malingping Utara	Malingping	3 Lokal	150,000,000			
						SDN 3 Wanasalam	Wanasalam	4 Lokal	200,000,000			
						SDN 1 Citangkap	Wanasalam	3 Lokal	150,000,000			
						SDN 1 Karangpamidangan	Wanasalam	3 Lokal	150,000,000			
						SDN 1 Katapang	Wanasalam	3 Lokal	150,000,000			
						SDN 2 Katapang	Wanasalam	4 Lokal	200,000,000			
						SDN 1 Parungsari	Wanasalam	3 Lokal	150,000,000			
						SDN 2 Parungsari	Wanasalam	4 Lokal	-	200,000,000		
						SDN 1 Cisarap	Wanasalam	3 Lokal	-	150,000,000		
						SDN 3 Cipedang	Wanasalam	4 Lokal	-	200,000,000		
						SDN 1 Bejod	Wanasalam	3 Lokal	-	150,000,000		
						SDN 3 Bejod	Wanasalam	3 Lokal	-	150,000,000		
						SDN 2 Muara	Wanasalam	4 Lokal	200,000,000			
						SDN 3 Muara	Wanasalam	4 Lokal	200,000,000			
						SDN 1 Wanasalam	Wanasalam	2 Lokal	100,000,000			
						SDN 1 Sukatani	Wanasalam	4 Lokal	200,000,000			
						SDN 2 Situregen	Panggarangan	1 Lokal	50,000,000			
						SDN 3 Gununggede	Panggarangan	3 Lokal	150,000,000			
						SDN 2 Sindangratu	Panggarangan	4 Lokal	200,000,000			
						SDN 3 Situregen	Panggarangan	4 Lokal	-	200,000,000		
						SDN 2 Cibarengkok	Panggarangan	3 Lokal	-	150,000,000		
						SDN 1 Cimandiri	Panggarangan	4 Lokal	200,000,000			
						SDN 3 Sindangratu	Panggarangan	3 Lokal	150,000,000			
						SDN 2 Mekarjaya	Panggarangan	3 Lokal	150,000,000			
						SDN 3 Mekarjaya	Panggarangan	3 Lokal	-	150,000,000		
						SDN 1 Cibarengkok	Panggarangan	3 Lokal	-	150,000,000		
						SDN 1 Panyaungan	Cihara	3 Lokal	150,000,000			
						SD Cibeureum	Cijaku	3 Lokal	150,000,000			
						SDN Cigemblong/ Cisareat	Cigemblong	1 Lokal	50,000,000			
						SDN 2 Kadurahayu	Bojongmanik	4 Lokal	200,000,000			
						SDN 2 Bojongmanik	Bojongmanik	4 Lokal	200,000,000			
						SDN 1 Harjawana	Bojongmanik	4 Lokal	-	200,000,000		
						SDN 1 Cimayang	Bojongmanik	3 Lokal	-	150,000,000		
						SDN 1 Parakan Beusi	Bojongmanik	3 Lokal	150,000,000			
						SDN Kebon Cau	Bojongmanik	4 Lokal	200,000,000			
						SDN 1 Karangnunggal	Cinnten	4 Lokal	-	200,000,000		
						SDN 2 Cempaka	Cinnten	3 Lokal	-	150,000,000		
						SDN 2 Badur	Cinnten	4 Lokal	-	200,000,000		
						SDN 1 Badur	Cinnten	3 Lokal	150,000,000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			SDN 1 Karoya	Cirinten	3 Lokal	150,000,000				
			SDN 1 Nangerang	Cirinten	4 Lokal	200,000,000				
			SDN 1 Sangkanwangi	Leuwidamar	4 Lokal	-		200,000,000		
			SDN 1 Cibungur	Leuwidamar	3 Lokal	-		150,000,000		
			SDN 1 Wantsari	Leuwidamar	3 Lokal	-		150,000,000		
			SDN 2 Jalupangmulya	Leuwidamar	4 Lokal	-		200,000,000		
			SDN 2 Leuwidamar	Leuwidamar	4 Lokal	-		200,000,000		
			SDN 2 Lebakparahiang	Leuwidamar	3 Lokal	-		150,000,000		
			SDN 1 Bojongmenteng	Leuwidamar	4 Lokal	-		200,000,000		
			SDN 1 Nayagati	Leuwidamar	3 Lokal	150,000,000				
			SDN 2 Cisimeut	Leuwidamar	6 Lokal	300,000,000				
			SDN 1 Jalupangmulya	Leuwidamar	3 Lokal	150,000,000				
			SDN 1 Cisimeut	Leuwidamar	4 Lokal	200,000,000				
			SDN 1 Leuwidamar	Leuwidamar	3 Lokal	150,000,000				
			SDN 2 Nayagati	Leuwidamar	2 Lokal	100,000,000				
			SDN 2 Bojongmenteng	Leuwidamar	2 Lokal	100,000,000				
			SD Sukajaya 1, Desa	Sobang	3 Lokal	150,000,000				
			SD Calungbungur 1	Sajira	1 Lokal	50,000,000				
			SDN 1 Bojongleles	Cibadak	2 Lokal	-		100,000,000		
			SDN 1 Tambakbaya	Cibadak	2 Lokal	-		100,000,000		
			SDN 2 Cisangu	Cibadak	2 Lokal	-		100,000,000		
			SDN 3 Kaduagung Timur	Cibadak	2 Lokal	-		100,000,000		
			SDN 1 Panancangan	Cibadak	2 Lokal	-		100,000,000		
			SDN 1 Cisangu	Cibadak	2 Lokal	100,000,000				
			SDN 2 Cibadak	Cibadak	2 Lokal	100,000,000				
			SDN 1 Mekar Agung Kec.	Cibadak	2 Lokal	100,000,000				
			SDN 1 Cibadak Kec.	Cibadak	2 Lokal	100,000,000				
			SDN 1 Pasarkeong Kec.	Cibadak	2 Lokal	100,000,000				
			SDN 2 Sangiangtanjung	Kalanganyar	1 Lokal	50,000,000				
			SDN 1 Pasirkupa	Kalanganyar	1 Lokal	50,000,000				
			SDN 1 Sukamekarsari	Kalanganyar	1 Lokal	50,000,000				
			SDN 3 Aweh	Kalanganyar	1 Lokal	50,000,000				
			SDN 1 Sangiangtanjung	Kalanganyar	1 Lokal	50,000,000				
			SDN 2 Aweh	Kalanganyar	1 Lokal	50,000,000				
			SDN 1 Aweh	Kalanganyar	1 Lokal	50,000,000				
			SDN 1 Mayak Desa Mayak	Curugbitung	1 Lokal	50,000,000				
			SDN 1 Curugbitung	Curugbitung	3 Lokal	150,000,000				
			SDN 2 Curugbitung	Curugbitung	3 Lokal	150,000,000				
			1. SDN 1 Muncang	Muncang	2 Lokal	100,000,000				
			2. SDN 2 Mekarwagi	Muncang	2 Lokal	-	100,000,000			
			3. SDN 1 Pasimangka	Muncang	2 Lokal	-	100,000,000			
			4. SDN 2 Muncang	Muncang	2 Lokal	100,000,000				
			5. SDN 2 Sukanegara	Muncang	2 Lokal	100,000,000				
			6. SDN 1 Mekarwangi	Muncang	2 Lokal	100,000,000				
			SD 1 Cikadu	Cibeber	1 Lokal	-	50,000,000			
			SD 2 Cikadu	Cibeber	3 Lokal	-	150,000,000			
			SD 2 Wanasari	Cibeber	2 Lokal	-	100,000,000			
			SD Cicurug	Cibeber	3 Lokal	-	150,000,000			
			SD 1 Situmulya	Cibeber	2 Lokal	-	100,000,000			
			Rehab SD 1 Kp. Warung	Cibeber	1 Lokal	50,000,000				
			Rehab SD 2 Kp. Warung	Cibeber	1 Lokal	50,000,000				
			SDN 1 Hegarmanah	Cibeber	1 Lokal	50,000,000				
			SDN 1 Binong	Maja	3 Lokal	-		150,000,000		
			SDN 1 Sindangmulya	Maja	4 Lokal	-		200,000,000		
			SDN 1 Tanjung Sari	Maja	4 Lokal	-		200,000,000		
			SDN 1 Pasirkecapi	Maja	3 Lokal	-		150,000,000		
			SDN 1 Maja Baru	Maja	3 Lokal	-		150,000,000		
			SDN 1 Curugbadak	Maja	3 Lokal	150,000,000				
			SDN 2 Curugbadak	Maja	4 Lokal	200,000,000				
			SDN 2 Maja, Maja	Maja	5 Lokal	250,000,000				
			SDN 4 Maja, Maja	Maja	4 Lokal	200,000,000				
			SDN 1 Padasuka	Maja	4 Lokal	200,000,000				
			SDN 1 Mekarsari	Maja	4 Lokal	200,000,000				
			SDN 1 Maja	Maja	3 Lokal	-	150,000,000			
			SDN 3 Maja	Maja	4 Lokal	-	200,000,000			
			SDN 2 Gb, Cibeureum	Maja	2 Lokal	-	100,000,000			
			SDN 1 Rangkasbitung Timur	Rangkasbitung	1 Lokal	50,000,000				
			SDN 2 Rangkasbitung	Rangkasbitung	1 Lokal	50,000,000				
			SDN 3 Pabuaran	Rangkasbitung	1 Lokal	50,000,000				
			SDN 3 Mekarsari	Rangkasbitung	1 Lokal	50,000,000				
			SDN 2 Cijoro Pasir	Rangkasbitung	1 Lokal	50,000,000				
			SDN 3 Cijoro Pasir	Rangkasbitung	1 Lokal	50,000,000				
			SDN 5 Cijoro Pasir	Rangkasbitung	1 Lokal	50,000,000				
			SDN 2 Sukamanah	Rangkasbitung	1 Lokal	-		50,000,000		
			SDN 2 Kolelet Wetan	Rangkasbitung	1 Lokal	-		50,000,000		
			SDN 4 Cijoro Lebak	Rangkasbitung	1 Lokal	-		50,000,000		
			SDN 1 Pasirtanjung	Rangkasbitung	1 Lokal	-		50,000,000		
			SDN 1 Pabuaran	Rangkasbitung	1 Lokal	-		50,000,000		
			SDN 2 Pabuaran	Rangkasbitung	1 Lokal	-		50,000,000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			SDN 1 Citeras	Rangkasbitung	1 Lokal	-		50,000,000		
			SDN 1 Cimangenteung	Rangkasbitung	1 Lokal	-		50,000,000		
			SDN 2 Narneng	Rangkasbitung	1 Lokal	-		50,000,000		
			SDN 2 Kerta	Banjarsari	3 Lokal	150,000,000				
			SDN 3 Kerta	Banjarsari	3 Lokal	150,000,000				
			SDN 1 Umbujaya	Banjarsari	3 Lokal	150,000,000				
			SDN 1 Gunungsari	Banjarsari	3 Lokal	150,000,000				
			SDN 3 Keusik	Banjarsari	3 Lokal	-		150,000,000		
			SDN 3 Tamansari	Banjarsari	3 Lokal	-		150,000,000		
			SDN 2 Kaduhauk	Banjarsari	3 Lokal	-		150,000,000		
			SDN 3 Padasuka	Warunggunung	1 Lokal	50,000,000				
			SDN 2 Padasuka	Warunggunung	3 Lokal	150,000,000				
			SDN 2 Warunggunung	Warunggunung	3 Lokal	150,000,000				
			4 Sekolah	Lebakgedong	12 Lokal	600,000,000				
			SDN 1 Panyaungan	Cihara	3 Lokal	150,000,000				
			SDN 2 Karangkamulyan	Cihara	3 Lokal	150,000,000				
			SDN 3 Karangkamulyan	Cihara	3 Lokal	150,000,000				
			SDN 1 Mekarsari	Cihara	3 Lokal	150,000,000				
			SDN 2 Mekarsari	Cihara	2 Lokal	100,000,000				
			SDN 1 Pondokpanjang	Cihara	3 Lokal	150,000,000				
1 01 16 12	Pembangunan Perpustakaan SD	Terbanqunnya Perpustakaan SD	Terdiri dari 95 SD		99 Unit	5,390,000,000	1,650,000,000	3,850,000,000	105 Unit	12,127,500,000
			SDN 1 Rahong	Malingping	1 Unit	-		110,000,000		
			SDN 2 Kadujajar	Malingping	1 Unit	-		110,000,000		
			SDN 3 Kadujajar	Malingping	1 Unit	-		110,000,000		
			SDN 2 Kersaratu	Malingping	1 Unit	-		110,000,000		
			SDN 2 Pagelaran	Malingping	1 Unit	-		110,000,000		
			SDN 4 Pagelaran	Malingping	1 Unit	-		110,000,000		
			SDN 2 Sumbenwaras	Malingping	1 Unit	110,000,000				
			SDN 2 Cipeundeuy	Malingping	1 Unit	110,000,000				
			SDN 2 Cilangkahan	Malingping	1 Unit	110,000,000				
			SDN 4 Malingping Utara	Malingping	1 Unit	-	110,000,000			
			SDN 2 Malingping Selatan	Malingping	1 Unit	-	110,000,000			
			SDN 3 Malingping Utara	Malingping	1 Unit	-	110,000,000			
			SDN 1 Cikeusik	Wanasalam	1 Unit	-	110,000,000			
			SDN 2 Bejod	Wanasalam	1 Unit	-	110,000,000			
			SDN 3 Wanasalam	Wanasalam	1 Unit	-	110,000,000			
			SDN 1 Cipedang	Wanasalam	1 Unit	110,000,000				
			SDN 2 Muara	Wanasalam	1 Unit	110,000,000				
			SDN 3 Muara	Wanasalam	1 Unit	110,000,000				
			SDN 1 Parungsari	Wanasalam	1 Unit	110,000,000				
			SDN 2 Parungsari	Wanasalam	1 Unit	-		110,000,000		
			SDN 1 Cipeucang	Wanasalam	1 Unit	-		110,000,000		
			SDN 2 Parungpanjang	Wanasalam	1 Unit	-		110,000,000		
			SDN 3 Parungpanjang	Wanasalam	1 Unit	-		110,000,000		
			SDN 1 Katapang	Wanasalam	1 Unit	-		110,000,000		
			SDN 1 Cilangkap	Wanasalam	1 Unit	-		110,000,000		
			SDN 2 Situregen	Panggarangan	1 Unit	110,000,000				
			SDN 3 Sukajadi	Panggarangan	1 Unit	-		110,000,000		
			SDN 2 Mekarjaya	Panggarangan	1 Unit	-		110,000,000		
			SDN 3 Mekarjaya	Panggarangan	1 Unit	-		110,000,000		
			SDN 2 Cibarengkok	Panggarangan	1 Unit	-		110,000,000		
			SDN 1 Sogong	Panggarangan	1 Unit	110,000,000				
			SDN 3 Cimandiri	Panggarangan	1 Unit	110,000,000				
			SDN 2 Sogong	Panggarangan	1 Unit	110,000,000				
			SDN 3 Gununggede	Panggarangan	1 Unit	110,000,000				
			SDN 1 Citepuseun	Cihara	1 Unit	110,000,000				
			SDN 1 Cisireun	Bayah	1 Unit	-		110,000,000		
			SDN 2 Suwakan	Bayah	1 Unit	-		110,000,000		
			SDN 1 Darmasari	Bayah	1 Unit	-		110,000,000		
			SDN 2 Darmasari	Bayah	1 Unit	110,000,000				
			Darmasari	Bayah	1 Unit	110,000,000				
			Pasir Gombang	Bayah	1 Unit	110,000,000				
			SDN Cibareno Kec.	Cilograng	1 Unit	110,000,000				
			SDN Cireundeuy Kec.	Cilograng	1 Unit	110,000,000				
			SDN Cikamunding Kec.	Cilograng	1 Unit	110,000,000				
			Kec. Bojongmanik	Bojongmanik	1 Unit	-	110,000,000			
			SDN 2 Badur	Cirinten	1 Unit	-	110,000,000			
			SDN 1 Badur	Cirinten	1 Unit	-	110,000,000			
			SDN 2 Lebakgedong	Lebakgedong	1 Unit	-	110,000,000			
			SDN 1 Banjarsari	Lebakgedong	1 Unit	-	110,000,000			
			SDN 2 Banjarsari	Lebakgedong	1 Unit	110,000,000				
			SDN 2 Lebaksangka	Lebakgedong	1 Unit	110,000,000				
			SDN 3 Lebaksitu	Lebakgedong	1 Unit	110,000,000				
			SDN 1 Ciminyak	Muncang	1 Unit	110,000,000				
			SDN 2 Cikarang	Muncang	1 Unit	110,000,000				
			SDN 2 Mekarwangi	Muncang	1 Unit	110,000,000				
			SDN 1 Jaqaraksa	Muncang	1 Unit	-		110,000,000		
			SDN 1 Tanjungwangi	Muncang	1 Unit	-		110,000,000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			SDN 1 Cibeber	Cibeber	3 Unit	330,000,000				
			SDN 2 Cibeber	Cibeber	3 Unit	330,000,000				
			SDN 1 Neglasari	Cibeber	1 Unit	110,000,000				
			SDN 1 Tanjung Sari	Maja	1 Unit	110,000,000				
			SDN 1 Pasirkecapi	Maja	1 Unit	110,000,000				
			SDN 2 Curugbadak	Maja	1 Unit	110,000,000				
			SDN 1 Padasuka	Maja	1 Unit	-		110,000,000		
			SDN 2 Cilangkap	Maja	1 Unit	-		110,000,000		
			SDN 2 Sangiang	Maja	1 Unit	-		110,000,000		
			SDN 1 Buyut Mekar	Maja	1 Unit	110,000,000				
			SDN 1 Gb. Ciberueum	Maja	1 Unit	110,000,000				
			SDN 6 Muara Cijung Timur	Rangkasbitung	1 Unit	110,000,000				
			SDN 2 Muara Cijung Timur	Rangkasbitung	1 Unit	110,000,000				
			SDN 8 Muara Cijung Timur	Rangkasbitung	1 Unit	110,000,000				
			SDN 2 Pabuaran	Rangkasbitung	1 Unit	-		110,000,000		
			SDN 3 Mekarsari	Rangkasbitung	1 Unit	-		110,000,000		
			SDN 2 Cijoro Pasir	Rangkasbitung	1 Unit	-		110,000,000		
			SDN 2 Nameng	Rangkasbitung	1 Unit	110,000,000				
			SDN 3 Citeras	Rangkasbitung	1 Unit	110,000,000				
			SDN 2 Cijoro Lebak	Rangkasbitung	1 Unit	-	110,000,000			
			SDN 1 Pasirtanjung	Rangkasbitung	1 Unit	-	110,000,000			
			SDN 1 Kertaraharja	Banjarsari	1 Unit	-	110,000,000			
			SDN 3 Kaduhauk	Banjarsari	1 Unit	-	110,000,000			
			SDN 2 Cibaturkeusik	Banjarsari	1 Unit	110,000,000				
			SDN 2 Cisampih	Banjarsari	1 Unit	110,000,000				
			SDN 2 Tamansari	Banjarsari	1 Unit	-		110,000,000		
			SDN 1 Labanjaya	Banjarsari	1 Unit	-		110,000,000		
			SDN 1 Cisampih	Banjarsari	1 Unit	-		110,000,000		
			SD 1 Banjarsari	Warunggunung	1 Unit	110,000,000				
			SD 3 Cibuah	Warunggunung	1 Unit	110,000,000				
			SD 2 Jagabaya	Warunggunung	1 Unit	110,000,000				
			SD 1 Pasirtangkal	Warunggunung	1 Unit	110,000,000				
			SD 2 Selaraja	Warunggunung	1 Unit	110,000,000				
			SD 3 Selaraja	Warunggunung	1 Unit	-		110,000,000		
			Desa Selaraja	Warunggunung	1 Unit	-		110,000,000		
			SD 2 Sukaraja	Warunggunung	1 Unit	-		110,000,000		
			SD 1 Sukarendah	Warunggunung	1 Unit	-		110,000,000		
			SD 2 Sukarendah	Warunggunung	1 Unit	-		110,000,000		
						1,854,000,000				
1 01 16 93	Pengadaan Meubelair SD	Tersedianya Meubelair SD	29 SD		103 Lokal	927,000,000			120 Lokal	1,134,000,000
			SDN 3 Suwakan	Bayah	3 Lokal	27,000,000				
			Kp. Cibuntu 1	Bayah	3 Lokal	27,000,000				
			SDN Cibareno	Cilograng	3 Lokal	27,000,000				
			SDN 1 Cibeureum	Cijaku	3 Lokal	27,000,000				
			Meubelair 29 SDN	Gunungkencana	2 Lokal	261,000,000				
			Cirinten	Cirinten	1 Lokal	108,000,000				
			3 SD di Desa Parungkujang	Cileles	9 Lokal	81,000,000				
			SDN 1 Lebakgedong	Lebakgedong	2 Lokal	18,000,000				
			SDN 2 Lebaksangka	Lebakgedong	2 Lokal	18,000,000				
			SDN 1 Banjaririgasi	Lebakgedong	3 Lokal	27,000,000				
			SDN 2 Banjaririgasi	Lebakgedong	2 Lokal	18,000,000				
			SDN 1 Muncang	Muncang	1 Lokal	9,000,000				
			SDN 2 Mekarwagi	Muncang	1 Lokal	9,000,000				
			SDN 1 Pasirangka	Muncang	1 Lokal	9,000,000				
			SDN 2 Muncang	Muncang	1 Lokal	9,000,000				
			SDN 2 Sukanegara	Muncang	1 Lokal	9,000,000				
			SDN 1 Mekarwagi	Muncang	1 Lokal	9,000,000				
			SDN 1 Ciminyak	Muncang	1 Lokal	9,000,000				
			SDN 1 Cikarang	Muncang	1 Lokal	9,000,000				
			SDN 1 Jagaraksa	Muncang	1 Lokal	9,000,000				
			SDN 1 Tanjungwangi	Muncang	1 Lokal	9,000,000				
			SDN 2 Neglasari	Cibeber	1 Lokal	9,000,000				
			SDN 1 Kerta	Banjarsari	3 Lokal	27,000,000				
			SDN 1 Kaduhauk	Banjarsari	3 Lokal	27,000,000				
			SDN 1 Keretaraharja	Banjarsari	3 Lokal	27,000,000				
			SDN 3 Bojongjuruh	Banjarsari	3 Lokal	27,000,000				
			SDN 3 Kumpay	Banjarsari	3 Lokal	27,000,000				
			SDN 2 Cibaturkeusik	Banjarsari	3 Lokal	27,000,000				
			Desa Cibuah	Warunggunung	3 Lokal	27,000,000				
1 01 16	Pengadaan Buku Perpustakaan SD	Tersedianya Buku Perpustakaan SD	Tersebar di 100 SD		100 Paket	1,500,000,000			110 Paket	1,732,500,000
			Kp. Oke Rt.06/01 Ds. Sajiramekar	Sajira	1 Paket	15,000,000				
			99 SD	tersebar	99 Paket	1,485,000,000				
1 01 16	Penyediaan Sarana Pendidikan SD	Tersedianya Sarana Pendidikan SD	3 SD:		4 Paket	280,000,000			6 Paket	420,000,000
			SDN 1 Tanjung Wangi	Sajira	1 Paket	70,000,000				
			SDN 1 Leuwicoo	Sajira	2 Paket	140,000,000				
			SDN 1 Girijagabaya	Sajira	1 Paket	70,000,000				
	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary SD/MI	Terbangunnya sarana air bersih dan sanitary SD/MI	100 SD	tersebar	100 Unit	2,250,000,000			100 Unit	2,475,000,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 01 16 11	Pembangunan ruang ibadah SD/MI	Terbangunnya ruang ibadah SD/MI	100 SD	tersebar	100 Unit	5,500,000,000			100 Unit	6,050,000,000
1 01 16 18	Pengadaan alat praktek dan peraga siswa SD	Tersedianya alat praktek dan peraga siswa SD	100 SD	tersebar	100 Unit	6,900,000,000			100 Unit	7,590,000,000
1 01 16	Pelatihan penyusunan kurikulum SD	Terselenggaranya Pelatihan penyusunan kurikulum SD		Rangkasbitung	1 Keg.	200,000,000			1 Keg	220,000,000
1 01 16	Pelatihan penyusunan kurikulum SMP	Terselenggaranya Pelatihan penyusunan kurikulum		Rangkasbitung	1 Keg.	200,000,000			1 Keg	220,000,000
1 01 16	PAP BOS	Terselenggaranya operasional BOS		Rangkasbitung	1 Keg.	250,000,000			1 Keg	275,000,000
1 01 16 103	Penyediaan Pendamping Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SMP	Tersedianya dana Pendamping Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SMP		Rangkasbitung	1 Keg.	2,800,000,000			1 Keg	3,080,000,000
1 01 16	Seleksi & pembinaan siswa teladan SD	Terselenggaranya Seleksi & pembinaan siswa teladan		Rangkasbitung	1 Keg.	200,000,000			1 Keg	220,000,000
1 01 16 79	Lomba Olimpiade olah raga siswa nasinal (O2SN) SD	Terselenggaranya Lomba Olimpiade olah raga siswa nasinal (O2SN) SD		Rangkasbitung	1 Keg.	122,835,149			1 Keg	135,118,664
1 01 16 106	Lomba Minat Bakat Istimewa siswa SD	Terselenggaranya Lomba Minat Bakat Istimewa siswa		Rangkasbitung	1 Keg.	200,000,000			1 Keg	220,000,000
1 01 16	Lomba kreativitas dan kompetensi siswa SD	Terselenggaranya Lomba kreativitas dan kompetensi		Rangkasbitung	1 Keg.	200,000,000			1 Keg	220,000,000
1 01 16	Seleksi dan Pembinaan Bakat dan Prestasi Istimewa Siswa SD	Terselenggaranya Seleksi dan Pembinaan Bakat dan		Rangkasbitung	1 Keg.	200,000,000			1 Keg	220,000,000
1 01 16	Lomba Olimpiade Sains Nasional SD Tingkat Kab. Lebak	Terselenggaranya Lomba Olimpiade Sains Nasional		Rangkasbitung	1 Keg.	200,000,000			1 Keg	220,000,000
1 01 16	Lomba O2SN SD tingkat Kabupaten Lebak	Terselenggaranya Lomba O2SN SD tingkat Kabupaten		Rangkasbitung	1 Keg.	200,000,000			1 Keg	220,000,000
1 01 16	Penyelenggaraan Try Out UN SMP/MTs	Terselenggaranya Try Out UN SMP/MTs		Rangkasbitung	1 Keg.	175,478,784			1 Keg	193,026,662
1 01 16	Pendampingan UN SMP	Terselenggaranya UN SMP		Rangkasbitung	1 Keg.	100,000,000			1 Keg	110,000,000
1 01 16	Penyelenggaraan Bimbingan Belajar SMP/MTs	Terselenggaranya Bimbingan Belajar SMP/MTs		Rangkasbitung	1 Keg.	300,000,000			1 Keg	330,000,000
1 01 16	Penyelenggaraan Try Out UASBN SD	Terselenggaranya Try Out UASBN SD		Rangkasbitung	1 Keg.	350,000,000			1 Keg	385,000,000
1 01 16 115	Pelaksanaan UASBN SD	Terlaksananya UASBN SD		Rangkasbitung	1 Keg.	650,000,000			1 Keg	715,000,000
1 01 16	Pengadaan pakaian seragam sekolah SD	Tersedianya pakaian seragam sekolah SD		Rangkasbitung	1 Keg.	1,300,000,000			1 Keg	1,430,000,000
1 01 16 123	Pembangunan USB SMP	Terbangunnya USB SMP	2 lokasi Kec. Bojongmanik SMPN 2 Filial Cibarani,	Bojongmanik Cirinten	2 Unit 1 1 Unit 1 1 Unit	- - -		1,000,000,000 500,000,000 500,000,000	4 Unit	3,000,000,000
1 01 16	Pembangunan RKB SMP	Terbangunnya RKB SMP	28 SMP		64 RKB	7,680,000,000			64 RKB	8,064,000,000
			SMPN 2 Malingping	Malingping	3 RKB	360,000,000				
			SMPN 4 SATAP Malingping	Malingping	3 RKB	360,000,000				
			SMPN 5 SATAP Malingping	Malingping	3 RKB	360,000,000				
			SMPN 1 Malingping	Malingping	4 RKB	480,000,000				
			SMPN 1 Wanasalam	Wanasalam	4 RKB	480,000,000				
			SMP SATAP	Cigemblong	1 RKB	120,000,000				
			SMP SATAP Wangunjaya	Cigemblong	1 RKB	120,000,000				
			SMP SATAP Cikate	Cigemblong	2 RKB	240,000,000				
			SMPN 3 Gunungkencana	Gunungkencana	2 RKB	240,000,000				
			SMPN 4 Gunungkencana	Gunungkencana	2 RKB	240,000,000				
			SMPN 5 Gunungkencana	Gunungkencana	2 RKB	240,000,000				
			SMPN 1 Bojongmanik	Bojongmanik	4 RKB	480,000,000				
			SMPN SATAP Mekarjaya	Cileles	3 RKB	360,000,000				
			SMP Daroyon	Cileles	1 RKB	120,000,000				
			SMPN 2 Leuwidamar	Leuwidamar	3 RKB	360,000,000				
			SMPN 5 Leuwidamar	Leuwidamar	3 RKB	360,000,000				
			SMPN 4 Leuwidamar	Leuwidamar	3 RKB	360,000,000				
			SMPN 2 Leuwidamar	Leuwidamar	1 RKB	120,000,000				
			SMPN 1 Muncang	Muncang	2 RKB	240,000,000				
			SMPN 2 Muncang	Muncang	2 RKB	240,000,000				
			SMPN 3 Muncang	Muncang	3 RKB	360,000,000				
			SMPN 4 Muncang	Muncang	1 RKB	120,000,000				
			SMPN 5 Muncang	Muncang	2 RKB	240,000,000				
			SMPN 6 Muncang	Muncang	1 RKB	120,000,000				
			SMPN 7 Muncang	Muncang	1 RKB	120,000,000				
			SMPN 5 Banjarsari	Banjarsarsari	3 RKB	360,000,000				
			SMPN 5 Banjarsari	Banjarsarsari	1 RKB	120,000,000				
			SMPN 2 Warunggunung	Warunggunung	3 RKB	360,000,000				
1 01 16	Pembangunan Turap SMPN 2	Terbangunnya Turap SMPN 2	SMPN 2 Malingping	Malingping	1 Paket	300,000,000			1 Paket	330,000,000
1 01 16 101	Rehabilitasi Ruang Kelas SMP	Tersedianya Ruang Kelas SMP yang layak	33 SMP	Tersebar	50 Ruang	3,250,000,000			55 Ruang	3,575,000,000
			SMPN 2 Wanasalam	Wanasalam	1 Ruang	65,000,000				
			SMP 2 SATAP Cijaku	Cijaku	2 Ruang	130,000,000				
			SMP 3 Cijaku	Cijaku	4 Ruang	260,000,000				
			30 SMP	Tersebar	43 Ruang	2,795,000,000				
	Pembangunan Perpustakaan SMP	Terbangunnya Perpustakaan SMP	3 Sekolah :		3 Unit	420,000,000			3 Unit	462,000,000
			SMPN 4 Cibeber	Cibeber	1 Unit	140,000,000				
			SMPN 1 Wanasari		1 Unit	140,000,000				
			SMPN 2 Leuwidamar	Leuwidamar	1 Unit	140,000,000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Rehabilitasi Gedung Guru dan TU	Tersedianya Gedung Guru dan TU yang layak	SMPN 5 Banjarsari	Banjarsari	1 Lokal	150,000,000			1 Lokal	165,000,000
16 83	Pengadaan Mebelair SMP	Terseainya Mebelair SMP	7 Sekolah:		75 Lokal	750,000,000			82 Lokal	825,000,000
			SMPN 1 Cijaku	Cijaku	3 Lokal	30,000,000				
			SMPN 1 Gunungkencana	Gunungkencana	1 Lokal	10,000,000				
			SMPN 2 Gunungkencana	Gunungkencana	1 Lokal	10,000,000				
			SMPN 3 Gunungkencana	Gunungkencana	1 Lokal	10,000,000				
			SMPN 4 Gunungkencana	Gunungkencana	1 Lokal	10,000,000				
			SMPN 5 Gunungkencana	Gunungkencana	1 Lokal	10,000,000				
			SMPN 6 Gunungkencana	Gunungkencana	1 Lokal	10,000,000				
			66 SMP	Tersebar	66 Lokal	660,000,000				
	Pembangunan Ruang Laboratorium	Terbanggunnya Ruang Laboratorium	SMPN 1 Bojongmanik	Bojongmanik	1 unit	140,000,000			1 unit	154,000,000
05 20 105	Pemagaran Lingkungan sekolah	Tertersedianya Pemagaran Lingkungan sekolah	SMPN 1 Cileles	Cileles	1 unit	100,000,000			1 unit	110,000,000
16 103	Beasiswa Anak Tidak Mampu jenjang SD	Tersedianya Beasiswa Anak Tidak Mampu jenjang SD	11 Desa		550 Orang	100,000,000			550 Orang	110,000,000
101	Pengadaan alat praktek dan peraga siswa SMP	Tersedianya alat praktek dan peraga siswa SMP	50 Sekolah	Tersebar	50 Paket	3,000,000,000			50 Paket	3,300,000,000
16 09	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir SMP	Terbanggunnya taman, lapangan upacara dan fasilitas	5 SMP	Kab. Lebak	5 Paket	450,000,000			5 Paket	495,000,000
1 01 17	Program Pendidikan Menengah	Meningkatkan mutu Pendidikan Menengah				23,530,865,137	1,500,000,000	1,500,000,000		30,929,451,650
1 01 17 01	Pembangunan USB SMA/SMK	Tertersedianya pembangunan USB SMA/SMK	2 Sekolah		2 unit	-			2 unit	3,000,000,000
			SMA 1 Cirinten	Cirinten	1 unit	-	1,500,000,000			
			SMK 1 Panggarangan	Panggarangan	1 unit	-		1,500,000,000		
1 01 17 04	Penambahan Ruang Kelas Baru SMA/ SMK	Terbanggunnya Ruang Kelas Baru SMA/ SMK	12 Sekolah		30 RKB	4,200,000,000			45 RKB	6,300,000,000
			SMAN 1 Cijaku	Cijaku	3 RKB	420,000,000				
			SMAN 1 Cigemblong	Cigemblong	1 RKB	140,000,000				
			SMAN 1 Gunungkencana	Gunungkencana	3 RKB	420,000,000				
			SMK parungkujang	Cileles	1 RKB	140,000,000				
			SMAN 2 Leuwidamar	Leuwidamar	3 RKB	420,000,000				
			SMAN 1 Leuwidamar	Leuwidamar	2 RKB	280,000,000				
			SMKN 1 Lebakgedong	Lebakgedong	3 RKB	420,000,000				
			SMK Cimarga	Cimarga	1 RKB	140,000,000				
			SMK Al - Kautsar	Muncang	3 RKB	420,000,000				
			SLTA Al- Azqia		3 RKB	420,000,000				
			SMAN 1 Maja	Maja	6 RKB	840,000,000				
			SMK Nasional	Banjarsari	1 RKB	140,000,000				
1 01 17 92	Rehabilitasi Ruang Kelas SMA	Tersedianya ruang kelas SMA yang layak	12 Sekolah	tersebar	36 Ruang	1,800,000,000			45 Ruang	2,250,000,000
			SMAN 1 Cileles	Cileles	3 Ruang	150,000,000				
			SMAN 1 Cijaku	Cijaku	3 Ruang	150,000,000				
			Tersebar 10 sekolah	tersebar	30 Ruang	1,500,000,000				
1 01 17 16	Pengadaan Meubelair SMA	Tersedianya meubelair SMA	Tersebar		50 Lokal	500,000,000			65 Lokal	650,000,000
			SMKN 1 Gunungkencana	Gunungkencana	3 Lokal	30,000,000				
			Tersebar	Tersebar	47 Lokal	470,000,000				
1 01 17	Pemagaran Lingkungan sekolah	Tertersedianya pemagaran sekolah	4 Sekolah		4 Paket	660,000,000			5 Paket	726,000,000
			SMAN 1 Cijaku	Cijaku	1 Paket	200,000,000				
			SMAN 1 Muncang	Muncang	1 Paket	35,000,000				
			SMAN 2 Muncang	Muncang	1 Paket	375,000,000				
			SMAN 1 Banjarsari	Banjarsari	1 Paket	50,000,000				
						-				
1 01 17	Pembangunan Laboratorium	Terbanggunnya Laboratorium SMA/SMK	SMAN 1 Leuwidamar	Leuwidamar	2 Lokal	200,000,000			2 Lokal	220,000,000
1 01 17	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah	Terbanggunnya Rumah Dinas SMA/SMK		Kab. Lebak	72 Lokal	1,350,000,000			72 Lokal	1,485,000,000
						-				
1 01 17	Penambahan ruang guru sekolah	Tersedianya ruang guru sekolah		Kab. Lebak	18 Lokal	350,957,568			18 Lokal	386,053,325
						-				
1 01 17 104	Pembangunan ruang praktikum SMK	Terbanggunnya ruang praktikum SMK		Kab. Lebak	30 Ruang	4,500,000,000			30	4,950,000,000
1 01 17	Pembangunan sarana olah raga volly ball	Terbanggunnya sarana olah raga volly ball		Kab. Lebak	5 Paket	475,000,000			5 Paket	522,500,000
1 01 17	Pembangunan sarana olah raga basket	Terbanggunnya sarana olah raga basket		Kab. Lebak	3 Paket	350,957,568			3 Paket	386,053,325
1 01 17	Pembangunan ruang ibadah SMA/SMK	Terbanggunnya ruang ibadah SMA/SMK		Kab. Lebak	10 Unit	1,350,957,568			10 Unit	1,486,053,325
1 01 17	Pembangunan gedung perpustakaan SMA/SMK	Terbanggunnya gedung perpustakaan SMA/SMK		Kab. Lebak	5 Unit	800,000,000			5 Unit	880,000,000
1 01 17 12	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary SMA/SMK	Terbanggunnya sarana air bersih dan sanitary SMA/SMK		Kab. Lebak	10 paket	300,000,000			10 paket	330,000,000
						-				
1 01 17	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa SMA	Tersedianya alat praktik dan peraga siswa SMA		Kab. Lebak	10 paket	750,000,000			10 paket	825,000,000
1 01 17	Pengadaan media pembelajaran (LCD) SMA/SMK	Tersedianya media pembelajaran (LCD) SMA/SMK		Kab. Lebak	10 paket	668,459,633			10 paket	735,305,596
						-				
1 01 17	Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu	Tersedianya dana beasiswa bagi keluarga tidak mampu		Kab. Lebak	1 Keg.	2,650,000,000			1 Keg	2,915,000,000
						-				
1 01 17 39	Pelatihan Komite Sekolah	Terselenggaranya Pelatihan Komite Sekolah		Rangkabitung	1	150,000,000			1 Keg	165,000,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 01 17	Penyelenggaraan bimbingan belajar bagi siswa SMA/SMK	Terselenggaranya bimbingan belajar bagi siswa		Rangkabitung	1	584,929,280			1 Keg	643,422,208
	Try out UN bagi siswa SMA/SMK	Terselenggaranya try out UN bagi siswa SMA/SMK		Rangkabitung	1	233,971,712			1 Keg	257,368,883
1 01 17 30	Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah SMA/SMK	Terselenggaranya Ujian Akhir Sekolah (UAS)		Rangkabitung	1	337,796,659			1 Keg	371,576,325
1 01 17 31	Menyelenggarakan Olimpiade Sains SMA	Terselenggaranya lomba Olimpiade Sains SMA		Rangkabitung	1	150,000,000			1 Keg	165,000,000
1 01 17 32	Penyelenggaraan Lomba O2SN SMA/SMK	Terselenggaranya Lomba O2SN SMA/SMK		Rangkabitung	1	122,835,149			1 Keg	135,118,664
1 01 17 33	Penyelenggaraan lomba Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMA/SMK	Terselenggaranya lomba Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMA/SMK		Rangkabitung	1 Kegiatan	150,000,000			1 Keg	165,000,000
	Menyelenggarakan lomba Siswa Prestasi SMA/SMK	Terselenggaranya lomba Siswa Prestasi SMA/SMK		Rangkabitung	1	150,000,000			1 Keg	165,000,000
1 01 17 35	Menyelenggarakan Karya Ilmiah Siswa (KIS).	Terselenggaranya Karya Ilmiah Siswa (KIS).		Rangkabitung	1	150,000,000			1 Keg	165,000,000
1 01 17 36	Menyelenggarakan lomba Minat Bakat Istimewa	Terselenggaranya lomba Minat Bakat Istimewa		Rangkabitung	1	150,000,000			1 Keg	165,000,000
1 01 17 37	Menyelenggarakan Lomba Cepat Tepat (LCT)	Terselenggaranya Lomba Cepat Tepat (LCT)		Rangkabitung	1	150,000,000			1 Keg	165,000,000
1 01 17 38	Menyelenggarakan Lomba Keterampilan Sisa (LKS) SMK	Terselenggaranya Lomba Keterampilan Sisa (LKS)		Rangkabitung	1	200,000,000			1 Keg	220,000,000
1 01 17	Sarana Pendidikan SMA/SMK	Tersedianya Sarana Pendidikan SMA/SMK	SMAN 1 Muncang	Muncang	2 Lokal	95,000,000			2 Lokal	100,000,000
1 01 18	Program Pendidikan Non Formal	Menurunnya angka buta aksara penduduk berusia				2,403,517,965				2,649,789,774
1 01 18 15	Pelatihan Pengelola PKBM	Terselenggaranya Pelatihan Pengelola PKBM		Rangkabitung	1	75,000,000			1 Keg	82,500,000
1 01 18 16	Pelatihan Tutor Keaksaraan Fungsional (KF)	Terselenggaranya Pelatihan Tutor Keaksaraan		Rangkabitung	1	58,492,928			1 Keg	65,000,000
1 01 18	Pelatihan Tutor Kesetaraan (Paket A, Paket B & Paket C)	Terselenggaranya Pelatihan Tutor Kesetaraan (Paket		Rangkabitung	1	58,492,928			1 Keg	65,000,000
	Paket A Setara SD	Terselenggaranya Paket A Setara SD		Rangkabitung	1	150,000,000			1 Keg	165,000,000
	Paket B Setara SMP	Terselenggaranya Paket B Setara SMP		Rangkabitung	1	250,000,000			1 Keg	275,000,000
	Paket C Setara SMA	Terselenggaranya Paket C Setara SMA		Rangkabitung	1	125,000,000			1 Keg	137,500,000
1 01 18 17	Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) Paket B & C	Terselenggaranya Ujian Nasional Pendidikan		Rangkabitung	1	152,081,613			1 Keg	167,289,774
1 01 18 18	Pelatihan Penyelenggara/Pengelola Kelembagaan/Kursus	Terselenggaranya Pelatihan Penyelenggara/Pengelola		Rangkabitung	1	150,000,000			1 Keg	165,000,000
1 01 18 19	Pelatihan Instruktur Lembaga Kursus	Terselenggaranya Pelatihan Instruktur Lembaga Kursus		Rangkabitung	1	58,492,928			1 Keg	65,000,000
1 01 18	Operasional Kursus Daerah Terencil	Terselenggaranya Operasional Kursus Daerah Terencil		Rangkabitung	1	58,492,928			1 Keg	65,000,000
1 01 18	Lomba Lembaga Kursus Berprestasi	Terselenggaranya Lomba Lembaga Kursus Berprestasi		Rangkabitung	1	58,492,928			1 Keg	65,000,000
1 01 18	Pengembangan Pendidikan Keaksaraan	Terselenggaranya Pengembangan Pendidikan		Rangkabitung	1	75,000,000			1 Keg	82,500,000
1 01 18	Pengembangan Life Skill	Terselenggaranya Pengembangan Life Skill		Rangkabitung	1	58,492,928			1 Keg	65,000,000
1 01 18	Pengembangan KBU	Terselenggaranya Pengembangan KBU		Rangkabitung	1	58,492,928			1 Keg	65,000,000
1 01 18	Pengembangan Magang	Terselenggaranya Pengembangan Magang		Rangkabitung	1	58,492,928			1 Keg	65,000,000
1 01 18	Pembangunan Gedung PKBM Pembina	Terbangunnya Gedung PKBM Pembina		Rangkabitung	1	200,000,000			1 Keg	220,000,000
1 01 18	Mebeulair PKBM	Tersedianya Mebeulair PKBM		Kab. Lebak	10 PKBM	100,000,000			10 PKBM	110,000,000
1 01 18	Operasional PKBM Pembina	Tersedianya Operasional PKBM Pembina		Rangkabitung	1 Keg	58,492,928			1 Keg	65,000,000
1 01 18	Melaksanakan Pendataan Kebutuhan PNF	Terlaksananya Pendataan Kebutuhan PNF		Rangkabitung	1 Keg	75,000,000			1 Keg	82,500,000
1 01 18	Beasiswa Pendidikan Calon Tutor dari Masyarakat & WB	Tersedianya Beasiswa Pendidikan Calon Tutor dari		Rangkabitung	1 Keg	75,000,000			1 Keg	82,500,000
1 01 18	Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Keaksaraan	Terselenggaranya Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan		Rangkabitung	1 Keg	75,000,000			1 Keg	82,500,000
1 01 18	Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal	Terselenggaranya Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan		Rangkabitung	1 Keg	75,000,000			1 Keg	82,500,000
1 01 18	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal	Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan non		Kab. Lebak	10 Keg	125,000,000			10 Paket	137,500,000
1 01 18	Pengembangan kurikulum bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal	Terwujudnya Pengembangan kurikulum bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal		Rangkabitung	1 Keg	175,000,000			1 Keg	192,500,000
1 01 20	Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Meningkatnya mutu Pendidik dan Tenaga				1,806,458,224				1,989,735,163
1 01 20	Sosialisasi Sertifikasi Guru	Terselenggaranya Sosialisasi Sertifikasi Guru		Rangkabitung	1 Keg	75,000,000			1 Keg	82,500,000
1 01 20 02	Pelatihan guru MIPA dan Bahasa SMP	Terselenggaranya Pelatihan guru MIPA dan Bahasa SMP		Rangkabitung	1 Keg	83,514,800			1 Keg	91,866,280
1 01 20 28	Pelatihan guru MIPA dan Bahasa SMA/SMK	Terselenggaranya Pelatihan guru MIPA dan Bahasa		Rangkabitung	1 Keg	100,000,000			1 Keg	110,000,000
1 01 20 29	Pelatihan Guru SMA/SMK/MA yang sudah tersertifikasi	Terselenggaranya Pelatihan Guru SMA/SMK/MA yang		Rangkabitung	1 Keg	58,492,928			1 Keg	64,342,221
1 01 20 30	Pelatihan guru SMA/SMK/MA yang belum tersertifikasi	Pelatihan guru SMA/SMK/MA yang belum tersertifikasi		Rangkabitung	1 Keg	58,492,928			1 Keg	65,000,000
1 01 20 31	Optimalisasi forum KKG	Terwujudnya forum KKG yang bermutu		Rangkabitung	1 Keg	58,492,928			1 Keg	65,000,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 01 20 32	Bintek Manajemen Kepala SD)	Terselenggaranya Bintek Manajemen Kepala SD)		Rangkabitung	1 Keg	58,492,928			1 Keg	65,000,000
1 01 20 33	Seleksi calon kepala Sekolah	Terselenggaranya Seleksi calon kepala Sekolah		Rangkabitung	1 Keg	58,492,928			1 Keg	65,000,000
1 01 20 34	PORSENI Guru TK	Terselenggaranya PORSENI Guru TK		Rangkabitung	1 Keg	200,000,000			1 Keg	220,000,000
1 01 20 15	Lomba gugus, sekolah sehat dan kinerja sekolah	Terselenggaranya Lomba gugus, sekolah sehat dan kinerja sekolah		Rangkabitung	1 Keg	200,000,000			1 Keg	220,000,000
1 01 20 38	Fasilitasi MGMP SMA/SMK/MA	Terselenggaranya Fasilitasi MGMP SMA/SMK/MA		Rangkabitung	1 Keg	75,000,000			1 Keg	82,500,000
1 01 20	Bintek penyusunan kurikulum SMA/SMK/MA)	Terselenggaranya Bintek penyusunan kurikulum SMA/SMK/MA)		Rangkabitung	1 Keg	150,000,000			1 Keg	165,000,000
1 01 20 22	Pemilihan guru, kepala sekolah dan pengawas berprestasi	Terselenggaranya Pemilihan guru, kepala sekolah dan pengawas		Rangkabitung	1 Keg	75,000,000			1 Keg	82,500,000
1 01 20 24	Bimbingan teknis (bintek) penyusunan laporan keuangan bagi bendahara sekolah	Terselenggaranya Bimbingan teknis (bintek) penyusunan laporan keuangan bagi bendahara sekolah		Rangkabitung	1 Keg	75,000,000			1 Keg	82,500,000
1 01 20 40	Pemetaan dan verifikasi keadaan guru	Terselenggaranya Pemetaan dan verifikasi keadaan guru		Rangkabitung	1 Keg	75,000,000			1 Keg	82,500,000
1 01 20	Fasilitasi penyusunan laporan keuangan Sekolah	Terselenggaranya Fasilitasi penyusunan laporan keuangan Sekolah		Rangkabitung	1 Keg	100,000,000			1 Keg	110,000,000
1 01 20	Penyediaan insentif bagi guru di daerah khusus	Terselenggaranya Penyediaan insentif bagi guru di daerah khusus		Rangkabitung	1 Keg	130,000,000			1 Keg	143,000,000
1 01 20	Penyediaan Beasiswa peningkatan kualifikasi pendidikan bagi guru	Terselenggaranya Penyediaan Beasiswa peningkatan kualifikasi pendidikan		Rangkabitung	1 Keg	175,478,784			1 Keg	193,026,662
1 01 21	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Meningkatnya Budaya Baca Masyarakat				150,000,000				165,000,000
1 01 21	Pengembangan Minat dan Budaya Baca	Meningkatnya Minat dan Budaya Baca Masyarakat		Rangkabitung	1 Keg	75,000,000			1 Keg	82,500,000
1 01 21 11	Penyediaan Sarana dan Prasarana TBM untuk program P2WKSS	Tersedianya Sarana dan Prasarana		Kab. Lebak	10 Paket	75,000,000			10 Paket	82,500,000
1 01 22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pelayanan				3,015,210,291				3,316,731,320
1 01 22 04	Sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan bidang pendidikan	Terselenggaranya Sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan bidang		Rangkabitung	1 Keg	100,000,000			1 Keg	110,000,000
1 01 22 21	Pembinaan dewan pendidikan	Terselenggaranya Pembinaan dewan pendidikan		Rangkabitung	1 Keg	120,000,000			1 Keg	132,000,000
1 01 22 06	Pelatihan kinerja komite sekolah	Terselenggaranya Pelatihan kinerja komite sekolah		Rangkabitung	1 Keg	58,492,928			1 Keg	64,342,221
1 01 22 16	Penyusunan Profil dan Statistik Pembangunan Pendidikan	Tersedianya Profil dan Statistik Pembangunan Pendidikan		Rangkabitung	1 Keg	100,000,000			1 Keg	110,000,000
1 01 22	Penyusunan Kajian Sekolah Unggulan dan Model	Tersedianya Kajian Sekolah Unggulan dan Model		Rangkabitung	1 Keg	50,000,000			1 Keg	55,000,000
1 01 22	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan (Jardiknas dan Padatiweb)	Tersedianya Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan (Jardiknas dan Padatiweb)		Rangkabitung	1 Keg	135,095,757			1 Keg	148,605,332
1 01 22 21	Pengadaan Tanah untuk Sekolah	Tersedianya Tanah untuk Sekolah		Rangkabitung	1 Keg	2,000,000,000			1 Keg	2,200,000,000
1 01 22 23	Penyelenggaraan pelatihan Kinerja Pengawas SMA/SMK	Terselenggaranya pelatihan Kinerja Pengawas SMA/SMK/MA		Rangkabitung	1 Keg	58,492,928			1 Keg	64,342,221
1 01 22 19	Penyelenggaraan Pelatihan penyusunan RKS SMP	Terselenggaranya Pelatihan penyusunan RKS SMP		Rangkabitung	1 Keg	87,739,392			1 Keg	96,513,331
1 01 22 20	Penyelenggaraan pelatihan ICT Pendidikan	Terselenggaranya pelatihan ICT Pendidikan		Rangkabitung	1 Keg	87,739,392			1 Keg	96,513,331
1 01 22 09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pendidikan	Tersedianya Monitoring, evaluasi dan pelaporan pendidikan		Rangkabitung	1 Keg	87,739,392			1 Keg	96,513,331
1 01 22 24	Replikasi Penyusunan RKS/MI di SD/MI	Terselenggaranya Replikasi Penyusunan RKS/MI di SD/MI		Rangkabitung	1 Keg	58,492,928			1 Keg	64,342,221
1 01 21 17	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan	Terselenggaranya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan		Rangkabitung	1 Keg	71,417,574			1 Keg	78,559,332
1 17	Kebudayaan					1,210,000,000				
1 17 15	Program pengembangan nilai budaya	Eksplorasi dan konservasi linggatan budaya				565,000,000				593,250,000
1 17 15	Pemberian Dukungan, Penghargaan dan kerjasama	a. Pemeliharaan Sarana Penunjang Pentas, Pengadaan Sarana Seni		Kab. Lebak	1 Paket	300,000,000			1 Paket	315,000,000
1 17 15	Pemenuhan dan evaluasi perkembangan nilai Budaya	b. Terlaksananya Bintek, Supervisi dan Monitoring pada Sekolah, Sanggar, Group Seni, Serima, Budayawan, Kalotan Dan Cagar Budaya	Sekolah, Sanggar, Group Seni, Budayawan, dan Kalotan, serimam, Cagar Budaya dan Situs dei Wil Kab Lebak	Kab. Lebak	1 Paket	125,000,000			1 Paket	131,250,000
1 17 15	Pengembangan Nilai dan Geografis Sejarah	Adanya Kajian dan Rumusan Sejarah Kaolotan Baten Kidul dan Cagar Budaya dan Situs serta makam-makam keramat	17 Kaolotan Baten Kidul, Bangunan Peninggalan Kolonial, Situs Cibeduk/Kosala	Kab. Lebak	1 Paket	75,000,000			1 Paket	78,750,000
1 17 15	Perumusan Kebijakan sejarah dan publikasi	Terselenggaranya Kebijakan Sejarah dan Publikasi (Penelitian/Kajian, pendokumentasian, Pendiskripsian dan pendaftaran semua Cagar Budaya dan sejarah kepurbakalaan	(Desa, Kecamatan, Kabupaten sesuai yg tertera pada SE Bupati Tahun 2004)	Kab. Lebak	1 Paket	65,000,000			1 Paket	68,250,000
1 17 17	Program pengelolaan keragaman budaya	Terwujudnya keserasian hubungan antar unit sosial dan antar budaya dalam rangka memperkuat NKRI				645,000,000				677,250,000
1 17 17 01	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	a. Terlaksananya Pagelaran seni di 3 Even Pentas seni TK Provinsi dan 6 Even Pentas seni TK Kabupaten b. Terbentuknya Tim Obade TK Kabupaten c. Terselenggaranya Kegiatan Pasanggiri Pencu Silat	Tk Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan pusat		1 Paket	250,000,000			1 Paket	262,500,000
1 17 17	Penyelenggaraan Dialog Kebudayaan	Terselenggaranya Kajian dim rangka Pengemasan Seni tari		Kab. Lebak	1 Paket	125,000,000			1 Paket	131,250,000
1 17 17	Pasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	Terselenggaranya Festival Kearifan Budaya Lokal mulai dari adat tradisi, Kuliner, Jenis Mainan anak, Dsb		Kab. Lebak	1 Paket	150,000,000			1 Paket	157,500,000
1 17 17	Penyusunan Sistem Informasi dan Data Base Kebudayaan	a. Terselenggaranya Pertemuan penyusunan, Pembahasan dan Penetapan Data Base Kebudayaan b. TercetakNYA BUKU Profil kebudayaan secara berjenjang dari mulai Profil Kecamatan dan Kebudayaan	di TK UPT/Kecamatan dan Kabupaten	Kab. Lebak	1 Paket	120,000,000			1 Paket	126,000,000
JUMLAH TOTAL						124,462,638,139	14,250,000,000	22,360,000,000		162,821,553,083